



WALIKOTA MAGELANG

Magelang, 26 Maret 2018

Kepada :

Nomor : 060 / 329 / 113

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Pengiriman Buku LKJIP 2017
dan Perjanjian Kinerja 2018
Kota Magelang.

Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala BPPN
3. Menteri Dalam Negeri

di

JAKARTA

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami kirimkan:

1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum.


WALIKOTA MAGELANG

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



WALIKOTA MAGELANG

Magelang, 26 Maret 2018

Kepada :

Nomor : 060 / 340 / 113

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Sifat : Penting

Lampiran : 2 (dua) berkas

di

Perihal : Pengiriman Buku LKjIP 2017
dan Perjanjian Kinerja 2018
Kota Magelang.

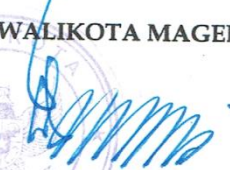
SEMARANG

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami kirimkan:

1. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017.
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2018.

Demikian untuk menjadikan maklum.

WALIKOTA MAGELANG

Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017

Bagian Organisasi Setda
Kota Magelang 2018



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb;



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Magelang Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LKjIP Kota Magelang Tahun 2017 merupakan wujud pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Adapun petunjuk pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2017 merupakan Tahun Kedua pelaksanaan RPJMD 2016-2021, adapun Visi pembangunan yang kami rumuskan sebagai berikut: **“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”**. Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. LKjIP Kota Magelang Tahun 2017 ini menyajikan realisasi kinerja atas indikator kinerja sasaran strategis yang tertuang dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017, yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Magelang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi atas tersusunnya laporan ini, mari kita senantiasa meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan SAKIP. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan meridloi langkah-langkah kita dalam menyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mencapai tujuan maupun cita-cita berbangsa dan bernegara guna mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat toleransi dalam keberagaman. Penyelenggaraan *good governance* merupakan prasyarat yang penting yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja. Pengembangan akuntabilitas berperan penting dalam proses pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2016-2021, sebagai salah satu media pertanggungjawaban Walikota. LKjIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk introspeksi dan mengevaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejauhmana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan LKjIP Kota Magelang Tahun 2017 didasarkan pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang dituangkan dalam perubahan perjanjian kinerja mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Magelang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang tahun 2017, telah ditetapkan 17 sasaran strategis dengan 44 indikator sasaran. Pengukuran terhadap indikator kinerja terbagi menjadi 5 kategori dalam skala ordinal merujuk pada Permendagri No. 54 Tahun 2010 yaitu capaian $\geq 91\%$ kriteria sangat tinggi, 76% sampai dengan $< 90\%$ kriteria tinggi, 66% sampai dengan $< 75\%$ kriteria sedang, 51% sampai dengan $< 65\%$ kriteria rendah dan capaian $< 50\%$ kriteria sangat rendah. Pengukuran kinerja atas 17 sasaran strategis dengan pencapaian masing-masing sebagai berikut **33 indikator kinerja** dengan kriteria **sangat tinggi** atau dengan presentase **75,00%**, **2 indikator kinerja** dengan kriteria **tinggi** atau dengan presentase **4,55%**, **0 indikator kinerja** dengan kriteria **sedang** atau dengan presentase **00,00%**, **4 indikator kinerja** dengan kriteria **rendah** atau dengan presentase **9,09%**, **4 indikator kinerja** dengan kriteria **sangat rendah** atau dengan presentase **9,09%** dan **1 indikator kinerja** belum dapat tersaji atau dengan presentase **2,27%**, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017 karena BPS belum publikasi data di Tahun 2017 ini.

Selanjutnya apabila indikator kinerja dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. **24** Indikator kinerja menunjukkan capaian kinerja di atas 100% (**melampaui target**) atau dengan presentase **54,55%**,
- b. **3** Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja 100% (**sesuai target**) atau dengan presentase **6,82%**.
- c. **8** Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara **75% s/d 99,99%** atau dengan presentase **18,18%**.
- d. **8** Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara **0% s/d 74,99%** atau dengan presentase **18,18%**
- e. **1** indikator kinerja data belum dapat tersaji atau dengan presentase **2,27%**, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender karena BPS belum publikasi data di Tahun 2017 ini.

Dalam konteks penggunaan anggaran efisiensi merupakan kemampuan untuk mendapatkan output/outcome yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya/input yang seminimal mungkin. Analisis efisiensi disini lebih ditekankan pada penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja (realisasi) dengan persentase realisasi anggaran. Pengalokasian anggaran pada sasaran strategis secara umum efisien pada 13 sasaran strategis, namun demikian pada 4 sasaran strategis belum tercapai efisiensi. Yaitu pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang dikarenakan belum optimalnya realisasi kinerja untuk rasio luas kawasan kumuh yang tingkat capaian kinerjanya sebesar 29,99%; Kemudian pada sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dikarenakan masih belum optimalnya realisasi kinerja untuk indikator persentase penurunan PMKS yang tingkat capaian kinerjanya hanya sebesar 64,04%; Selanjutnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan, hal ini dikarenakan adanya indikator kinerja yang belum dapat diukur, dikarenakan BPS belum melakukan penghitungan pada Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2017, serta kurang optimalnya realisasi kinerja pada indikator Rasio KDRT, dengan relatif banyaknya kasus KDRT yang terjadi di tahun 2017 sehingga tingkat capaian kinerja hanya sebesar 61,67 %, serta pada sasaran strategis Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama, hal ini dikarenakan belum tercapainya indikator persentase penurunan penyakit masyarakat yang ditargetkan 3% hanya tercapai 1,06% sehingga capaian kinerjanya hanya 35,33%, namun demikian untuk indikator tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama pada sasaran ini tercapai 100%, karena tidak terjadi konflik bernuansa SARA di Kota Magelang.

Dalam tahun anggaran 2017, untuk pencapaian 17 sasaran strategis dan 44 indikator kinerja utama, telah dianggarkan melalui APBD Kota Magelang Tahun 2017 sebesar Rp. 389.908.369.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 337.485.361.315,00 atau dengan serapan anggaran sebesar 85,56%. Adapun rata-rata capaian kinerja pada 17 sasaran strategis sebesar 129,28% dengan tingkat efisiensi sebesar 1,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis telah **efisien**.



Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam kriteria sangat tinggi, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2017 **telah berhasil**, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil memuaskan. Hal ini tentunya karena peran dan sinergi bersama antar organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Magelang. Untuk itu kinerja yang sudah baik ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Selanjutnya guna memperkuat sistem akuntabilitas perlu ditingkatkan dan diupayakan kesinambungan dalam perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran yang selaras, terarah dan tepat sasaran, serta lebih mengintensifkan monitoring dan evaluasi kinerja agar target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terwujud dan tercapai sesuai rencana dan dimungkinkan ada percepatan pencapaian sasaran strategis. Dengan telah dirintisnya pengintegrasian sistem perencanaan pembangunan daeran (SIPPD) dan sistim informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan pada tahun 2017, dan diterapkan di tahun 2018 ini Pemerintah Kota Magelang optimis praktek peningkatan manajemen kinerja akan semakin baik di tahun-tahun mendatang.





DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-1
1.3 Gambaran Umum Kota Magelang	I-1
a. Kondisi Geografis dan Demografi	I-1
b. Kondisi Pemerintahan	I-4
c. Isu Strategis	I-6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kota Magelang	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang	II-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA MAGELANG	III-1
3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-1
3.2 Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran	III-7
3.3 Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Magelang	III-92
3.4 Realisasi Anggaran per Sasaran	III-108
BAB IV PENUTUP	IV-1

LAMPIRAN

Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Magelang
Daftar Prestasi Kota Magelang Tahun 2017

K O T A

Magelang

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel. 1.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2017	I-3
Tabel. 1.2	Jumlah Aparatur Kota Magelang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2017	I-5
Tabel. 1.3	Komposisi PNS Pemerintah Kota Magelang Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017	I-6
Tabel. 1.4	Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017	I-6
Tabel. 2.1	Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2016	II-8
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing	III-7
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	III-14
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah	III-22
Tabel 3.5	Produk Domestik Regional Bruto Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Miliar Rupiah)	III-23
Tabel 3.6	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)	III-24
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	III-26
Tabel 3.8	Perhitungan Rerata Konsentrasi NO ₂ dan SO ₂	III-29
Tabel 3.9	Perhitungan Indeks Pencemaran Udara	III-29
Tabel 3.10	Rincian Luasan RTH Publik Kota Magelang	III-32
Tabel 3.11	Luasan Tutupan Vegetasi Kota Magelang	III-33
Tabel 3.12	Perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi	III-33
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang	III-35
Tabel 3.14	Kondisi Infrastruktur di Kota Magelang	III-36
Tabel 3.15	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang	III-38
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi Di Kota Magelang	III-40
Tabel 3.17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	III-44



		Halaman
Tabel 3.18	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan	III-48
Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang	III-52
Tabel 3.20	Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang	III-52
Tabel 3.21	Capaian Indikator kinerja Program Ketenagakerjaan Tahun 2017	III-53
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	III-55
Tabel 3.23	Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan PMKS	III-55
Tabel 3.24	Capaian Indikator kinerja Program Bidang Sosial Tahun 2017	III-56
Tabel 3.25	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasar Jenis Kelamin di Kota Magelang, Tahun 2010-2017	III-57
Tabel 3.26	PDRB per Kapita berdasar Proyeksi Penduduk Akhir Tahun di Kota Magelang, Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016-2017	III-58
Tabel 3.27	Capaian Indikator Makro Jawa Tengah, 2015-2017	III-59
Tabel 3.28	Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018	III-59
Tabel 3.29	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan	III-60
Tabel 3.30	Capaian Indikator kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2017	III-61
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 sd 2015	III-65
Tabel 3.32	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	III-65
Tabel 3.33	Capaian Kinerja Indikator Rasio KDRT Tahun 2011 sd 2017	III-66
Tabel 3.34	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014-2017	III-67
Tabel 3.35	Jenis KDRT 2014-2017	III-67
Tabel 3.36	Anak Korban Eksploitasi Seksual Tahun 2014-2016	III-68
Tabel 3.37	Nilai IPG, IDG, dan IPM Kota Magelang, Tahun 2010-2015	III-70
Tabel 3.38	Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015	III-71
Tabel 3.39	Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015	III-71
Tabel 3.40	Partisipasi Perempuan Legislatif Tahun 2014-2017	III-72
Tabel 3.41	Jumlah Polisi di Kota Magelang pada Tahun 2014-2017	III-73
Tabel 3.42	Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural dan Non struktural di Kota Magelang Tahun 2014-2017	III-73
Tabel 3.43	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2014-2017	III-74
Tabel 3.44	Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2014-2016	III-75



		Halaman
Tabel 3.45	Capaian Kinerja Indikator Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2017	III-76
Tabel 3.46	Capaian Kinerja Indikator Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta Tahun 2011-2017	III-77
Tabel 3.47	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan	III-79
Tabel 3.48	Situs/Cagar Budaya di Kota Magelang	III-81
Tabel 3.49	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial	III-83
Tabel 3.50	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terbentuknya Karakter Religius Masyarakat Sebagai Landasan Moral dan Etika Pembangunan	III-85
Tabel 3.51	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat	III-88
Tabel 3.52	Data Kriminalitas di Kota Magelang Tahun 2013 – 2017	III-90
Tabel 3.53	PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017	III-93
Tabel 3.54	PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017	III-94
Tabel 3.55	Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016	III-96
Tabel 3.56	PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017	III-97
Tabel 3.57	Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2016 dan Prediksi Tahun 2017	III-102
Tabel 3.58	Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015	III-103
Tabel 3.59	Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015	III-103
Tabel 3.60	Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017	III-106
Tabel 3.61	Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2016	III-107
Tabel 3.62	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2017	III-108
Tabel 4.1	Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017	IV-1



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah	I-2
Gambar 1.1	Luas Daerah Kota Magelang Menurut Kecamatan	I-3
Gambar 3.1	Grafik Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2017	III-6
Gambar 3.2	Grafik Realisasi Indikator kinerja terhadap Target	III-7
Gambar 3.3	Prediksi Kontribusi PDRB Sektor Lapangan Usaha Perdagangan	III-25
Gambar 3.4	Kegiatan Pemantaun/Survey Ketersediaan Pangan (Beras)	III-49
Gambar 3.5	Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat	III-86
Gambar 3.6	Dialog Peningkatan Wawasan Kebangsaan	III-87
Gambar 3.7	PDRB dan Indeks Perkembangan PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017	III-92
Gambar 3.8	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017	III-94
Gambar 3.9	Rata-rata Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2010-2016	III-96
Gambar 3.10	PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Akhir Tahun Kota Magelang, 2012-2016	III-97
Gambar 3.11	Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2017	III-99
Gambar 3.12	Pengeluaran PMTB dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB Kota Magelang, 2011-2017	III-100
Gambar 3.13	Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2017	III-101
Gambar 3.14	Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017	III-104
Gambar 3.15	Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2002-2017	III-105
Gambar 3.16	Persentase Penduduk Miskin (Po) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017	III-105
Gambar 3.17	Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2011-2017	III-108



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kota Magelang Tahun 2017 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2016-2021, sebagai salah satu media pertanggungjawaban Walikota. LKJIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat untuk introspeksi dan mengevaluasi atas pelaksanaan program-program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejuahmana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka peningkatan kinerja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3 Gambaran Umum Kota Magelang

- a. Kondisi Geografis dan Demografi.
Luas wilayah Kota Magelang 1.812 Ha (18,12 km²), secara administratif terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan luas wilayah rata-rata tidak lebih dari 2 km². Kota Magelang secara administratif terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan transportasi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung. Kota Magelang juga berada pada persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan dataran tinggi Dieng, disamping obyek wisata yang berada di dalam Kota Magelang sendiri yaitu

Kawasan wisata Taman Kyai Langgeng. Letak strategis Kota Magelang ini juga ditunjang dengan penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan Purwomanggung (Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang dalam Rencana Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan andalan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi unggulan utama meliputi industri besar, menengah dan kecil yang menghasilkan berbagai produk; pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan dan jasa, termasuk perguruan tinggi dan simpul pariwisata. Posisi tersebut menjadikan Kota Magelang sebagai kota kecil dengan nilai strategis dalam katagori sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW).

Gambar 1.1
Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah



Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

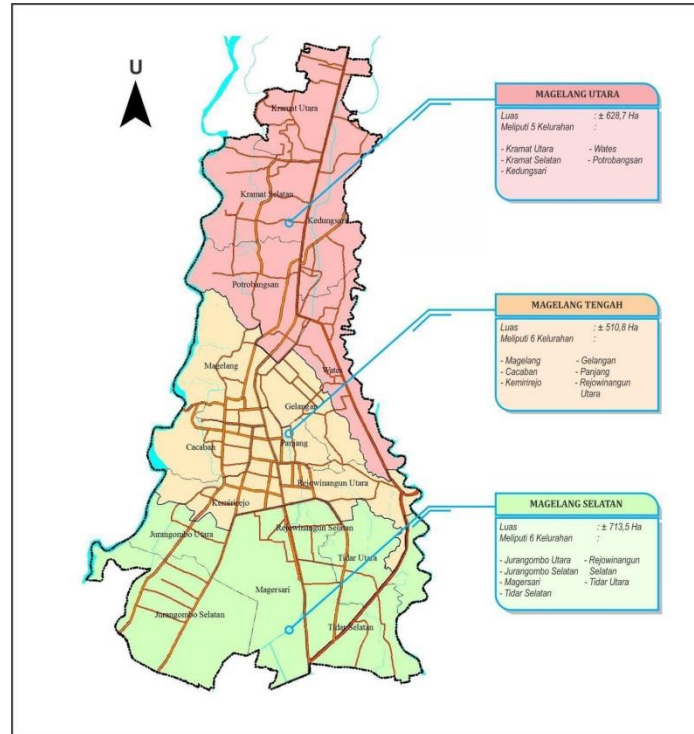
Sebagai kota yang menggantungkan harapan besar di sektor jasa, Kota Magelang mempunyai keunggulan komparatif geografis apabila dibandingkan dengan daerah di sekitarnya (*comparative advantage*). Banyak layanan jasa yang dapat disediakan oleh Kota Magelang, baik yang berhubungan dengan transportasi maupun layanan jasa pariwisata, yang didukung dengan kondisi sarana prasarana yang memadai sehingga diharapkan mampu memberikan pengaruh dan melayani beberapa kabupaten dan kota.

Kota Magelang merupakan kota kecil yang berada di tengah-tengah Kabupaten Magelang dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Elo/Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Progo/ Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.

Gambar 1.2
Luas Daerah Kota Magelang Menurut Kecamatan



Sumber : RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat dilihat bahwa peluang pengembangan wilayah tetap diupayakan di seluruh wilayah agar keramaian kota bisa tersebar merata ke hampir seluruh sudut kota. Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Magelang memberi perhatian lebih terhadap pengembangan wilayah utamanya pada wilayah perbatasan, daerah pinggiran Kota dan beberapa area strategis yang di anggap mampu untuk berkembang dan memacu pertumbuhan beberapa daerah di sekitarnya.

Sedangkan secara demografi berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 130.857 jiwa pada wilayah Kota Magelang seluas 18,12km².

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2017

KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
	L	P	L+P
Magelang Selatan	21,446	21,722	43,168
Rejowinangun Selatan	4,254	4,270	8,524

KECAMATAN/KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		
	L	P	L+P
Magersari	4,342	4,357	8,699
Jurangombo Utara	2,094	2,193	4,287
Jurangombo Selatan	3,576	3,695	7,271
Tidar Utara	4,252	4,281	8,533
Tidar Selatan	2,928	2,926	5,854
Magelang Utara	18,484	19,467	37,951
Wates	4,367	4,558	8,925
Potrobangsari	4,153	4,467	8,620
Kedungsari	3,697	3,809	7,506
Kramat Utara	2,376	2,467	4,843
Kramat Selatan	3,891	4,166	8,057
Magelang Tengah	24,489	25,249	49,738
Kemirirejo	2,900	2,993	5,893
Cacaban	3,980	4,161	8,141
Rejowinangun Utara	6,281	6,255	12,536
Magelang	3,888	4,129	8,017
Panjang	3,282	3,499	6,781
Gelangan	4,158	4,212	8,370
JUMLAH	64,419	66,438	130,857

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Data Per 31 Desember 2017

b. Kondisi Pemerintahan

b.1. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah (3 Staf Ahli Walikota, 3 Asisten, 9 Bagian)
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Inspektorat
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Dinas Sosial;
 6. Dinas Tenaga Kerja;
 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pertanian dan Pangan;

9. Dinas Lingkungan Hidup;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 17. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Kecamatan (3 Kecamatan) dan 17 Kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

b.2. Gambaran Umum Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Magelang

Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya aparatur yang memadai, pada Tahun 2017 jumlah aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Magelang sebanyak **3.066** personel. Kondisi jumlah aparatur tersebut selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Aparatur Kota Magelang Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2012-2017

TINGKAT PENDIDIKAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
S-3	0	0	0	0	0	0
S-2	256	264	275	332	356	267
S-1	2074	2051	2.081	2.028	1954	1383
D-4	37	38	40	39	41	36
D-3	513	483	459	493	479	451
D-2	295	242	209	146	120	87
D-1	35	32	27	24	20	19
SLTA	825	759	715	711	653	565
SLTP	192	185	207	180	173	146

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2017

Komposisi aparatur Pemerintah Kota Magelang berdasarkan pada tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Komposisi PNS Pemerintah Kota Magelang
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
S3	0
S2	267
S1	1,383
D4	36
D3	451
D2	87
D1	19
SLTA	565
SLTP	146
SD	112
JUMLAH	3,066

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2017

Sedangkan komposisi jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Magelang menurut jenis kelamin pada Tahun 2017 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Komposisi Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017

TINGKAT ESELON	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
ESELON I	---	---
ESELON II	25	4
ESELON III	58	41
ESELON IV	194	174
JUMLAH	277	219

Sumber : BKD Kota Magelang per Desember 2017

c. Isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi Kota Magelang dari berbagai aspek pembangunan dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global, nasional, provinsi maupun global, maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Magelang.

Dari proses analisis lingkungan strategis dengan menyandingkan:

- 1) Sasaran pokok pembangunan daerah dalam UU no 23 tahun 2014 pasal 258, yaitu: peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; kesempatan kerja; lapangan berusaha; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; daya saing Daerah;

- 2) RPJPD Kota Magelang 2005-2025, yaitu terwujudnya Kota Magelang: (i) sebagai pusat pelayanan jasa yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan fasilitas yang memadai; (ii) masyarakat Kota Magelang yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; (iii) daya saing daerah melalui pengelolaan pembangunan Kota Magelang yang efisien, efektif, profesional, berwawasan lingkungan, mengembangkan potensi daerah secara kreatif, inovatif didukung oleh penguasaan iptekdan sumber daya manusia yang berkualitas; (iv) perekonomian Kota Magelang yang bertumpu pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; (v) good governance dan clean government dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat madani (civil society), dan media massa sehingga kehidupan masyarakat Kota Magelang agamis, damai, demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran;
- 3) RTRW Kota Magelang 2011-2031: arah kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang kota;
- 4) Dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 yaitu (i) Keamanan dan Ketertiban; (ii) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; (iii) Pemerataan pembangunan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah; (iv) Kepastian dan penegakan hukum, (v) Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Perumahan; (vi) Pembangunan sektor unggulan: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (vii) Revolusi Mental; (viii) Politik dan Demokrasi;
- 5) RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, dengan isu: Pengurangan Kemiskinan, Pengurangan Pengangguran, Pembangunan Infrastruktur, Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi, Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah;
- 6) Hasil evaluasi RPJMD Kota Magelang 2010-2015, ditemukan hal-hal yang masih harus dikejar dari penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- 7) Visi misi Kepala Daerah Terpilih Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang mengusung isu: peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial, pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja, dan perlunya peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama.

Kriteria yang digunakan untuk penentuan isu strategis yaitu: (i) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah; (iii) dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat; (iv) memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; (v) Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani; dan (vi) prioritas janji politik yang perlu

diwujudkan. Setelah melakukan analisis isu, dilakukan proses pembobotan isu, dan konsultasi publik, maka ditarik kesimpulan bahwa terdapat isu strategis sebagai berikut:

- 1) Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan peningkatan penciptaan lapangan kerja;
- 2) Peningkatan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 3) Penguatan reformasi birokrasi;
- 4) Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat serta kondusivitas daerah;
- 5) Pengelolaan persampahan;
- 6) Peningkatan koperasi, usaha mikro dan perdagangan;
- 7) Penguatan daya saing dan kemandirian daerah;
- 8) Peningkatan kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama;
- 9) Penerapan prinsip-prinsip kota cerdas;
- 10) Penguatan kemitraan dalam pembangunan daerah;
- 11) Peningkatan daya saing dan daya jual pariwisata;
- 12) Penguatan implementasi Branding Magelang Kota Sejuta Bunga;
- 13) Pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah;
- 14) Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 15) Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- 16) Peningkatan ketahanan pangan;
- 17) Keadilan gender dan perlindungan anak;
- 18) Peningkatan kreativitas dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 19) Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.

Dari isu-isu strategis tersebut, dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) kelompok payung besar isu strategis Kota Magelang yaitu:

- 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan pemenuhan pelayanan dasar;
- 2) Peningkatan peran serta masyarakat serta perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (tanpa diskriminasi);
- 3) Penguatan reformasi birokrasi;
- 4) Memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang kuat, tangguh, dan mandiri;
- 5) Pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 6) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal;
- 7) Pengembangan dan pelestarian kesenian dan kebudayaan;
- 8) Penciptaan dan pemeliharaan stabilitas daerah.

BAB II
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Pemerintah Kota Magelang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan yang bersifat strategis untuk periode 5 tahun, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021. Dokumen ini sekaligus sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah, yang berpedomana pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dalam rangka pelaksanaan program strategis (RPJP maupun RPJM) nasional maupun provinsi.

RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 menjadi pijakan bagi perencanaan strategis organisasi perangkat daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang, dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam mencapai target kinerja yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan tingkat Kota maupun organisasi perangkat daerah.

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Kota Magelang

2.1.1. Visi

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut:

“MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS”.

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

2.1.2. Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Magelang selama kurun waktu 2016-2021. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

a. Misi 1:

Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi 1 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan aparatur professional dan berintegritas;
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi teknologi informasi;
- 3) Mewujudkan pengelolaan potensi daerah dan pembangunan daerah secara partisipatif dan demokratis untuk melayani aspirasi masyarakat secara berkeadilan;
- 4) Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran:

- 1) Terwujudnya aparatur sipil negara yang profesional dan organisasi perangkat daerah yang efektif dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penegakan hukum dan HAM tanpa diskriminatif;
- 3) Terwujudnya pemerintahan dengan pelayanan publik yang responsive;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung layanan Smart City dalam pemerintahan dan pelayanan publik;
- 5) Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
- 6) Peningkatan sumber pendapatan daerah dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 7) Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan;
- 8) Meningkatnya kemampuan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- 9) Meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam ajang prestasi tingkat regional, nasional dan internasional.

b. Misi 2:

Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Untuk mewujudkan Misi 2 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Meningkatkan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia;
- 2) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju smart environment;

Sasaran:

- 1) Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya kualitas sarana dan layanan kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kontribusi sektor industri usaha mikro, perdagangan dan jasa lainnya bagi perekonomian daerah;
- 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung kota magelang modern;
- 5) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 6) Meningkatnya ruang terbuka hijau;
- 7) Terwujudnya sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bencana;
- 8) Pemanfaatan lahan berkelanjutan sesuai regulasi tata ruang.

c. Misi 3:

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan Misi 3 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan pemerataan aksesibilitas;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian laju inflasi mendukung penurunan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Menurunkan pengangguran dan kemiskinan;
- 4) Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat;
- 5) Meningkatkan kesetaraan gender.

Sasaran:

- 1) Terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana dasar yang berkeadilan dan sesuai rasio kebutuhan masyarakat;

- 2) Menurunnya kesenjangan wilayah dan kesenjangan antar kelompok pendapatan;
- 3) Terwujudnya sistem transportasi dan lalu lintas yang baik, ramah lingkungan dan berkeadilan;
- 4) Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatnya produktivitas daerah dan ekonomi kreatif;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Meningkatnya lapangan kerja;
- 8) Meningkatnya kesejahteraan sosial, penurunnya jumlah keluarga miskin dan PMKS;
- 9) Terkendalnya Laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan;
- 10) Menurunnya kesenjangan gender.

d. Misi 4:

Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

Untuk mewujudkan Misi 4 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Mewujudkan pelestarian budaya dan kesenian daerah;
- 2) Mengembangkan dan mengelola destinasi wisata.

Sasaran:

- 1) Pertumbuhan jenis kesenian dan adat budaya yang dikembangkan dan situs cagar budaya yang dilestarikan;
- 2) Pertumbuhan daya tarik destinasi pariwisata yang potensial.

e. Misi 5:

Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Untuk mewujudkan Misi 5 tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

- 1) Menyiapkan landasan masyarakat madani yang harmonis dan kolaboratif berlandaskan tata nilai religious;
- 2) Mewujudkan kondusifitas iklim kebebasan beragama dan beribadat menuju tata kehidupan kota yang tertib, aman, dan nyaman.

Sasaran:

- 1) Terbentuknya karakter religius dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan moral dan etika pembangunan;

- 2) Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat;
- 3) Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam peribadatan.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan bagi pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Penetapan tema atau fokus tahunan tidak berarti mengabaikan kondisi lain yang memang harus dikerjakan terus menerus setiap tahun. Alokasi program rutin dan penyelenggaraan layanan publik terus menerus ada dan dialokasikan anggaran. Hal ini didasari prinsip perencanaan strategik tehnokratis. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua: (1) Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah; (2) Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Magelang pada akhir tahun perencanaan RPJMD 2016-2021 agar dapat memberikan arahan maka ditetapkan pentahapan melalui 6 tahapan. Keenam tahapan tersebut meliputi: Tema Tahun I: Konektif dan Kolaboratif bersama Mitra; Tema Tahun II: Kreatif dan Inovatif Bersama Mitra; Tema Tahun III: Produktif bersama Mitra; Tema tahun IV: Promotif dan Ekspansif bersama Mitra, Tema Tahun V: Kompetitif bersama Mitra, dan Tema Tahun VI adalah Akomodatif dan Transitif menuju lanjutan. Pada akhir tahun perencanaan, monumen tercapainya Visi Misi ditandai dengan Kota Magelang diharapkan akan menjadi kota yang “Ngrejekeni, Ngayomi, Ngayemi, Handarbeni, Marisi, dan Ngangeni”. Dari keseluruhan rangkaian program dan kegiatan diharapkan pada akhir RPJMD tahun 2021 Kota Magelang maju, modern, cerdas, masyarakat sejahtera, dan religius. Dengan demikian Kota Magelang menjadi yang ngrejekeni (nyaman untuk mencari nafkah hidup), ngayomi (masyarakat terlindungi), ngayemi (masyarakat merasa nyaman tenteram), handarbeni (masyarakat merasa memiliki dan mencintai Kota Magelang), marisi (masyarakat terbiasa hidup cinta lingkungan sehingga mewariskan bumi yang sehat selamat untuk anak cucunya), ngangeni (masyarakat yang diperantauan dan masyarakat luar daerah

rindu untuk datang ke Kota Magelang). Indikator keberhasilannya secara tehnokratik sebagaimana dipaparkan dalam indikator sasaran daerah.

Arah kebijakan menjadi penghubung pengelompokkan arah pencapaian sasaran melalui prioritas pembangunan pada setiap tahapan tahun. Program unggulan Walikota terpilih sebagai janji politik tertuang dalam penjabaran visi dan misinya, direpresentasikan melalui rumusan program berikut: (i) Program pengembangan daya saing daerah berbasis potensi lokal; (ii) Program kota cerdas; (iii) Program peningkatan Kualitas sumber daya aparatur pemerintah; (iv) Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan; (v) Program pemerintahan responsif dan partisipatif; (vi) Program kemitraan pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (vii) Program perluasan peluang kerjasama dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan; (viii) Program penguatan pertumbuhan ekonomi; (ix) Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan; (x) Program pengembangan wilayah terpadu berkeadilan (inklusif) dan mengurangi kesenjangan wilayah; (xi) Program masyarakat religius menuju masyarakat madani.

Sebagaimana Perencanaan tahun pertama dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mengambil tema: "Membangun Kolaborasi dan Konektivitas: antar pelaku pembangunan, antarsektor; dan antar wilayah. Pada tahap ini diprioritaskan pada upaya penyiapan kerangka landasan untuk pencapaian visi misi RPJMD tahun 2016-2021:

1. Membangun kerangka kerja kelembagaan (SOTK)
Prioritas ini termasuk upaya menata organisasi perangkat daerah sesuai regulasi dan penempatan aparatur sesuai kompetensinya. Penyusunan tata kerja yang tepat tidak tumpang tindih dan memperhatikan alur sinergitas pada penanganan isu lintas bidang urusan pemerintahan.
2. Kerangka regulasi
Prioritas ini memuat upaya penyusunan roadmap kebutuhan regulasi selama 5 tahun ke depan sesuai dengan kebijakan yang harus disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
3. Kerangka kajian kemitraan
Program ini untuk menyediakan roadmap rencana kerjasama kemitraan dengan pihak dunia usaha, media, dan masyarakat menuju kota Magelang maju, modern dan cerdas. Misi walikota terpilih hendak mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga pada tahap ini menjadi masa persiapan mendidik masyarakat punya kepedulian membentuk forum warga sebagai mitra pembangunan pemerintah. Kerangka kerja kemitraan dioptimalkan dengan peluang pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kerangka kajian kebutuhan infrastruktur menyiapkan Magelang kota cerdas (smart city) dan modern.
Prioritas ini untuk menyiapkan perangkat dasar pengembangan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Infrastruktur yang mendukung perwujudan Magelang kota jasa modern dan maju juga mulai disiapkan kajian kebutuhannya.
5. Penyiapan basis data terpadu untuk sistem pengukuran kinerja
Prioritas ini untuk menyiapkan akuntabilitas kinerja perencanaan pembangunan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah supaya pemanfaatan sumber daya daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan benar kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
6. Penyelenggaraan layanan wajib dasar sesuai standar pelayanan minimal

Arah kebijakan pembangunan tahap ini untuk menjawab **pencapaian prioritas pembangunan fokus** pada:

1. Penguatan profesionalitas kinerja aparatur dan integritasnya
2. Penataan organisasi perangkat daerah (SOTK) yang efektif dan efisien dilengkapi dengan norma standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur
3. Pengembangan manajemen sistem data dan informasi secara terpadu dan akurat
4. Meluaskan cakupan jenis pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
5. Meluaskan jangkauan akses partisipasi publik dalam proses pembangunan kota yang menggunakan aplikasi teknologi informasi
6. Menyempurnakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah
7. Meningkatkan akses informasi, komunikasi, partisipasi dan kemitraan bagi masyarakat mendukung peningkatan kemajuan dan kesejahteraan kota
8. Peningkatan promosi komunikasi, informasi, dan edukasi promotif dan preventif hidup sehat
9. Peningkatan kualitas sarana prasarana, alat dan mutu pelayanan kesehatan
10. Pengembangan sinergitas kebijakan pembangunan Infrastruktur pelayanan dasar dan pendukung bidang perumahan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan pemukiman secara inklusif berkeadilan dan ramah lingkungan
11. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program pembangunan penguatan ekonomi daerah terpadu bidang KUM, industri, perdagangan, pertanian, peternakan.
12. Pengembangan sinergitas kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan masyarakat terpadu meliputi: peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemberdayaan PMKS

Prioritas urusan yang mendukung arah kebijakan perencanaan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah:

1. Fungsi penunjang urusan pemerintahan;

2. Urusan pendidikan;
3. Urusan kesehatan;
4. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
5. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Urusan sosial;
7. Urusan komunikasi dan informatika;
8. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;

Program unggulan sebagai prioritas pada perencanaan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2017 adalah:

1. Program peningkatan kualitas sumber daya pemerintah;
2. Program peningkatan daya saing daerah;
3. Program kota cerdas;
4. Program pemerintahan responsif dan partisipatif;
5. Program pelayanan kesejahteraan sosial dan penurunan kemiskinan;
6. Program pembangunan berwawasan lingkungan aman, sehat, berkelanjutan.

Selain berpedomanan pada tema pembangunan Tahun 2017 yang merupakan tema pentahapan pencapaian Visi Walikota Magelang, Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

2.2 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang mencerminkan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu, tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, diantaranya adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	10,41 Tahun
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	112%
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,31
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	85%
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	76%
		6	Harapan Lama Sekolah	13,45 Tahun
2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	76,71 Tahun
		2	AKI/ 1.000 KH	126
		3	AKB/ 1.000 KH	14,5
		4	AKABA	0,155
		5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31
		6	Angka Kesakitan DBD	<50
		7	Angka Prevalensi Kasus TB	<105
		8	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	<0,05%
3	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	16,15%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	75,65
		2	Indeks Pencemaran Udara	61,8
		3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,55
		4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur Kota Magelang	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	82%
6	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Kota Magelang	1	Luas Kawasan Kumuh	39,65 Ha
		2	Prosentase RTLH	2,90%
7	Meningkatnya Keamanan, dan Keselamatan Transportasi di Kota Magelang	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8,25
8	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Jumlah Investor	164
		2	Pertumbuhan nilai investasi PMA	5%
		3	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%
9	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras	12.831 ton
10	Meningkatnya daya saing tenaga kerja Kota Magelang	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	65%
11	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	1	Persentase Penurunan PMKS	15%
		2	Pendapatan Perkapita	Rp.63.394.588,17
		3	Angka Kemiskinan	7,41%-8,09%

	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target Kinerja 2017
12	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak
13	Meningkatnya kualitas pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan	1	Indeks Pemberdayaan Gender	79,2
		2	Rasio KDRT	0,060%
14	Meningkatnya pelestarian budaya Kota Magelang	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan	14%
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	5 situs/bcb
15	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota Magelang	1	Jumlah Wisatawan	
			a. Nusantara	1.136.435 orang
			b. Mancanegara	5.185 orang
		2	Lama Tinggal Wisatawan	2-3 hari
16	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%
		2	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%
17	Terwujudnya lingkungan kondusif yang mendukung stabilitas daerah serta memberikan rasa aman bagi masyarakat	1	Angka kriminalitas	13,14%
		2	Tingkat Pelanggaran Perda	90%
		3	Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	94,50%



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Magelang selaku pengemban amanah masyarakat Kota Magelang melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang, yang disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Melalui pelaporan kinerja diharapkan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 dapat tersaji dengan baik, sehingga dapat dijadikan sebagai alat monitoring, evaluasi dan pengendalian untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun selanjutnya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*)

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri No. 86 tahun 2017 sebagai berikut:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

3.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017, tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
					Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1 Rata-rata lama sekolah	10,32	10,28	10,41	10,29	98,85%	10,59	Sangat Tinggi
		2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,15%	108,15%	112%	94,46%	84,34%	120,00%	Tinggi
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,51%	96,61%	97,31%	82,49%	84,77%	98,91%	Tinggi
		4 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81,92%	81,92%	85%	94,19%	110,81%	100,00%	Sangat Tinggi
		5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	74,62%	74,62%	76%	74,96%	98,63%	84,00%	Sangat Tinggi
		6 Harapan Lama Sekolah	13,08	13,4	13,45	13,55	100,74%	14,19	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1 Angka Harapan Hidup	76,58	76,58	76,71	76,58	99,83%	76,94	Sangat Tinggi
		2 AKI/ 1.000 KH	187,5	0	126	192,43	47,28%	70	Sangat Rendah
		3 AKB/ 1.000 KH	15,63	10,66	14,5	12,19	115,93%	12,5	Sangat Tinggi
		4 AKABA	0,63	0,1266	0,155	0,141	109,03%	0,135	Sangat Tinggi
		5 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,31	0,22	0,31	0,19	138,71%	0,31	Sangat Tinggi
		6 Angka Kesakitan DBD	130,93	65,58	<50	49,66	100,68%	<50	Sangat Tinggi
		7 Angka Prevalensi Kasus TB	128,33	119,85	<105	153,49	53,82%	<101	Rendah
		8 Angka Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,04%	0,02%	<0,05%	0,03%	140,00%	<0,05%	Sangat Tinggi



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	15,70%	14,59%	16,15%	15,95%	98,76%	17,11%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	68,9	36,25	75,65	46,47	61,43%	76,84	Rendah
		2	Indeks Pencemaran Udara	45,3	58,24	61,8	85,67	138,62%	79,1	Sangat Tinggi
		3	Indeks Tutupan Vegetasi	48,16	54,03	48,55	57,24	117,90%	49,56	Sangat Tinggi
		4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,12	49,96	62	62,54	100,87%	68,5	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	79%	83%	82%	82,62%	100,76%	86%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang	1	Rasio Luas kawasan kumuh	121,27 Ha	96,87	39,65	67,41	29,99%	0 Ha	Sangat Rendah
		2	Prosentase RTLH	4,40%	4,20%	2,90%	2,58%	111,03%	0,00%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Keamanan, dan Keselamatan Transportasi di Kota Magelang	1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	7,83	8	8,25%	8,40%	101,82%	9,25	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat	1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	0%	5%	0,19%	3,80%	15%	Sangat Rendah
		2	Pertumbuhan nilai investasi PMDN	15%	20,42%	15%	16,31%	108,73%	15%	Sangat Tinggi
		3	Jumlah Investor	159	63	164	1.493	910,37%	200	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	12.729	13.501	12.831	13.637	106,28%	13.037	Sangat Tinggi



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
10	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	60%	90,84%	65%	93,32%	143,57%	70%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Persentase Penurunan PMKS	14%	2%	15%	9,61%	64,04%	19%	Rendah
		2	Pendapatan Perkapita	Rp.53.543.836,59 *	Rp.58.353.897,63	Rp.63.394.588,17	Rp.63.408.678,877	100,02%	Rp.63.394.588,17	Sangat Tinggi
		3	Angka Kemiskinan	9,05%	9%	7,41%-8,09%	8,75%	91,84%	6,12%-6,40%	Sangat Tinggi
12	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2	2	100,00%	2 anak	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	1	Rasio KDRT	0,07%	0,15%	0,060%	0,083%	61,67%	0,04%	Rendah
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	78,83	NA	79,2	NA	NA		NA
14	Meningkatnya Pelestarian Budaya Kota Magelang	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,00%	15,00%	14%	15%	107,14%	16,00%	Sangat Tinggi
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	0	5	35	700,00%	25	Sangat Tinggi
15	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota Magelang	1	Jumlah Wisatawan Nusantara	1.133.373	1.139.585	1.136.435	1.283.462	112,94%	1.143.954	Sangat Tinggi
		2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	5.171	6.793	5.185	6.812	131,38%	5.219	Sangat Tinggi
		3	Lama Tinggal Wisatawan	2-3 hari	1-2 hari	2-3 hari	2-3 hari	100,00%	2-4 hari	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	-2,13%	3%	3%	1,06%	35,33%	3%	Sangat Rendah

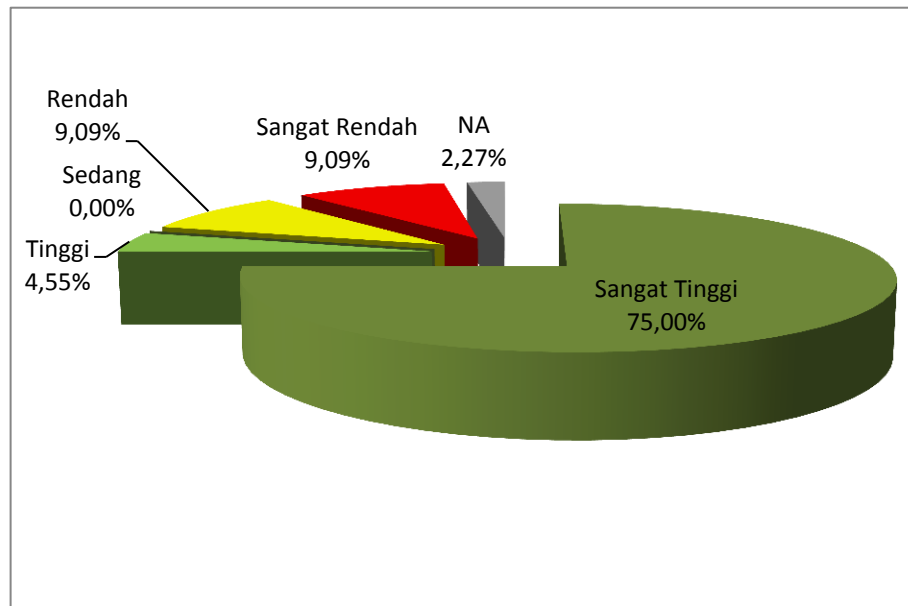
No.	Sasaran		Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Realisasi 2016	TAHUN 2017			Target Akhir RPJMD 2021	Kriteria
						Target	Realisasi	% Capaian Kinerja		
		2	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	75%	100%	100%	100%	100,00%	100%	Sangat Tinggi
17	Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman bagi Masyarakat	1	Angka kriminalitas	14,14%	14,02%	13,14%	13,31%	98,71%	11,14%	Sangat Tinggi
2		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	89%	90,48%	90,00%	100,00%	111,11%	100,00%	100,00%	Sangat Tinggi
3		Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	93,92%	98,00%	94,50%	100,00%	105,82%	98,00%	98,00%	Sangat Tinggi

Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2017

Berdasarkan data sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 tersebut di atas, dari 17 Sasaran Strategis dan 44 Indikator Kinerja Sasaran yang diukur pada tahun 2017, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat tinggi sejumlah 33 indikator atau 75,00%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria tinggi sejumlah 2 indikator atau 4,55%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sedang sejumlah 0 indikator atau 0,00%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria rendah sejumlah 4 indikator atau 9,09%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria sangat rendah sejumlah 4 indikator atau 9,09%.
- Data belum dapat tersaji untuk 1 indikator atau 2,27% yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017 karena BPS tidak melaksanakan kegiatan Sakernas untuk penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017.

Gambar 3.1
Grafik Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2017



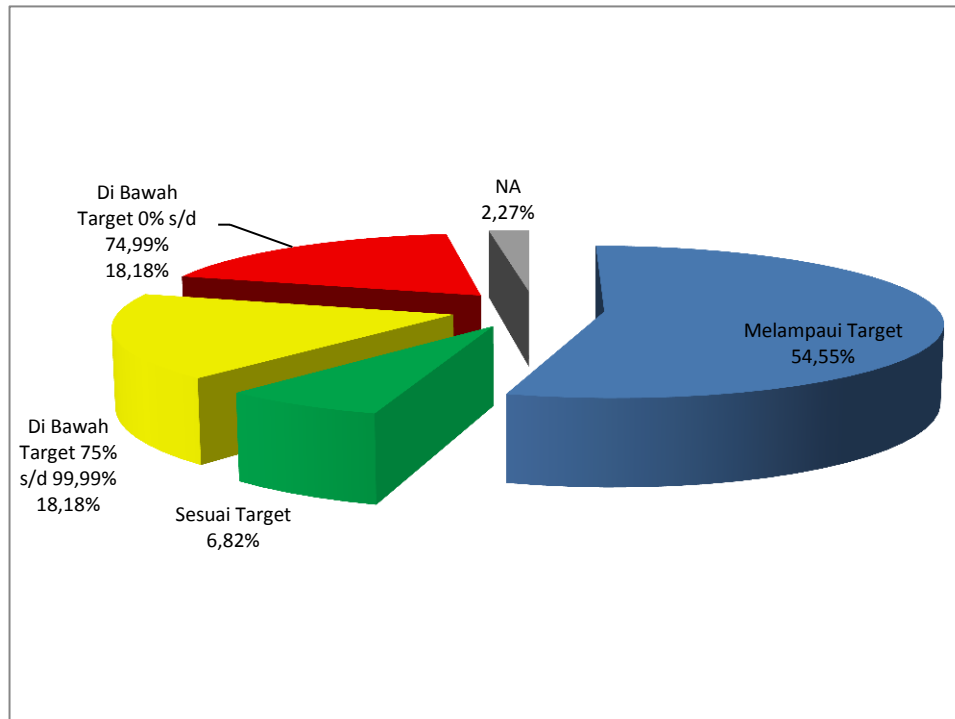
Selanjutnya apabila data dipilah berdasarkan tingkat ketercapaian realisasi indikator kinerja terhadap target kinerja maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja di atas 100% (**melampaui target**) sejumlah 24 indikator atau 54,55%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja 100% (**sesuai target**) sejumlah 3 indikator atau 6,82%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara 75% s/d 99,99% sejumlah 8 indikator atau 18,18%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja **di bawah target** dengan rentang antara 0% s/d 74,99% sejumlah 8 indikator atau 18,18%.
- Data belum dapat tersaji sejumlah 1 indikator atau 2,27% , yaitu Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017.

K O T A

Magelang

Gambar 3.2
Grafik Realisasi Indikator kinerja terhadap Target



3.2. Evaluasi dan Analisis Atas Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pada Sub Bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis, sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun hasil pengukuran atas sasaran ini tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan Menuju Masyarakat Cerdas dan Berdaya Saing

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rata-rata lama sekolah	10,28	10,41	10,29	98,85%	10,59
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,15%	112%	94,46%	84,34%	120%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	96,61%	97,31%	82,49%	84,77%	98,91%
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	81,92%	85%	94,19%	110,81%	100%
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	74,62%	76%	74,96%	98,63%	84%
6	Harapan Lama Sekolah	13,40	13,45	13,55	100,74%	14,19
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					96,36%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 6 indikator, adapun realisasi 4 indikator di bawah target, dan 2 indikator telah melampaui target yaitu indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 96,36%.

Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years school*) merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/ tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Realisasi kinerja untuk indikator Rata-rata lama sekolah (*mean years school*) sebesar 10,29 lebih rendah 0,12 poin dari yang ditargetkan sebesar 10,41 dengan capaian kinerja sebesar 98,85% artinya target belum dapat tercapai.

Realisasi kinerja Rata-rata lama sekolah (*mean years school*) Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10,28 **meningkat** sebesar **0,01** poin.

Dengan capaian tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Kota Magelang adalah setara dengan Kelas X SMA Semester II.

Adapun permasalahan yang dihadapi, dalam capaian indikator rata-rata lama sekolah adalah :

- Pendataan/Penghitungan secara valid jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Upaya yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi :

- Melakukan pendataan berbasis masyarakat.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah **pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya)** terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Cara menghitung Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebagai berikut :

- $APK\ SD/MI = \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7-12 tahun}} \right) \times 100\% \right\};$

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI sebesar 94,46% lebih rendah 17,54% dari yang ditargetkan sebesar 112% dengan capaian kinerja sebesar 84,34% artinya target belum dapat tercapai.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 108,15% mengalami **penurunan** sebesar **13,69** poin.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) **mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.**

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Cara menghitung Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai berikut :

- $APM\ SD/MI = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk umur 7—12 yang sekolah di SD}}{\text{Jumlah penduduk umur 7—12 tahun}} \times 100\% \right\};$

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebesar 82,49% lebih rendah 14,82% dari yang ditargetkan sebesar 97,31% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,77% artinya target belum tercapai.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 96,61% mengalami penurunan sebesar 14,12 poin.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan SMP/MTs. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan SMP/MTs (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut yaitu pada rentang umur 13-15 th.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- $APK\ SMP/MTs = \left\{ \frac{\text{Jumlah penduduk yang sekolah di SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk umur 13—15 tahun}} \times 100\% \right\}.$

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs sebesar 94,19% lebih tinggi 9,19% dari yang ditargetkan sebesar 85% dengan capaian kinerja sebesar 110,81% artinya target sudah dapat tercapai.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 81,92% meningkat sebesar 12,27 poin.

Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia SMP/MTs yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang **sesuai dengan usianya** terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) **mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.**

Cara menghitung Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebagai berikut :

- $APM \text{ SMP/MTs} = \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 yang sekolah di SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk umur 13-15 tahun}} \right) \times 100\% \right\}$.

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sebesar 74,96%, lebih rendah 1,04% dari yang ditargetkan sebesar 76% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,63% artinya target belum tercapai.

Realisasi kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 74,62% **meningkat** sebesar **0,34 poin.**

Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Realisasi kinerja indikator Harapan Lama Sekolah sebesar 13,55 lebih tinggi 0,10 poin dari yang ditargetkan sebesar 13,45 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,74% artinya realisasi kinerja melampaui target.

Realisasi kinerja Harapan Lama Sekolah (HLS) 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 13,40 **meningkat** sebesar **0,15 poin.**

Beberapa kendala dalam penyelenggaraan di bidang pendidikan, antara lain:

1. Belum memenuhinya standar nasional sarana prasarana sekolah, terkait fasilitas perpustakaan sekolah dan sarana pendukung sekolah
 - a. Perpustakaan Sekolah :
 1. Ukuran ruang perpustakaan belum memenuhi standar (1,5 ruang kelas);
 2. Jumlah koleksi buku masih kurang;
 3. Belum tersedianya ruang baca yang memadai;
 4. Belum adanya fasilitas pendukung perpustakaan yang memadai;
 5. Kurangnya tenaga pustakawan menyebabkan pengelolaan perpustakaan belum profesional;
 6. Standar pembangunan ruang perpustakaan pada saat pembangunan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) berbeda dengan standar yang ditetapkan sekarang pada Standar Sarana Prasarana oleh BSNP Kemendikbud.
 - b. Jamban (WC) Sekolah :
 - Ukuran Jamban (WC) masih banyak yang belum memenuhi standar (Luas minimum 1 unit jamban 2 m²);
 - Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru.
2. Belum memenuhinya standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - a. Belum merata dan masih kurangnya pendidik/Guru PNS pada jenjang SD maupun SMP, jumlah Pendidik/Guru PNS SD yang dibutuhkan berdasarkan kurikulum dan jam minimal untuk mendapatkan sertifikasi adalah Guru Kelas sejumlah 396 Guru, Guru Pendidikan Agama Islam : 66 Guru dan Guru Olah Raga : 66 Guru, sedangkan sampai saat ini jumlah Pendidik/Guru yang tersedia adalah Guru Kelas sebanyak 282 Guru, Guru Pendidikan Agama Islam : 38 Guru dan Guru Olah Raga : 40 Guru. Berdasarkan data tersebut Kota Magelang masih kekurangan Pendidik/Guru Kelas sebanyak 114 Guru, Guru Pendidikan Agama Islam : 28 Guru dan Guru Olah Raga : 26 Guru.
Sedangkan untuk Pendidik/Guru PNS SMP saat ini yang dibutuhkan berdasarkan kurikulum dan jam minimal untuk mendapatkan sertifikasi adalah 446 pendidik/guru, jumlah guru yang ada saat ini sebanyak 413 pendidik/guru sehingga masih membutuhkan pendidik/guru sebanyak 33 guru.
 - b. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan.
3. Keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.;
4. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
5. Rendahnya insentif bagi pendidik PAUD.
6. Belum meratanya kualifikasi, kompetensi dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan, sebagian pendidik belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4, dan sebagian pendidik belum bersertifikat pendidik
7. Kurangnya tenaga guru kelas di jenjang sekolah dasar karena memasuki masa pensiun

8. Kurangnya sumber daya, kompetensi dan kualifikasi pustakawan dan laboran.
9. Kurang memadainya sarana prasarana dan tenaga pendidikan pada pendidikan non formal.
10. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan siswa.

Solusi untuk mengatasi permasalahan:

1. Secara bertahap akan melaksanakan rehab berat/ringan bangunan perpustakaan yang dianggarkan dari dana BOSDA pada kegiatan Penyelenggaraan SD/SMP Negeri;
2. Pengadaan koleksi buku perpustakaan yang dianggarkan dari dana BOSDA pada kegiatan Penyelenggaraan SD/SMP Negeri;
3. Melaksanakan rehab berat/sedang Jamban (WC) sekolah yang dianggarkan dari dana BOSDA pada kegiatan Penyelenggaraan SD/SMP Negeri;
4. Melaksanakan perekrutan secara mandiri/intern Pendidik/Guru Non PNS yang honorirumnya dianggarkan dari dana BOSDA pada kegiatan Penyelenggaraan SD/SMP Negeri;
5. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik serta peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan dasar pada sekolah umum baik pada sekolah negeri maupun swasta.
6. Menyediakan dan menyiapkan fasilitas sekolah sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi;
7. Diperlukan komitmen tinggi dan kerja keras melalui kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasinya.

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Non Formal;
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 25.688.184.274,00 dari anggaran sebesar Rp 33.645.376.000,00 atau 76,35% dari target. Realisasi keuangan sebesar 76,35% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 94,52%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Angka Harapan Hidup	76,58	76,71	76,58	99,83%	76,94
2	AKI/ 1.000 KH	0	126	192,43	47,28%	70
3	AKB/ 1.000 KH	10,66	14,5	12,19	115,93%	12,5
4	AKABA	0,1266	0,155	0,141	109,93%	0,135
5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,22	0,31	0,308	100,65%	0,31
6	Angka Kesakitan DBD	65,58	<50	49,66	100,68%	<50
7	Angka Prevalensi Kasus TB	119,85	<105	153,49	53,82%	<101
8	Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	0,02%	<0,05%	0,03%	140,00%	<0,05%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					95,90%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 8 indikator kinerja, adapun 5 indikator melampaui target, dan 3 indikator masih berada dibawah target yaitu indikator angka harapan hidup, angka kematian ibu, dan angka prevalensi kasus TB. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 95,90%.

Capaian Indikator Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok orang.

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Harapan Hidup sebesar 76,58%, lebih rendah 0,13 poin dari yang ditargetkan sebesar 76,71% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,83% artinya target belum tercapai.

Realisasi kinerja Angka Harapan Hidup Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 76,58% kondisinya masih sama atau tidak terjadi peningkatan maupun penurunan.

Dalam mencapai indikator Angka Harapan Hidup, terdapat beberapa program pendukung, diantaranya:

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan alokasi anggaran Rp 8.080.000,00 dan realisasi anggaran Rp 7.169.000,00. Dengan dilaksanakannya program ini, pelayanan kesehatan khusus bagi penduduk miskin dapat termonitor dan terevaluasi.

2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran Rp 974.260.000,00 dan realisasi anggaran Rp 889.565.579,00. Program ini penting dilaksanakan mengingat Kota Magelang terletak di lokasi yang strategis sehingga mudah sekali mendapatkan pengaruh dari luar termasuk penularan penyakit menular.
3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan alokasi anggaran Rp 21.028.590.000,00 dan realisasi anggaran Rp 17.403.608.572,00.
4. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan dengan alokasi anggaran Rp 45.091.000,00 dan realisasi anggaran Rp 44.143.000,00. Program ini mencakup pemeriksaan makanan di restoran dan industri rumah tangga sehingga makanan hasil produksi yang beredar tidak membahayakan bagi kesehatan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dengan alokasi anggaran Rp 40.001.000,00 dan realisasi anggaran Rp 38.936.850,00. Program ini mencakup penyuluhan kesehatan bagi lansia dan kader kesehatan lansia guna meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan lansia, termasuk penyakit tidak menular dan degeneratif (jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, dan lain-lain) yang sekarang menjadi penyebab utama kematian di dunia.
6. Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan alokasi anggaran Rp 103.861.000,00 dan realisasi anggaran Rp 96.582.955,00. Program ini mencakup pemeriksaan sampel makanan jajanan anak sekolah dan jajanan menjelang hari raya serta pembinaan apotek dan industri rumah tangga.
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 50.015.000,00 dan realisasi anggaran Rp 50.014.500,00. Program ini mencakup pertemuan koordinasi tingkat kelurahan dan tingkat kota guna membahas program pencegahan penyakit menular yang berkembang di masyarakat.

Capaian Indikator AKI/ 1.000 KH

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, bukan karena sebab – sebab lain seperti kecelakaan atau kasus insidental. Angka Kematian Ibu (AKI)/*Maternal Mortality Rate (MMR)* yaitu jumlah kematian ibu maternal/wanita yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu per 100.000 Kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKI. AKI mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri.

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Kematian Ibu sebesar 192,43, lebih tinggi 66,43 poin dari yang ditargetkan sebesar 126 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 65,48% artinya target belum tercapai.

Realisasi kinerja Angka Kematian Ibu Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0, **meningkat** sebesar 192,43 poin namun demikian peningkatan ini bermakna negatif.

Di tahun 2017 jumlah kelahiran hidup di Kota Magelang sebanyak 1.559 jiwa. Ada 3 kasus kematian ibu pada tahun 2017, sehingga didapat Angka Kematian Ibu 192,43 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu ini jauh mengalami peningkatan dibanding tahun 2016, dimana pada tahun 2016 tidak ada kasus kematian ibu yang terjadi di Kota Magelang.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKI < 70 per 100.000 KH** adapun di Kota Magelang **0 per 100.000KH** artinya target SDG's **belum tercapai**.

Program pendukung indikator ini adalah:

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan alokasi anggaran Rp 736.499.000,00 dan realisasi anggaran Rp 321.882.390,00.

Program ini mencakup:

Penyuluhan pada ibu hamil; rapat pembahasan kematian ibu dengan tokoh masyarakat setempat serta kader kesehatan; penyuluhan pada dukun bayi agar tidak menolong persalinan; audit maternal perinatal bagi tenaga kesehatan agar meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam menangani komplikasi kebidanan; dan kegiatan jaminan persalinan yang digunakan untuk mewujudkan akses dan layanan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas terhadap fasilitas layanan kesehatan.

Capaian Indikator AKB/ 1.000 KH

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0 – 11 bulan (termasuk neonatal). Angka Kematian Bayi (AKB)/*Infant Mortality Rate (IMR)* adalah jumlah kematian bayi (anak usia 0 - 11 bulan) di wilayah pada kurun waktu tertentu per 1.000 Kelahiran Hidup (KH) di wilayah dan pada kurun waktu yang sama. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Tahun 2017 terdapat kematian bayi sebanyak 19 kasus, 10 laki-laki dan 9 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2017 sebanyak 1.559 jiwa sehingga diperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 12,19 per 1.000 kelahiran hidup.

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Kematian Bayi sebesar 12,19/1000KH lebih rendah 1,96 poin dari yang ditargetkan sebesar 14,5/1000KH dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118,95% artinya telah melampaui target.

Realisasi kinerja Angka Kematian Bayi Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 10,66/1000KH dengan jumlah kematian bayi 16 orang, **meningkat** sebesar 1,53 poin namun demikian bermakna negatif.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKB < 12 per 1.000 KH**, adapun di Kota Magelang **12,19 per 1.000 KH** artinya target SDG's belum dapat dicapai.

Program utama yang mendukung tercapainya indikator Angka Kematian Bayi (AKB) adalah Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp 736.499.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 321.882.390,00. Meskipun begitu program-program kesehatan yang lain juga secara tidak langsung mendukung penurunan AKB ini.

Capaian Indikator AKABA

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak balita (usia 12-59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan KIA/Posyandu, tingkat keberhasilan program KIA/Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

Di tahun 2017 terdapat kematian balita sebanyak 22 kasus, 12 laki-laki dan 10 perempuan. Jumlah kelahiran hidup tahun 2017 sebanyak 1.559 jiwa sehingga diperoleh Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 14,11 per 1.000 kelahiran hidup. AKABA tahun ini meningkat dibanding tahun 2016 yang hanya sebesar 12,66 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian balita sebanyak 19 kasus. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar 15,5 per 1.000 kelahiran hidup, capaian kinerja indikator Angka Kematian Balita sangat baik yaitu 109,93%.

Realisasi kinerja untuk indikator Angka Kematian Balita (AKABA) sebesar 14,11/1000KH lebih rendah 1,4 poin dari yang ditargetkan sebesar 15,5/1000KH dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,93% artinya telah melampaui target.

Realisasi kinerja Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 12,66/1000KH dengan jumlah kematian balita 19 kasus, **meningkat** sebesar 1,45 poin namun demikian bermakna negatif.

Mengacu target SDG's 2016-2030 **AKABA < 25 per 1.000 KH** adapun di Kota Magelang **12,66 per 1.000 KH** artinya target SDG's telah dapat dicapai.

Program utama yang mendukung tercapainya indikator Angka Kematian Balita (AKABA) adalah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.933.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 112.889.500,00.

Program ini mencakup pendidikan dan pelatihan perawatan anak balita serta pengadaan sarana prasarana ruang laktasi yang sangat mendukung ibu menyusui dalam memberikan ASI secara eksklusif pada bayinya.

Capaian Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Prevalensi Gizi Buruk adalah persentase balita penderita gizi buruk pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah balita yang ditimbang. Jumlah balita gizi buruk di Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 20 anak dan jumlah balita ditimbang sebesar 6.486 anak sehingga diperoleh angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,308%.

Jumlah balita gizi buruk di Kota Magelang pada tahun 2016 sebanyak 15 anak dan jumlah balita ditimbang sebesar 6.781 anak sehingga diperoleh angka prevalensi gizi buruk sebesar 0,22%. Adapun untuk kondisi tahun 2015 jumlah penderita gizi buruk sebanyak 17 anak dengan prevalensi gizi buruk sebesar 0,31%.

Realisasi kinerja untuk indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,308 lebih rendah 0,002 poin dari yang ditargetkan sebesar 0,31 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,65% artinya telah melampaui target.

Realisasi kinerja Prevalensi Balita Gizi Buruk Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,22, **naik** sebesar 0,088 poin hal ini karena ditemukannya kasus balita gizi buruk di tahun 2017 sejumlah 20 anak lebih banyak daripada tahun 2016 sebesar 15 anak.

Program utama pendukung indikator prevalensi gizi buruk adalah:

1. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 179.398.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 148.486.600,00 serta
2. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dengan alokasi anggaran sebesar Rp 119.933.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 112.889.500,00.

Melalui program tersebut, setiap balita gizi buruk dan gizi kurang memperoleh makanan tambahan dan vitamin secara rutin.

Capaian Indikator Angka Kesakitan DBD

Demam Berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Seseorang disebut penderita DBD jika memenuhi sekurang-kurangnya 2 kriteria klinis dan 2 kriteria laboratorium. Kriteria klinis yaitu panas mendadak 2 – 7 hari tanpa sebab yang jelas, tanda-tanda perdarahan (sekurang – kurangnya uji Torniquet positif), pembesaran hati, serta syok. Kriteria laboratorium yaitu trombositopenia (trombosit \leq 100.000/ μ l) dan hematokrit naik $>$ 20%.

Angka Kesakitan DBD adalah jumlah penderita DBD (Demam Berdarah Dengue) per 100.000 penduduk dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah penderita DBD di tahun 2017 sebanyak 66 penderita dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil sebesar 132.911 jiwa sehingga diperoleh Angka Kesakitan DBD sebesar 49,66.

Kondisi tahun 2016 jumlah penderita DBD sebanyak 87 penderita dengan jumlah penduduk berdasarkan data Disdukcapil sebesar 132.662 jiwa sehingga diperoleh Angka Kesakitan DBD sebesar 65,58. Angka Kesakitan DBD tahun 2016 jauh menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 130,93.

Realisasi kinerja indikator Angka Kesakitan DBD tahun 2017 jauh menurun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 65,58. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar $<$ 50, capaian kinerja untuk indikator Angka Kesakitan DBD tahun 2017 sebesar 100,68% artinya target sudah tercapai.

Program utama pendukung tercapainya indikator Angka Kesakitan DBD adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp 974.260.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 889.565.579,00.

Capaian Indikator Angka Prevalensi Kasus TB

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Bakteri penyebab penyakit tuberkulosis paru mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam, oleh karena itu disebut juga sebagai Basil Tahan Asam (BTA).

Angka prevalensi kasus TB (Tuberculosis) adalah jumlah pasien TB yang ditemukan dan diobati per 100.000 penduduk dalam satu tahun. Jumlah penderita TB di Kota Magelang tahun 2017 adalah sebanyak 204 penderita dengan jumlah penduduk menurut Disdukcapil sebesar 132.911 sehingga diperoleh Angka Prevalensi Kasus TB sebesar 153,49. Angka prevalensi kasus TB di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 119,85. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar $<$ 105, capaian kinerja untuk indikator Angka Prevalensi Kasus TB adalah sebesar 68,41% artinya target belum tercapai.

Program utama pendukung pencapaian indikator Angka Prevalensi Kasus TB adalah Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dengan alokasi anggaran sebesar Rp 974.260.000,00 dan realisasi anggaran Rp 889.565.579,00.

Capaian Indikator Angka Prevalensi HIV AIDS pada Penduduk Usia 15-49 Tahun

HIV/AIDS disebabkan oleh infeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. *Human Immunodeficiency Virus* seseorang yang hasil pemeriksaannya HIV positif dengan pemeriksaan 3 test. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* dewasa bila terdapat 2 gejala mayor dan 1 gejala minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya. Kasus pada anak bila terdapat paling sedikit 2 gejala mayor dan minor dan tidak ada sebab-sebab immunosupresi yang diketahui seperti kanker, malnutrisi berat atau etiologi lainnya.

Angka Prevalensi HIV AIDS adalah persentase jumlah penderita baru HIV AIDS usia 15-49 tahun yang ditemukan selama satu tahun dibandingkan jumlah populasi kunci dalam wilayah dan kurun waktu yang sama. Jumlah penderita baru HIV AIDS di Kota Magelang di tahun 2017 adalah sebanyak 18 penderita dengan jumlah penduduk usia 15-49 tahun menurut data Disdukcapil sebesar 70.687 jiwa sehingga diperoleh Angka Prevalensi HIV AIDS sebesar 0,03%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 0.02%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang sebesar <0,05% diperoleh capaian kinerja untuk indikator Angka Prevalensi HIV AIDS sebesar 166,67%.

Program utama pendukung pencapaian indikator Angka Prevalensi HIV AIDS adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dengan alokasi anggaran Rp 974.260.000,00 dan realisasi anggaran Rp 889.565.579,00. Kegiatan pemeriksaan VCT rutin dilakukan guna menemukan kasus HIV AIDS agar cepat tertangani. WPA (Warga Peduli AIDS) juga telah terbentuk sehingga peran serta masyarakat dalam penanggulangan HIV AIDS semakin terlihat.

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD;
4. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
7. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
9. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;
12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
13. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
14. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

15. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan;
16. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
17. Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan yaitu:

1. Angka kematian Ibu (AKI) di Kota Magelang masih tinggi bila dihitung per 100.000 kelahiran Hidup, pada Tahun 2017 ada 3 kasus kematian ibu sedangkan jumlah kelahiran hidup ada 1.559.
2. Angka Kematian bayi (AKB) juga masih tinggi apabila dihitung per 1.000 Kelahiran Hidup. Pada Tahun 2017 terdapat 19 kasus kematian bayi, maka apabila dihitung AKB nya diperoleh angka 12,18. Meskipun angka ini masih dibawah target tahun 2017 sebesar 14,5 akan tetapi dengan adanya 19 kasus kematian bayi tersebut tetap menjadi perhatian.
3. Angka balita pendek dan sangat pendek di Kota Magelang masih cukup tinggi berdasarkan hasil survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di Kota Magelang yang mencakup 326 responden yang diambil secara acak, didapatkan balita sangat pendek (TB/U < -3SD) = 3,99% dan balita pendek (TB/U = -2SD) = 13,8%
4. Banyak TUPM yang tidak memiliki sertifikat Laik Sehat
5. Masih banyak warga yang belum akses ke jamban Sehat (berseptic tank)
6. Dari hasil survei PHBS, hasil penilaian indicator ke-2 yaitu tidak merokok dalam rumah masih rendah (49%)
7. Desa/Kelurahan Siaga Aktif dengan Strategis mandiri, baru di 7 kelurahan
8. Masih rendahnya penemuan penderita TB, dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berobat atau memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
9. Data penyakit jiwa dan penyakit tidak menular belum tertangani khususnya penyakit tidak menular di rumah sakit, puskesmas dan dokter praktek swasta.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 202.909.010.374,00 dari anggaran sebesar Rp 231.515.948.000,00 atau 87,64% dari target. Realisasi keuangan sebesar 89,61% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,66%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

K O T A

Magelang

3. Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan
Bagi Perekonomian Daerah

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	14,59%	16,15%	15,95%	98,82%	17,11
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					98,82%	

*Hasil Pengukuran Menggunakan Angka Prediksi, karena Data PDRB 2017 Belum dirilis

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi kinerja indikator masih berada di bawah target. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 98,82%.

Capaian Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah

PDRB merupakan salah satu indikator untuk memotret kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. Dalam perhitungan PDRB Kota Magelang, sektor perdagangan tidak berdiri sendiri namun membentuk sektor lapangan usaha bersama reparasi mobil dan sepeda motor. Sehingga sektor perdagangan mewakili perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

Realisasi kinerja untuk indikator kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian daerah sebesar 15,95 lebih rendah 0,2 poin dari yang ditargetkan sebesar 16,15 dengan capaian kinerja sebesar 98,85% artinya target belum dapat tercapai.

Realisasi kinerja kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian daerah Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 14,59 **meningkat** sebesar **1,36** poin.

PDRB ADHK Kota Magelang pada periode 2012-2016 terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan standar hidup (standard of living) Kota Magelang dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Atau dengan kata lain, Kota Magelang mampu meningkatkan kuantitas atau tingkat produksi barang dan jasa dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Secara rata-rata, besarnya PDRB ADHK per tahun Kota Magelang pada periode tersebut adalah Rp. 4.999.500.000.000,00.

PDRB Kota Magelang dapat dianalisis berdasarkan pada lapangan usaha dan pengeluaran. Berdasarkan lapangan usaha, Kota Magelang diketahui memiliki sektor andalan (lapangan usaha di Kota Magelang yang pada saat ini mendominasi dan di masa mendatang mendominasi struktur perekonomian Kota Magelang jika dibandingkan dengan lapangan usaha-lapangan usaha yang lainnya di Kota Magelang) dan sektor unggulan (lapangan usaha di Kota Magelang yang saat ini menang bersaing dan di masa mendatang menang bersaing dengan lapangan usaha yang sama di tingkat Jawa Tengah).

Berdasarkan pada perkembangan lapangan usaha di Kota Magelang untuk periode 2012-2016, maka dapat diketahui sektor andalan Kota Magelang. Sektor andalan Kota Magelang tersebut terdiri dari 4 (empat) lapangan usaha, yakni: Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa Pendidikan. Keempat lapangan usaha tersebut memiliki pangsa pasar dan laju pertumbuhan yang rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan dengan lapangan usaha-lapangan usaha yang lainnya di Kota Magelang. Dilihat dari laju pertumbuhannya, maka lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bukan merupakan sektor unggulan maupun sektor andalan. Namun, sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.

Tabel 3.5
Produk Domestik Regional Bruto Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	98,18	100,98	102,77	104,78	106,74
B Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Industri Pengolahan	660,62	706,98	753,43	793,62	826,94
D Pengadaan Listrik dan Gas	15,91	17,81	18,45	18,67	19,09
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,31	7,35	7,55	7,69	7,87
F Konstruksi	791,37	818,38	835,30	870,08	907,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	730,83	767,95	791,81	817,88	843,54
H Transportasi dan Pergudangan	312,54	344,42	373,23	399,52	418,76
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,10	263,89	281,21	299,61	317,74
J Informasi dan Komunikasi	234,77	255,63	297,58	321,94	346,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	214,43	224,12	235,15	250,15	273,80
L Real Estat	154,35	167,09	175,30	185,86	196,52
M,N Jasa Perusahaan	14,21	15,21	16,43	17,87	19,45
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546,94	561,49	558,63	581,97	615,02
P Jasa Pendidikan	251,44	290,30	314,70	335,89	360,18

Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,68	113,91	125,98	134,19	144,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	90,59	99,59	104,62	107,64	114,11
Produk Domestik Regional Bruto		4.484,27	4.755,09	4.992,11	5.247,34	5.518,68
PDRB Per Kapita (juta rupiah)		37,55	39,67	41,45	43,44	45,57

Tabel 3.6
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (Persen)

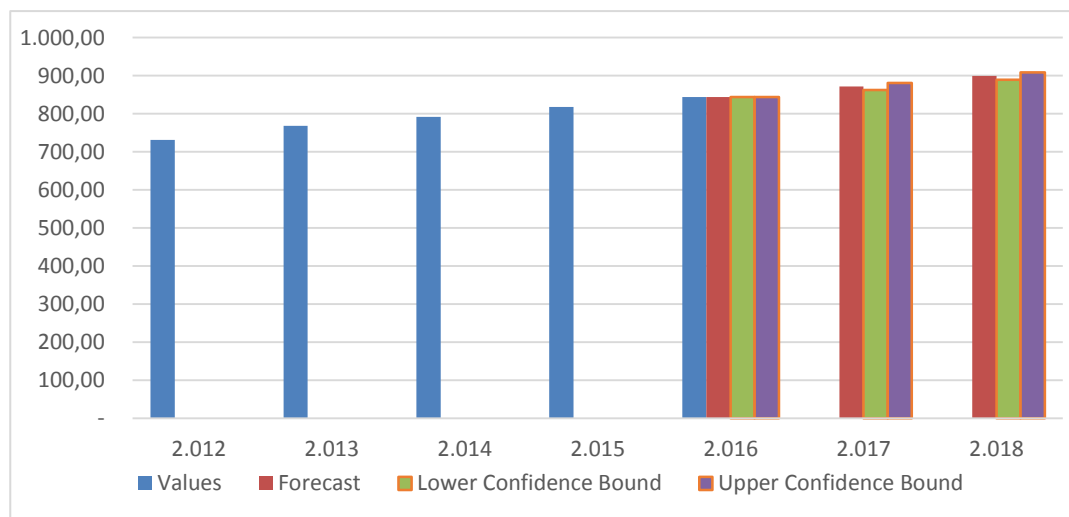
Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,14	2,17	2,08	2,04	1,94
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	15,28	15,21	15,76	16,11	16,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,32	0,31	0,29	0,28	0,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,13	0,13
F	Konstruksi	17,57	17,14	17,02	16,89	16,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78	15,55	14,86	14,55	14,34
H	Transportasi dan Pergudangan	6,43	6,57	6,82	6,94	6,73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,62	5,65	5,74	5,86	6,03
J	Informasi dan Komunikasi	4,76	4,64	4,81	4,77	4,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,99	4,95	4,92	4,99	5,22
L	Real Estat	3,23	3,23	3,23	3,24	3,21
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,32	0,32	0,34	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,56	12,32	11,87	11,75	12,01
P	Jasa Pendidikan	6,36	7,23	7,43	7,39	7,54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,56	2,58	2,70	2,75	2,79
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,93	2,00	2,02	1,97	2,00
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Magelang sampai akhir periode RPJMD diperkirakan menunjukkan tren yang positif bahkan di tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai 4,41 persen. Sejalan dengan program Pemerintah Kota Magelang untuk menjadikan Kota Magelang menjadi kota jasa nampaknya hal itu diprediksi benar terwujud. Namun demikian pertumbuhan tersebut diperkirakan sifatnya tidak dinamis sehingga masih diperlukan tindakan

nyata dari Pemerintah Kota Magelang untuk mengembangkan lapangan usaha ini. Kontribusi lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diprediksi tidaklah kecil. Rata-rata kontribusi lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB harga konstan 2010 pada periode waktu 2016-2021 Kota Magelang diperkirakan sebesar 14,81 persen

Untuk memprediksi kontribusi PDRB sektor lapangan usaha perdagangan dapat dilakukan dengan metode forecasting dengan deviasi sebesar 0,05 sebagaimana grafik dibawah ini.

Gambar 3.3
Prediksi Kontribusi PDRB Sektor Lapangan Usahan Perdagangan



Dengan menggunakan data prediksi tahun 2017 sebagaimana grafik diatas (data riil dirilis BPS pada Triwulan III Tahun 2018), realisasi indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB pada tahun 2017 adalah sebesar = $880,71 \div 5.518,68 \times 100 \% = 15,95 \%$ dari target sebesar 16,15 % dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 98,82 %. Dengan menggunakan angka prediksi, pada tahun kedua periode RPJMD indikator ini belum mencapai targetnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Magelang perlu mendorong sektor perdagangan secara lebih aktif agar target pencapaian indikator ini dapat tercapai pada akhir periode RPJMD. Melihat geliat aktivitas perdagangan di Kota Magelang yang terjadi saat ini yang didukung dengan pusat perdagangan baru seperti pusat-pusat kuliner, maka target pencapaian target RPJMD memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat dicapai.

Adapun permasalahan yang dihadapi, adalah :

1. Data perhitungan PDRB tidak bersifat real time, sehingga pengukuran kinerja tidak dapat dilakukan dengan segera;
2. Kontribusi PDRB sektor perdagangan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor dan sektor.

Upaya yang dilakukan atas permasalahan yang dihadapi :

1. Untuk memberikan gambaran awal digunakan data prediksi;
2. Perlunya koordinasi dan kerjasama yang solid antar sektor untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor perdagangan.

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif;
2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM;
5. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;
6. Program Pengelolaan Pasar;
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
8. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
9. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
11. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 8.836.650.000,00 dari anggaran sebesar Rp 9.750.560.000,00 atau 90,63% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,63% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98,82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	49,96	62	62,54	100,87%	68,5
1	Indeks Pencemaran Air	36,25	75,65	46,47	61,43%	76,84
2	Indeks Pencemaran Udara	58,24	61,8	85,67	138,62%	79,1
3	Indeks Tutupan Vegetasi	54,03	48,55	57,24	117,90%	49,56
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					104,71%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 4 indikator, adapun realisasi kinerja 3 indikator melampaui target dan 1 indikator masih berada di bawah target yaitu Indeks Pencemaran Air. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 104,71%.

Capaian Indikator Indeks Pencemaran Air

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah :

Formula penghitungan indeks pencemaran adalah :

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Keterangan :

Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j)

Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j)

PIj = (C1/L1j, C2/L2j,...,Ci/Lij)

(Ci/Lij)_M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij

(Ci/Lij)_R adalah nilai rata-rata dari Ci/Li

Dari penghitungan Indeks Pencemaran Air untuk indikator IPA (Indeks Pencemaran Air) dengan capaian kinerja sekitar 61,4 % dimana realisasi baru 46,47 dibanding target 2017 sebesar 75,7 sangat jauh dari angka yang diharapkan dengan **kategori Rendah meningkat** apabila dibandingkan capaian kinerja pada **tahun 2016** yang sebesar 36,25 dengan **kategori sangat rendah** dengan peningkatan sebesar **10,27**. Akan tetapi Air sungai yang melewati Kota Magelang dengan memiliki angka indeks **46,471 berarti** berada dalam kondisi **Waspada**

Peningkatan jumlah kegiatan usaha, baik sektor industri, jasa, kesehatan, dan perdagangan di Kota Magelang akan menambah jumlah beban pencemar yang masuk ke sungai. Kualitas air cenderung menurun karena meningkatnya limbah rumah tangga maupun dari kegiatan lainnya. Sehingga perlu adanya upaya pengendalian pencemaran sungai agar indeks kualitas air dapat dipertahankan atau bahkan meningkat.

Kota Magelang dibatasi juga oleh dua sungai yang cukup besar yaitu Sungai Elo di sebelah Timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Sementara itu didalam kota sendiri dilalui oleh 2 saluran yaitu Kali Manggis dan Kali Bening yang membelah Kota Magelang dari utara ke selatan yang merupakan kesatuan wilayah irigasi Saluran Progo-Manggis-Kali Bening dengan luas 3.663 Ha.

Air sungai yang diambil sampelnya ini merupakan sungai yang menjadi kewenangan Propinsi Jawa Tengah, seperti Sungai Progo dan Sungai Elo. Sungai Progo memiliki daerah aliran seluas 2380 km² dengan panjang sungai 140 km. Sungai Progo melintas dari bagian tengah Jawa Tengah yang berhulu di Gunung Sindoro (dekat Kabupaten Temanggung) dan melewati Propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sumber air Sungai Progo selain dari hulu utama yaitu Gunung Sindoro juga bersumber dari Gunung Merapi, Gunung Menoreh, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing. Sementara Sungai Elo merupakan salah satu Sub DAS dari Sungai Progo.

Kali Bening adalah nama sebuah saluran irigasi peninggalan Belanda yang membelah Kota Magelang. Sungai ini digunakan untuk mengairi irigasi persawahan di pinggiran Kota Magelang. Kali Bening berawal dari sebuah dusun di Kabupaten Magelang bernama Dusun Kali Bening.

Kali Manggis merupakan saluran air yang terbuat dari beton berbentuk kotak yang membelah Kota Magelang mulai dari Kelurahan Kedungsari hingga berakhir di Gunung Tidar. Saluran air ini melewati tiga daerah yaitu Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran tersebut memanjang dari Temanggung hingga Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sumber air dari saluran tersebut diambilkan dari Sungai Progo di Dusun Kuncen Desa Badran Kecamatan Kranggan Temanggung.

Pencemaran yang terjadi pada sungai-sungai di Kota Magelang tidak lepas dari segala kegiatan yang berlangsung di sepanjang daerah aliran sungai (mulai dari hulu hingga ke hilir sungai) baik kegiatan rumah tangga, kesehatan, industri, jasa maupun perdagangan. Karena Kota Magelang merupakan daerah yang dilewati oleh aliran Sungai Progo dan Sungai Elo, serta dua saluran air yaitu Kali Manggis dan Kali Bening, maka kualitas air sungai juga dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di daerah aliran sungai bagian hulu atau di luar Kota Magelang. Sehingga diperlukan kebijakan lintas wilayah dan kebijakan dari pihak yang berwenang atas sungai tersebut bersama Pemerintah Kota Magelang dalam menanggulangi pencemaran sungai.

Tingginya parameter coli dan total coliform pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik / limbah tinja masyarakat (mandi, cuci, kakus). Selain program pemerintah daerah terkait dalam rangka upaya pencegahan pencemaran air, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah maupun limbahnya langsung ke sungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Indeks Pencemaran Air, naik dari tahun sebelumnya tapi tidak mencapai target di tahun 2017 ini dikarenakan :

- 1) Kondisi debit air sungai yang tidak tetap dalam setiap pengambilan sampel
- 2) Pada musim kemarau volume air di sungai sedikit/mengering sehingga menaikkan kadar parameter coli dan total coliform yang merupakan salah satu parameter perhitungan.
- 3) Perubahan (penurunan atau peningkatan) daya tampung beban pencemaran sungai karena peningkatan atau penurunan debit air sungai.
- 4) Limbah domestik dari kegiatan masyarakat di sepanjang aliran sungai ada yang langsung dibuang ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu.
- 5) Kesalahan prosedur pengambilan dan analisa pengujian sampel air.

K O T A

Magelang

Capaian Indikator Indeks Pencemaran Udara

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

Indeks Pencemaran Udara dihitung dengan rumus, $IPU = IP_{NO_2} + IP_{SO_2}$

Udara di Kota Magelang dipantau oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui 4 titik, yang mewakili daerah :

1. Transportasi (Jl. Pahlawan)
2. Industri / agro industri (industri tahu Tidar)
3. Pemukiman (pemukiman di Kelurahan Magersari)
4. Perkantoran / komersial (komplek perkantoran Pemkot Magelang)

Pengukuran kualitas udara tersebut dilakukan di dua semester pada tahun 2017 ini dengan mempertimbangkan lokasi pengambilan sampel. Pengukuran kualitas udara menggunakan metode passive sampler dan dilakukan di beberapa titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang berbeda-beda, karena setiap kepadatan lalu lintas yang berbeda akan memberikan sumbangan emisi gas yang berbeda pula baik jenis maupun kadarnya. Berikut adalah perhitungan indeks pencemaran udara.

Tabel 3.8.
Perhitungan Rerata Konsentrasi NO_2 dan SO_2

No.	Lokasi	NO_2 ($\mu g/m^3$)	SO_2 ($\mu g/m^3$)
Semester 1			
1	Transportasi	7.85	13.75
2	Industri / agro industri	2.6	15.42
3	Pemukiman	12.35	2.57
4	Perkantoran/Komersial	7.26	10.47
Semester 2			
5	Transportasi	6.16	20.7
6	Industri / agro industri	2.16	10.9
7	Pemukiman	12.6	2.57
8	Perkantoran/Komersial	6.9	9.11
Jumlah		57.88	85.49
Rata-Rata		7.235	10.686

Sumber : Hasil Perhitungan, 2017

Tabel 3.9
Perhitungan Indeks Pencemaran Udara

Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemar	Indeks	Indeks
		EU	Parameter IEU	Pencemaran Udara IEU'	Pencemaran Udara
NO_2	7.235	40.00	0.1809	0.35759	85.67
SO_2	10.686	20.00	0.5343		

Sumber : Hasil Perhitungan, 2017

Keterangan : Kategori nilai indeks

Unggul :			x	>	90
Sangat Baik :	82	<	x	≤	90
Baik :	74	<	x	≤	82
Cukup :	66	≤	x	≤	74
Kurang :	58	≤	x	<	66
Sangat Kurang :	50	≤	x	<	58
Waspada :			x	<	50

Dari penghitungan Indeks Pencemaran Udara, untuk indikator IPU (Indeks Pencemaran Udara) dengan capaian kinerja sekitar 138,6% dimana realisasi 85,67 dibanding target tahun 2017 sebesar 61. Sehingga Udara Kota Magelang memiliki angka indeks **85,67** dan menurut kategori dalam tabel diatas bisa dikatakan dalam kondisi **Sangat Baik**.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup melalui kegiatan pemantauan kualitas udara. Pemantauan kualitas udara dilakukan dua kali dalam satu tahun secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mewakili dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara di kota/kabupaten di seluruh Indonesia, termasuk Kota Magelang. Perhitungan indeks pencemaran udara tahun 2017 ini menggunakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena menggunakan metode passive sampler, dimana pengukuran dilakukan selama 24 jam. Titik pemantauan dilakukan pada titik-titik yang mewakili daerah transportasi, permukiman, industri / agro industri, dan perkantoran / komersial.

Salah satu parameter yang mempengaruhi naiknya IKLH Kota Magelang tahun 2017 adalah indeks pencemaran udara. Pada tahun 2016 lalu dilakukan pengambilan sampel udara ambient di 30 titik sampel dengan metode pengujian sampel menggunakan impinger, dimana pengukuran udara ambient dilakukan selama 1 jam. Namun ke-30 titik sampel ini hanya mewakili daerah transportasi saja. Sementara di tahun 2017 perhitungan kualitas udara menggunakan data pengujian sampel dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengambil 4 titik sampel namun sudah mewakili berbagai sektor yaitu transportasi, permukiman, industri / agro industri, dan perkantoran / komersial. Pengukuran udara ambient dilakukan selama 24 jam menggunakan metode pengujian sampel passive sampler, dimana metode ini memiliki banyak kelebihan dibanding dengan metode lain, antara lain alat-alat yang mudah dibawa dan mempunyai tingkat mobilitas yang tinggi serta dapat digunakan untuk menganalisa udara pada kondisi cuaca yang berbeda (Susanto, Prayitno Joko, 2000).

Selama ini hasil pengukuran udara ambient rutin dilakukan setiap tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih memenuhi baku mutu udara ambient Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 8 Tahun 2001. Namun demikian belum ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan kualitas udara tersebut baik berupa program

maupun kegiatan selain kegiatan revitalisasi penghijauan dan penataan taman kota yang telah rutin setiap tahun dilakukan.

Dari sektor transportasi dimana jumlah kendaraan di Kota Magelang maupun yang melewati Kota Magelang semakin meningkat sehingga mempengaruhi kualitas udara karena emisi gas buang kendaraan turut menyumbang polusi udara di Kota Magelang. Diperlukan upaya pengendalian pencemaran udara agar indeks kualitas udara ini dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Selain Dinas Lingkungan Hidup sebagai Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan **Lingkungan Hidup**, upaya pengendalian pencemaran juga telah dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Perhubungan Kota Magelang, antara lain dengan kegiatan *car free day* yang dilaksanakan setiap hari minggu pagi di Lapangan Rindam IV Diponegoro. Namun kegiatan ini dirasa kurang maksimal dalam mengurangi pencemaran udara karena kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, dimana volume kendaraan tidak sepadat hari-hari biasanya. Selain program *car free day*, Dinas Perhubungan juga mengadakan program pengujian kendaraan bermotor dan uji berkala yang salah satu tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Setiap menjelang hari raya, Dinas Perhubungan melakukan pengujian kendaraan di Terminal Tidar untuk mengetahui kelayakan jalan kendaraan mudik dan juga untuk mengetahui emisi yang dihasilkan dari kendaraan transportasi. Kegiatan ini perlu ditingkatkan lagi karena saat ini baru kendaraan umum yang menjadi sasaran kegiatan pengujian kendaraan dan uji berkala. Dimana jumlah kendaraan bermotor pribadi jumlahnya semakin meningkat, baik kendaraan tahun produksi lama maupun kendaraan tahun produksi baru. Tindak lanjut dari kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan uji berkala ini juga belum ada, seperti pembatasan usia kendaraan, pembatasan kepemilikan jumlah kendaraan tiap rumah, memperbaharui kendaraan umum di Kota Magelang sehingga secara jumlah mencukupi dan nyaman untuk digunakan, serta menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi.

Capaian Indikator Indeks Tutupan Vegetasi

Definisi operasional yang digunakan untuk mengukur indikator ini adalah:

Perhitungan IKLH dilakukan sejak tahun 2009. Namun hingga saat ini telah mengalami beberapa kali penyesuaian. Perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Indeks Tutupan Hutan/Lahan semula dihitung menggunakan data luas hutan primer, luas hutan sekunder dan luas hutan menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan, tetapi sejak tahun 2012 perhitungan berubah menggunakan data luas hutan dibagi luas wilayah administrasi yang dikonversi ke dalam rumus yang tersedia.

Kemudian berdasarkan rumusan rancangan pedoman penghitungan indeks tutupan vegetasi yang telah dibahas pada rapat pembahasan di Semarang pada 5 Desember 2017, bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki kawasan hutan akan memasukkan data ruang terbuka hijau kecuali rumput dalam penghitungan indeks tutupan vegetasi.

Tahapan menghitung indeks tutupan vegetasi adalah sebagai berikut :

a. Menghitung luasan tutupan vegetasi.

Luasan tutupan vegetasi suatu wilayah dihitung dari penjumlahan data kawasan hutan + data luasan vegetasi hasil penghitungan/pengukuran di lapangan.

$$LTV = \text{data kawasan hutan} + \text{data luasan vegetasi hasil penghitungan}$$

b. Menghitung indeks tutupan vegetasi

Untuk menghitung indeks tutupan vegetasi dilakukan dengan perbandingan jumlah luas tutupan vegetasi dengan luas kabupaten / kota.

$$ITV' = \frac{LTV}{LWK}$$

Dimana :

ITV' = prosentase tutupan vegetasi

LTV = luas tutupan vegetasi

LWK = luas wilayah kabupaten/kota

c. Melakukan konversi prosentase ITV' yang merupakan perbandingan luas tutupan hutan dengan luas wilayah kabupaten/kota menjadi ITV melalui persamaan sebagai berikut :

$$ITV = 100 - \left((84,3 - (ITV' \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$$

Perhitungan prosentase merupakan perbandingan luas tutupan vegetasi dibandingkan luas wilayah administrasinya. Angka persentase yang diwajibkan adalah 30 %, yaitu berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Sedangkan angka idealnya adalah 84,3 %, yaitu luas tutupan hutan Papua pada tahun 1982. Dalam konteks peng-indeks-an 30 % mendapat angka 50 sedangkan angka ideal maksimal, 100 adalah ketika 84,3 %.

Karena di Kota Magelang hanya ada satu hutan kota (Gunung Tidar), maka menghitung indeks tutupan vegetasi menggunakan data tutupan vegetasi yang dimiliki Kota Magelang. Tutupan vegetasi meliputi luasan lahan/ruang terbuka hijau di Kota Magelang baik publik maupun privat. Berikut adalah luas RTH publik yang ada di Kota Magelang.

Tabel 3.10
Rincian Luasan RTH Publik Kota Magelang

Rincian		Luas (Ha)
Taman kota	60 buah	8,94
Hutan kota	1 titik	67,12
TPU	1 buah	16
Jalur hijau		263.3916
Luas RTH Publik		355.4516

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2017

Tabel 3.11
Luasan Tutupan Vegetasi Kota Magelang

	Ha	km ²
RTH publik	355.4516	3.55452
RTH privat	346.0920	3.46092
Luas Tutupan Vegetasi	701.5436	7.01544

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2017

Tabel 3.12
Perhitungan Indeks Tutupan Vegetasi

Luas tutupan vegetasi (km)	Luas Wilayah Administrasi (km ²)	Persentase ITV'	ITV
7.015	18.53	0.379	57.237

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2017

Keterangan : Kategori nilai indeks

Unggul	:		x	>	90	
Sangat Baik	:	82	<	x	≤	90
Baik	:	74	<	x	≤	82
Cukup	:	66	≤	x	≤	74
Kurang	:	58	≤	x	<	66
Sangat Kurang	:	50	≤	x	<	58
Waspada	:		x	<	50	

Dari hasil perhitungan, tutupan vegetasi Kota Magelang memiliki angka indeks **57,237** yang diartikan berada dalam kondisi **sangat kurang**. Walaupun dari capaian kinerja indikator Tutupan vegetasi tercapai dengan capaian kinerja sebesar 133,34% dari target tahun 2017 sebesar 48,55 dan teralisasi sebesar 57,24.

Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar **62,54** dari target yang ditetapkan sebesar 62 artinya melampaui target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,8% dengan kategori **kinerja Sangat Tinggi, meningkat** apabila dibandingkan capaian kinerja pada **tahun 2016** yang sebesar **49,96** dengan **kategori Tinggi** dengan peningkatan sebesar **12,58**.

Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terutama Pemerintah Provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100,

mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Selain komparatif terhadap Kabupaten/Kota lainnya, angka indeks nasional dapat menjadi acuan, apabila angka indeks Kabupaten/Kota berada dibawahnya (lebih kecil) artinya ada dalam kategori upaya yang harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya (lebih besar) artinya ada dalam kategori pemeliharaan.

Dari perhitungan yang telah dilakukan, diketahui hasil sebagai berikut :

- Indeks pencemaran air = 46,471
- Indeks pencemaran udara = 85,689
- Indeks tutupan vegetasi = 57,237

Dari hasil masing-masing indeks tersebut diperoleh Indeks Kualitas Lingkungan Kota Magelang adalah **62,543** atau bisa dikatakan **Kurang**.

Indeks kualitas lingkungan hidup dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan adanya indeks kualitas lingkungan hidup Kota Magelang ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di masa depan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kondisi lingkungan hidup yang sebenarnya di Kota Magelang. Kondisi lingkungan hidup ini menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan tutupan vegetasi sebagai indikator. IKLH yang didapat ini bukan untuk mendapatkan peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan dari kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang.

Permasalahan lingkungan pada dasarnya terjadi akibat ketidakseimbangan antara organisme hidup dengan unsur-unsur tidak hidup dalam suatu lingkungan ekosistem. Sebagai bagian yang penting dalam kehidupan manusia, ekosistem lingkungan memiliki kadar kualitas tersendiri yang memungkinkan bagi manusia untuk terus hidup di dalamnya dengan kualitas hidup yang baik. Atas dasar hal tersebut, perlu adanya korelasi simbiosis mutualisme antara manusia dengan ekosistem lingkungan sekitarnya dimana akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia itu sendiri.

Faktanya, dewasa ini lingkungan mengalami kemerosotan atau degradasi lingkungan yang cukup signifikan dengan banyaknya masalah-masalah lingkungan yang bermunculan. Dimana faktor penyebab yang paling utama dari kemerosotan tersebut adalah karena aktivitas manusia yang tak terkendali. Seperti yang telah dijabarkan dalam Dower (1998) dan Attfield (2010) bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungannya sendiri. Menurut Suranto dan Kusrahmadi (1999), umumnya masalah lingkungan tersebut dapat terjadi karena :

- 1) Ketidaktahuan manusia terhadap akibat dari tindakan yang dilakukan;
- 2) Desakan kebutuhan hidup, sehingga tanpa disadari kegiatan merusak lingkungan terus berlanjut;

- 3) Kurangnya pengetahuan tentang keseimbangan fungsi sistem;
- 4) Kepedulian yang rendah terhadap kelestarian lingkungan;
- 5) Kurang memasyarakatnya hukum tentang lingkungan hidup dan kurang tegasnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar.

Meskipun untuk indeks pencemaran air masih berada dibawah target kota. Parameter yang mempengaruhi naiknya IKLH Kota Magelang tahun 2017 adalah indeks pencemaran udara dan indeks tutupan vegetasi yang meningkat di tahun 2017 ini dibanding tahun sebelumnya.

IKLH juga terkait erat dengan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019, yaitu terjaganya kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Angka IKLH Nasional pada tahun 2019 sesuai dengan **target RPJMN 2015-2019 adalah 68,5**. Hasil perhitungan IKLH Kota Magelang Tahun 2017 tersebut masih belum mencapai dari target IKLH Nasional, sehingga perlu upaya untuk peningkatan kualitas air, peningkatan kualitas udara dan peningkatan tutupan vegetasi.

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam;
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
6. Program Ruang Terbuka Hijau;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 18.924.763.336,00 dari anggaran sebesar Rp 26.091.593.000,00 atau 72,53% dari target. Realisasi keuangan sebesar 72,53% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar **104,71%**, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	83,00%	82,00%	82,62%	100,76%	86%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi 1 indikator tersebut melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100,76%.

Capaian Indikator Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik

Indikator Rasio Infrastruktur Perkotaan dalam kondisi baik terdiri dari panjang jalan, panjang seluruh jembatan, panjang trotoar dan panjang drainase dalam kondisi baik di Kota Magelang dan data keseluruhan kondisi infrastruktur di Kota Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Kondisi Infrastruktur di Kota Magelang

No.	Infrastruktur	2015 (km)		2016 (km)		2017 (km)	
		Panjang	Kondisi Baik	Panjang	Kondisi Baik	Panjang	Kondisi Baik
1	jalan	118	106,2	118,915	105,24	118,915	107,023
2	trotoar	81,65	48,99	237,830	151,521	237,830	154,875
3	drainase	15,82	12,65	237,830	199,777	237,830	202,156
4	jembatan	0,5	0,45	0,53	0,48	0,53	0,49

Pada tahun 2017 panjang jalan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 90% dari target 86,5%, artinya dari total panjang jalan kota 118,915 Km terdapat 107,023 km dalam kondisi baik. Kondisi jalan di Kota Magelang melebihi target yang direncanakan dengan adanya penambahan pada perubahan anggaran 2017 untuk memelihara jalan-jalan Kota Magelang.

Berikutnya panjang jembatan dalam kondisi baik target kinerja 86,49% capaian kinerjanya mencapai 93%, artinya dari total panjang seluruh 74 jembatan yang menjadi kewenangan kota sepanjang 530 meter, 490 meter dalam kondisi baik. Jembatan – jembatan yang dibangun/dipelihara/ditingkatkan pada tahun 2017 diantaranya sebagai berikut : Jembatan Rumah Sakit dr. Soedjono, Jembatan Jalan Tentara Genie Pelajar, Jembatan Jalan Kalimas dan Jembatan di Kel. Kedungsari.

Untuk infrastruktur panjang trotoar dalam kondisi baik dengan target 64,39% capaian kinerjanya 65,12%, dengan hasil tersebut panjang trotoar yang jumlah total panjangnya 237,830 kilometer terdapat 154,875 kilometer trotoar yang kondisinya baik. Pada tahun 2017 trotoar yang dibangun hampir semua menggunakan dana DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk membangun jalan.

Dan terakhir panjang drainase dalam kondisi baik capaian kinerjanya 85% dan mencapai target 85% yang berarti dari total panjang drainase kota yang direncanakan dibangun/direhab sepanjang 237,830 kilometer, telah dibangun atau direhab sepanjang 202,156 kilometer, pada tahun 2017 Pemerintah Kota Magelang membangun saluran drainase kota diantaranya adalah pembuatan afur dan bak kontrol di Jalan Ikhlas, peningkatan saluran drainase Jalan Singosari, Tidar Salakan dan Jalan Beringin IV.

Kesimpulannya Capaian Indikator Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 82,62%, dari target yang ditetapkan sebesar 82% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,76%.

Realisasi kinerja Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik tahun 2017 apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 83,00% menurun sebesar 0,28 poin. Namun demikian tidak signifikan karena jika realisasi kinerja dilakukan pembulatan hasilnya akan sama pada angka 83,00%.

Meskipun capaian indikator ini sudah baik namun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Di beberapa ruas jalan primer yaitu Jalan A. Yani, Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Urip Soemoharjo memiliki intensitas pergerakan yang tinggi Kota Magelang, sementara yang menjadi kewenangan Kota Magelang yang intensitasnya tinggi adalah Jalan Pahlawan, Jalan Sudirman dan Jalan Ikhlas, karena dijalan-jalan tersebut terdapat pusat perekonomian dan pelayanan masyarakat, sehingga menjadikan tantangan bagi Pemerintah Kota Magelang untuk menyiapkan jaringan jalan baru dan prasarana jalan yang berkualitas
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan sehingga Pemerintah Kota Magelang harus menyiapkan bangunan pelengkap jalan seperti trotoar.
3. adanya perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga jika terjadi hujan deras memberi debit air bertambah banyak dan terkadang muncul genangan memberikan tantangan bagaimana Pemerintah Kota Magelang harus menyiapkan master plan drainase yang baik dan prasarana drainase yang berkualitas.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur
2. Adanya program Gubernur Provinsi Jawa Tengah bahwa sampai dengan tahun 2018 tidak ada lagi jalan yang berlubang.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program swasembada pangan yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai sektor pengungkit prioritas pembangunan dan perekonomian.
4. Adanya teknologi penanganan konstruksi drainase berupa beton pre-cvast (U-Ditch dan Box Culvert)
5. Adanya alokasi anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah untuk bantuan keuangan khusus sarana dan prasarana bidang infrastruktur wilayah Kabupaten/Kota

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;
3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;

6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 38.783.257.219,00 dari anggaran sebesar Rp 42.165.658,00 atau 91,98% dari target. Realisasi keuangan sebesar 91,98% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,76%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

6. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel. 3.15
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Luas Kawasan Kumuh	96,87Ha	39,65Ha	67,41Ha	29,99%	0 Ha
2	Prosentase RTLH	4,20%	2,90%	2,58%	111,03%	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					70,51%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator, adapun realisasi 1 indikator masih berada di bawah target yaitu luas kawasan kumuh. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 70,51%.

Capaian Indikator Luas Kawasan Kumuh

Luas Kawasan kumuh di Kota Magelang berdasarkan data terbaru adalah seluas 67,41 Ha (Sumber Dokumen RP2KPKP Kotaku 2017) atau berkurang dari yang ditetapkan pada Surat keputusan Walikota Magelang tertanggal 19 November 2015 Nomor : 050/280/112-310 Tahun 2015 tentang “Penetapan Lokasi kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Magelang” sebesar 121,09 Ha, ketidaksamaan perhitungan luasan diakibatkan oleh rumusan dan variabel yang masih berubah, belum disusunnya rumusan yang tepat mengenai perhitungan dalam monitoring dan evaluasi dalam program pengentasan kawasan kumuh yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sedangkan indikator rasio luas kawasan kumuh Kota Magelang sebesar 67,41% atau kurang dari target luas kawasan kumuh sebesar 39,65% atau capaian kinerjanya 29,99%. Hal ini dikarenakan kriteria tingkat kekumuhan alat ukurnya mengalami perubahan indikator yang dipakai menjadi 19 indikator, pada tahun 2017 masih menggunakan 9 indikator fisik dan 6 indikator non fisik.

Capaian Indikator Prosentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Pertambahan jumlah penduduk di kawasan perkotaan meningkatkan bertambahnya hunian padat yang jika tidak terkendali akan menyebabkan kekumuhan, kegiatan untuk mengurangi kuman kumuh permukiman baru menyentuh infrastruktur jalan lingkungan, saluran permukiman dan air bersih, untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun untuk perbaikan RTLH pada tahun 2017 sudah memperbaiki sebanyak 510 unit rumah sehingga Capaian Indikatornya RTLH berkurang 2,58 % melebihi target 2,90%, jadi dari seluruh jumlah seluruh rumah sebanyak 31.397 unit, masih ada 809 unit rumah yang tidak layak huni.

Kendala-kendala yang menghambat pengurangan rumah tidak layak huni yaitu :

1. Terkendala aturan hibah/bansos dalam penyaluran atau pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni.
2. Adanya aturan pencairan dana DAK yang menyebabkan sulitnya penyerapan anggaran DAK untuk penentasan RTLH
3. Rumah yang tidak layak huni banyak yang bukan aset pribadi atau sewa dari orang lain.

Solusi yang dapat digunakan untuk mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni di Kota Magelang yaitu :

1. Dukungan program dan anggaran DAK dari kementerian pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengentasan rumah tidak layak huni.
2. Adanya kebijakan dari Pemerintah pusat, provinsi dan daerah untuk mencapai 100% pelayanan air bersih, 0% kawasan kumuh dan 100% pelayanan sanitasi.

Program pendukung dalam upaya untuk mencapai sasaran strategis tersebut terdiri dari:

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
2. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
3. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan;
4. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan;
5. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari;
6. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara;
7. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan;
8. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara;
9. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan;
10. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates;
11. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari;
12. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari;
13. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara;
14. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan;
15. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo;
16. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban;

17. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara;
18. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang;
19. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang;
20. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 18.446.094.476,00 dari anggaran sebesar Rp 21.223.949.000,00 atau 86,91% dari target. Realisasi keuangan sebesar 86,91% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 70,51%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi di Kota Magelang

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi
Di Kota Magelang

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	8	8,25	8,40	101,82%	9,25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, adapun realisasi kinerja 1 indikator tersebut telah melampaui target, dengan rata-rata capaian kinerja untuk sasaran sebesar 101,82%.

Capaian Indikator Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keselamatan lalu lintas adalah suatu bentuk usaha/cara untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang berupa keamanan, kenyamanan, dan perekonomian dalam memindahkan muatan (orang maupun barang/hewan) dengan menggunakan alat angkut tertentu melalui media atau lintasan tertentu dari lokasi/tempat asal lokasi/tempat tujuan perjalanan. Adapun Indikator tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara operasional diukur dengan melihat tingkat keselamatan lalu lintas tiap km per 100.000 penduduk.

Angka Kecelakaan berdasarkan 100.000 jumlah penduduk dalam suatu wilayah, sebagai berikut :

$$AR = (A \times 100.000) / P \dots\dots\dots (1)$$

Angka Kecelakaan berdasarkan panjang jalan dalam suatu wilayah, sebagai berikut :

$$AR = (A/L) \dots\dots\dots (2)$$

Indeks Severitas (kekerasan) Kecelakaan, sebagai berikut :

$$SI = (FI / A) \dots\dots\dots (3)$$

Semakin tinggi jumlah kecelakaan di suatu wilayah akan mengindikasikan pada semakin rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas dalam wilayah tersebut dengan kata lain bahwa indikator tingkat keselamatan lalu lintas di suatu daerah adalah tinggi atau rendahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi yang direpresentasikan pada angka kecelakaan.

Dalam sebuah sistem keselamatan lalu lintas faktor yang saling berinteraksi adalah sebagai berikut dalam skema di bawah ini :



Konsep Keselamatan Lalu Lintas

Dalam rangka mewujudkan sistem keselamatan lalu lintas sebagaimana diagram diatas, Pemerintah Kota Magelang berkomitmen dan terus berinovasi dalam bidang lalu lintas. Berbagai inovasi bidang lalu lintas terus dilakukan agar daerah Kota Magelang sungguh-sungguh terwujud menjadi kota dengan Intelligent Transport System (ITS) atau bersistem transportasi cerdas. Pemerintah Kota Magelang juga telah memiliki Area Traffic Control System (ATCS) yang terintegrasi dengan Variable Message Sign (VMS), suatu sistem yang memudahkan pengawasan arus lalu lintas.





Titik-Titik Pemasangan ATCS

Pada Tahun 2017, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan kirab atas keberhasilannya dalam manajemen lalu lintas dengan mendapatkan penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) yang diraih tahun sebelumnya. Penghargaan tertinggi dari Kementerian Perhubungan ini berhasil diraih berkat peran semua pihak, mulai dari Dinas Perhubungan Kota Magelang, jajaran kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.



Piala WTN untuk Kota Magelang saat dikirab, februari 2017

Realisasi indikator kinerja tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2017 adalah sebesar 8,40 poin dari target sebesar 8,25 poin dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar 101, 82 %. Pada tahun kedua periode RPJMD, indikator ini telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Bila dilihat target pencapaian indikator ini pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 9,25 poin, maka sangat memungkinkan indikator akan dapat tercapai. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 8 poin maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,40 poin.

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Masyarakat Kota Magelang selaku pengguna jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya sangat berperan dalam pencapaian indikator ini.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas masih perlu ditingkatkan
2. Inovasi teknologi dibidang lalu lintas belum dapat dipahami implementasinya oleh sebagian masyarakat.
3. Pelayanan angkutan umum masih perlu ditingkatkan dari segi kenyamanan dan keselamatannya.

Solusi untuk mengatasi kendala antara lain melalui :

1. Penegakan disiplin berlalu lintas melalui operasi lalu lintas bersama satlantas
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi dibidang lalu lintas.
3. Perbaikan pelayanan angkutan sarana dan prasarana angkutan umum.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 9.065.739.508,00 dari anggaran sebesar Rp. 9.696.638.000,00 atau 93,49% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,49% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,82%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

Magelang

8. Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi, Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kondusifitas Iklim Investasi,
Daya Saing dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Ralisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Pertumbuhan investasi					
	a. Pertumbuhan nilai investasi PMA	0%	5%	0,19%	3,80%	15%
	b. Pertumbuhan nilai investasi PMDN	20,42%	15%	16,31%	108,73%	15%
	c. Jumlah Investor	63	164	1.493	910,36%	200
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					340,97%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator dan dijabarkan dalam 3 sub indikator. Adapun realisasi 1 sub indikator tidak tercapai yaitu pada indikator pertumbuhan nilai investasi PMA 0,19%, sedangkan untuk sub indikator pertumbuhan nilai investasi PMDN melampaui target, demikian juga dengan sub indikator Jumlah investor. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 340,97%. Capaian kinerja pada sasaran ini akan diuraikan lebih lanjut berkenaan dengan deviasi nilai capaian yang terlalu besar terhadap target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Pertumbuhan investasi

- Pertumbuhan Nilai Investasi PMA
- Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN
- Jumlah Investor

Pertumbuhan Nilai Investasi PMA

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih pertumbuhan investasi PMA dibandingkan dengan nilai investasi PMA tahun sebelumnya. Data kumulatif yang dihimpun dari Buku Perkembangan Penanaman Modal Triwulan IV Tahun 2017 yang diterbitkan oleh DPMPSTP Kota Magelang, didapat data sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Jumlah Perusahaan PMA	3	3	3	3	4
2	Nilai investasi PMA	193,821 M	193,821 M	193,821 M	193,821 M	194,196M
3	Jumlah Investor	152	206	159	63	1.493

Perlu diketahui bahwa izin investasi bagi perusahaan PMA dilaksanakan di tingkat pusat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Data-data yang dihimpun tersebut

berdasarkan pada izin investasi yang telah diterbitkan oleh BKPM dan ditembuskan kepada pemerintah daerah setempat dimana perusahaan melakukan operasional.

Realisasi PMA yang tercatat selama tahun 2017 adalah sebesar 375 juta rupiah. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMA adalah realisasi PMA yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2015, yaitu sebesar Rp. 193.821.000.000,-. Terdapat 4 perusahaan PMA di Kota Magelang, yang penerbitan izin usaha penanaman modalnya diterbitkan di tingkat pusat oleh BKPM, dan oleh karena itu pelaporannya juga disampaikan ke tingkat pusat. Dari 4 PMA tersebut 1 perusahaan merupakan investor baru di sektor restoran. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui pertumbuhan nilai investasi PMA adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2013 Realisasi	Tahun 2014 Realisasi	Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Realisasi	Tahun 2017 Target	Tahun 2017 Realisasi
1	Pertumbuhan Nilai investasi PMA	833,7%	0%	0%	0%	5%	0,19%

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah $0,19\% / 5\% \times 100\% = 3,8\%$, sehingga tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Target pertumbuhan investasi PMA merupakan target yang tidak mudah, dikarenakan obyek investasi adalah perusahaan asing yang jika telah memiliki basis investasi di Indonesia, tentu akan memilih lokasi yang menawarkan insentif yang lebih menarik. Namun demikian, adanya realisasi PMA pada tahun 2017 memberikan harapan baru setelah pada periode 3 tahun sebelumnya nihil investasi PMA. Upaya untuk menarik investasi asing tidak hanya membutuhkan kesiapan dalam hal promosi dan potensi investasi berskala internasional, namun juga kesiapan daerah untuk menerima dan memfasilitasi penanaman modal asing di daerah.

Pada tingkat nasional, realisasi PMA pada tahun 2017 sebesar 430,5 T dan mengambil porsi sebanyak 62,14 % dari total investasi, naik 8,57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada level provinsi Jawa Tengah, total investasi PMA dan PMDN pada 2017 mengalami penurunan sebesar 16,75%, dan belum ada rilis data lebih detail.

Pertumbuhan nilai investasi PMDN

Capaian indikator ini dihitung dengan membandingkan selisih pertumbuhan investasi PMDN dibandingkan dengan nilai investasi PMDN tahun sebelumnya. Perhitungan investasi PMDN adalah nilai investasi baik oleh perusahaan mikro, kecil, menengah maupun besar bukan PMA yang baru membuka usaha di Kota Magelang, direkap dari nilai investasi yang dilaporkan saat pengajuan izin usaha (SIUP) baru dan perubahan SIUP yang menambah modal (penerbitan di DPMPSTP) maupun rekapitulasi investasi dari Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) yang diterbitkan di kecamatan melalui pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Data kumulatif yang dihimpun oleh DPMPSTP Kota Magelang dalam laporannya akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1	Nilai investasi PMDN	288,95 M	419,248 M	464,317 M	672,248 M	781,939 M

Dari data tersebut dapat dihitung nilai pertumbuhan investasi PMDN sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2013 Realisasi	Tahun 2014 Realisasi	Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Realisasi	Tahun 2017 Target	Tahun 2017 Realisasi
1	Pertumbuhan Nilai investasi PMDN	-	45,09%	10,75%	44,75%	15%	16,31%

Dengan demikian capaian kinerja indikator ini adalah $16,31\% / 15\% \times 100\% = 108,73\%$, dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kontribusi pertumbuhan nilai investasi PMDN tersebut disokong oleh izin usaha 2.508 perusahaan dengan berbagai sektor, namun sebagian besar adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan modal kurang dari 500 juta rupiah, dengan perincian sebagai berikut:

No	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Milyar Rp.)
1	Pertanian	2	0,105
2	Pertambangan & Energi	0	0
3	Industri Pengolahan	102	9,368
4	Listrik,Gas, Air Bersih	7	0,585
5	Bangunan	10	177,007
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2.013	444,729
7	Pengangkutan dan Komunikasi	4	0,715
8	Keuangan, Persewaan	29	25,322
9	Jasa-jasa	341	157,108
	Jumlah	2.508	781,939

Indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, yang pada tahun 2017 merealisasikan anggaran sebesar Rp. 793.046.999,-.

Pada tingkat nasional, realisasi investasi PMDN adalah sebesar 262,3 T dan mengambil porsi sebesar 37,86% dari total investasi, naik 21,26% dibanding tahun lalu. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan investasi domestik di Kota Magelang tidak terlalu jauh dari realisasi nasional.

Jumlah Investor

Capaian indikator ini dihitung berdasarkan identifikasi penerbitan izin usaha baru. Identifikasi ini berasal dari dua sumber yaitu penerbitan SIUP baru di DPMPTSP untuk usaha skala besar dan identifikasi penerbitan IUMK di kecamatan. Capaian indikator berdasarkan hasil rekapitulasi oleh DPMPTSP Kota Magelang memberikan hasil sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2013 Realisasi	Tahun 2014 Realisasi	Tahun 2015 Realisasi	Tahun 2016 Realisasi	Tahun 2017 Target	Tahun 2017 Realisasi
1	Jumlah investor	152	206	159	63	164	1.493

Capaian pada tahun 2017 terjadi deviasi yang cukup besar dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kota Magelang dan diundangkan pada 18 Februari 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, IUMK diterbitkan oleh kecamatan, dengan terlebih dahulu melakukan pendataan. Berkenaan dengan masa peralihan tersebut, Kantor Penanaman Modal pada saat itu belum mendapatkan data pelaporan penerbitan IUMK dari kecamatan, sehingga realisasi jumlah investor pada tahun 2016 tercatat rendah.

Untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan daya saing investasi, pemerintah mencabut izin gangguan lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, yang diundangkan pada 2 Mei 2016, dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Magelang melalui DPMPTSP dengan tidak mensyaratkan izin gangguan sejak Oktober 2016. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dengan pencabutan izin gangguan tersebut, pengusaha tidak disyaratkan memiliki izin gangguan (yang dikenakan retribusi) sebelum mengajukan izin usaha, sehingga menjadikan angin segar bagi para pengusaha yang selama ini belum memiliki izin usaha untuk berbondong-bondong mengajukan izin usaha. Atas kondisi tersebut maka pencatatan jumlah investor selama 2017 menjadi melonjak tinggi.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;

Permasalahan lainnya yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal yaitu:

1. kurang optimalnya dukungan terhadap potensi investasi karena kekurangsiapan sumberdaya dan sarana prasarana dalam menarik investor.
2. Ketika investor tertarik melakukan investasi di kota magelang justru yang terjadi adalah Ketidaksiapan daerah dalam menyajikan data akurat lokasi investasi dan juga regulasi yang mendasari investor untuk dapat melakukan investasi pada lokasi – lokasi yang ditawarkan oleh DPMPTSP.
3. Kewenangan dalam memperoleh informasi secara langsung dari perusahaan – perusahaan asing/investor asing yang melakukan kegiatan investasi di daerah masih terpusat pada provinsi atau bahkan kementerian yang menangani masalah investasi.

Upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan Penanaman Modal terutama pada tahun 2019 adalah dengan mempertahankan capaian yang sudah sesuai track serta memastikan solusi bagi indikator yang belum tercapai terutama untuk indikator Pertumbuhan nilai investasi PMA perlu upaya keras pada tahun 2019 antara lain :

1. Membangun koordinasi yang lebih intensif ke BKPM Provinsi maupun pusat untuk memperoleh data dan informasi
2. Menyusun dokumen studi kelayakan investasi pada 8 wilayah strategis yang telah rencanakan dalam perda RTRW Kota guna mendukung terealisasinya investasi oleh investor di kota magelang.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 955.602.265,00 dari anggaran sebesar Rp 1.021.206,00 atau 93,58% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,58% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 340,97%, maka secara eksplisit terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut. Namun demikian capaian tersebut menyisakan satu indikator yaitu investasi PMA yang masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan.

9. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	13.501	12.831	13.637	106,28%	13.037

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator. dengan realisasi telah melampaui target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 106,28%.

Capaian Indikator Ketersediaan Pangan Utama Beras (ton)

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari beberapa sumber yaitu : produksi wilayah, pemasokan pangan, bantuan/hibah pangan yang disalurkan kepada masyarakat berupa beras sejahtera (rastra), dan pengelolaan cadangan pangan.

Melalui pembangunan sektor unggulan yaitu kedaulatan pangan yang disebutkan dalam dimensi pokok pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, ketahanan pangan merupakan kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Belum tercapainya kecukupan pangan di tingkat individu dapat menimbulkan kerawanan pangan. Kerawanan pangan dapat disebabkan ketidakmampuan dalam memperoleh pangan yang cukup, yang terjadi karena ketidakstabilan harga, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta ketidakstabilan produksi pangan di wilayah tertentu. Untuk itu, peningkatan ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam misi meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi kinerja pada tahun 2017 sebesar 13.637 ton dari target yang ditetapkan sebesar 12.831 ton dengan capaian kinerja sebesar 106,28%. Apabila realisasi tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 13.501 ton maka realisasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 136 ton.

Gambar 3.4
Kegiatan Pemantauan/Survey Ketersediaan Pangan (Beras)



Panen Raya Padi Inpigo (Produksi Padi) Kota Magelang 2017
Dalam Upaya Pemenuhan Ketersediaan Pangan Utama (Beras)

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pencapaian indikator ketersediaan pangan utama beras (ton), antara lain sebagai berikut:

1) Produksi Wilayah

Luas lahan pertanian pangan di Kota Magelang hanya sekitar 208 ha, dengan produksi padi hanya mampu mencukupi kebutuhan penduduk Kota Magelang sekitar 14-15% sedangkan sisanya didatangkan dari luar Kota Magelang agar ketersediaan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk Kota Magelang. Secara umum neraca ketersediaan (produksi) dan

kebutuhan pangan tahun 2017 menunjukkan keadaan defisit. Hal ini mengindikasikan kebutuhan pangan di kota Magelang harus mendatangkan dari luar Kota Magelang. Jumlah kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama di Kota Magelang terus mengalami peningkatan, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kebutuhan rata-rata beras tahun 2017 sebesar 13.637 ton, dengan konsumsi beras 82,1 kg/kap/tahun. Jumlah produksi beras di Kota Magelang Tahun 2017 sejumlah 1.935,30 ton mengalami peningkatan dibandingkan produksi tahun 2016 sejumlah 1.902 ton.

2) Pemasokan Pangan

Kota Magelang berada pada posisi strategis sebagai simpul jalur ekonomi dan wisata regional, sekaligus sebagai kota jasa dengan potensi perdagangan yang cukup baik. Hasil pertanian tanaman pangan dari daerah sekitar pada umumnya dipasarkan di Kota Magelang sebelum didistribusikan ke daerah lain. Hal ini didukung dengan sarana dan prasarana distribusi yang ada di Kota Magelang seperti jalan, transportasi, pasar, serta agen-agen penyalur kebutuhan pokok masyarakat, sehingga secara umum ketersediaan pangan utama di Kota Magelang dapat tercukupi. Karena sebagian besar bahan pangan untuk konsumsi masyarakat Kota Magelang berasal dari luar Kota Magelang, maka Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pertanian dan Pangan serta Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kerjasama dengan 3 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Magelang, 1 Gapoktan Kabupaten Temanggung dan 1 Gapoktan Kabupaten Purworejo untuk memasok bahan pangan beras ke 8 TTI dan selama tahun 2017. Gapoktan tersebut telah memasok bahan pangan beras ke TTI Kota Magelang sebanyak sekitar 80 ton. Disamping itu ketersediaan pangan di Kota Magelang didukung dengan adanya penyaluran bantuan pangan non tunai (pengganti rastra) melalui E-Warung yang ditujuk oleh Pemerintah Kota Magelang (Dinas Sosial) sebanyak 5 (lima) E-Warung ke KK miskin, dan dapat menyalurkan beras sebanyak 21.115 kg (21,12 ton)..

3) Kebutuhan dan Produksi Pendukung Ketahanan Pangan

- a. Kebutuhan rata-rata jagung sebesar 66,8 ton, dengan konsumsi 0,5 kg/kap/th,
- b. Kebutuhan sayur-sayuran sebesar 9.870,5 ton, dengan konsumsi 73,7 kg/kap/th,
- c. Kebutuhan buah-buahan sebesar 7.468,3 ton, dengan konsumsi 55,8 kg/kap/th,
- d. Kebutuhan daging ruminansia sebesar 714 ton, dengan konsumsi 5,3 kg/kap/th,
- e. Kebutuhan telur sebesar 1.216,5 ton, dengan konsumsi 9,1 kg/kap/th,
- f. Kebutuhan ikan sebesar 2.231,3 ton, dengan konsumsi 16,7 kg/kap/th,
- g. Produksi ubi kayu 0,625 ton,
- h. Produksi buah-buahan 130 ton,
- i. Produksi daging sapi 764,471 ton,
- j. Produksi ayam : ayam buras 478,298 ton, dan ayam ras 4.555,470 ton
- k. Produksi telur : telur ayam buras 15,136 ton, dan telur ayam ras 1.346,252 ton
- l. Produksi ikan 167,253 ton.

4) Capaian Indikator Pendukung Ketahanan Pangan

Ketersediaan kalori dan protein pada tahun 2017 sudah melampaui ketersediaan yang dianjurkan. Pada tahun 2017 ketersediaan energi dan protein masing - masing adalah 2.422

Kkal/kap/hari dan 76,81 gr/kap/hari. Konsumsi energi dan protein pada tahun 2017 masing-masing 1.809 kkal/kap/hr, dan 57,5 gr/kap/hr, untuk konsumsi kalori masih jauh di bawah konsumsi yang dianjurkan sebesar 2.150 kkal/kap/hr, sedangkan konsumsi protein sudah di atas standar kecukupan protein yang dianjurkan yaitu 57 gr/kap/hr.

Harga bahan pangan pokok selama tahun 2017 cukup bervariasi. Bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga cukup signifikan yakni cabe, bawang merah, bawang putih dan telur ayam ras. Fluktuasi harga yang tinggi mengindikasikan adanya keterbatasan masyarakat dalam mengakses bahan pangan tersebut. Balita yang mengalami gizi buruk tahun 2017 sebanyak 20 anak masih dalam penanganan dari Dinas Kesehatan Kota Magelang instansi terkait.

Sebagian besar Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat Kota Magelang berasal dari impor (mendatangkan dari luar Kota Magelang), angka impor yang terus meningkat untuk berbagai komoditas pangan disebabkan oleh tiga hal penting. Yang pertama, kebutuhan pangan yang semakin meningkat karena jumlah penduduk yang meningkat. Yang kedua, konsumsi per kapita yang meningkat sebagai hasil dari peningkatan kesejahteraan dan pendidikan. Ketiga, produksi padi di Kota Magelang relatif stabil walaupun produktivitas per hektarnya meningkat, hal ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk itu pembangunan ketahanan pangan dalam hal ketersediaan pangan harus memuat komponen-komponen dasar ketahanan pangan antara lain : (1) Pemenuhan gizi untuk hidup aktif dan sehat, (2) keamanan pangan, (3) akses pangan secara fisik (produksi dan ketersediaan pangan), (4) akses pangan secara ekonomi atau social (kemampuan membeli dan memperoleh pangan), (5) akses informasi tentang jumlah, mutu dan harga pangan, (6) kesinambungan yaitu terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan sepanjang waktu..

Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama (beras) di Kota Magelang rutin dilakukan survey/pemantauan. Pemantauan ini dilakukan setiap minggu selama setahun berjalan, selain dilakukan pemantauan ketersediaan pangan juga dilakukan pemantauan harga pangan yang meliputi 14 komoditas bahan pangan. Titik pemantauan meliputi stok pangan di 3 pasar (Pasar Kebonpolo, Pasar Cacaban, Pasar Rejowinangun); stok pangan di 9 agen/distributor; ketersediaan pangan di 17 kelurahan melalui survey warung/toko kelontong serta pemantauan di 9 Toko Tani Indonesia (TTI).

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pendataan/monitoring bahan pangan beras, yaitu :

1. Belum semua toko bahan pangan khususnya toko modern (Gardena, Superindo, Giant, Alfa Mart dan Indo Mart) menjadi sasaran pemantauan/survey.
2. Kurangnya tenaga teknis pemantauan/survey.
3. Keluar masuknya bahan pangan khususnya beras tidak dapat/sulit diakses.

Solusi, guna pemenuhan terhadap kebutuhan kinerja antara lain :

1. Sasaran survey/pemantauan ditambah.
2. Penambahan tenaga teknis survey/pemantauan dengan pelatihan.
3. Adanya akses pemantauan keluarannya masuknya bahan pangan.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 824.291.489,00 dari anggaran sebesar Rp 876.994.000,00 atau 93,99% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,99% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 106,28%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

10. Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase penyerapan tenaga kerja	90,84%	65%	93,32%	143,57%	70%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi sebesar 93,32% melampaui dari target yang telah ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 143,57%.

Capaian Indikator Persentase Penyerapan Tenaga Kerja

Realisasi kinerja indikator persentase penyerapan tenaga kerja tahun 2017 sebesar 93,32% dari target yang ditetapkan sebesar 65% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 143,57% artinya realisasi kinerja telah melampaui dari target yang ditetapkan.

Apabila realisasi kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 90,84 maka meningkat sebesar 2,48 poin.

Capaian indikator ini didukung oleh 3 program dan 39 kegiatan yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 5.058.327.000,00.

Tabel 3.20
Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran
Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang

No	Program/Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.101.113.000 ,00
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp 3.720.577.000,00
3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp 236.637.000,00
JUMLAH		Rp 5.058.327.000,00

Ketiga program menunjukkan fungsi ketenagakerjaan yaitu pra penempatan, penempatan dan paska penempatan. Ketiga fungsi ini memiliki indikator program dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Capaian Indikator kinerja Program Ketenagakerjaan Tahun 2017

No.	Uraian	Target SPM	Target RPJMD	Realisasi 2016	Realisasi 2017
A.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja				
1	Persentase wirausaha baru	0	4%	12,50%	15,00%
2	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	65%	93,21%	86,80%
3	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kewirausahaan	60%	70%	90,91%	70,18%
B.	Program Penempatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
4	Persentase peserta pelatihan tersertifikasi	0	2%	0	24%
5	Persentase Pencari kerja terlatih berbasis kompetensi	60%	65%	66,55%	69,20%
6	Persentase tenaga kerja tersertifikasi BNSP	0	0	0	25%
C.	Program Pengembangan Perlindungan Lembaga ketenagakerjaan				
7	Coverage asuransi tenaga kerja	50%	69%	70,32%	71,85%
8	Persentase Perselisihan Hub Industrial terselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	50%	50%	92,86%	83,33%

Indikator sasaran ini tercapai melalui pencapaian indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016–2021 sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Indikator program yang ada, mendorong penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme formal dan informal.

Penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme informal dilakukan dengan cara memberi pelatihan kewirausahaan kepada para pencari kerja/penganggur sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan wirausaha baru sehingga akan membuka lapangan pekerjaan bagi para penganggur maupun ibu rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pada Tahun 2017 telah muncul wirausahawan baru sebanyak 5 (lima) orang yang berasal dari peserta pelatihan batik jumputan dan 5 (lima) orang dari pelatihan sablon. Dengan jumlah peserta pelatihan masing-masing sebanyak 20 orang maka munculnya 5 (lima) orang dari masing-masing pelatihan ini diharapkan menjadi pemicu bagi penyerapan tenaga kerja di masa yang akan datang. Koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pembinaan lanjutan kepada wirausahawan baru terus dilakukan agar optimal perkembangan usahanya.

Adapun penyerapan tenaga kerja melalui mekanisme formal dilakukan melalui tahapan memberi pelatihan kerja berbasis kompetensi yang sesuai dengan program dan kurikulum SKKNI yang ditetapkan oleh BNSP yang kemudian dilakukan sertifikasi profesi oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP). Pada Tahun 2017 terdapat 10 (sepuluh) jenis pelatihan berbasis kompetensi dengan jumlah peserta sebanyak 207 orang pencari kerja dari 299 pendaftar. Dari 10 (sepuluh) jenis pelatihan, hanya pelatihan perkayuan yang telah menerapkan sertifikasi kompetensi. Dari 20 orang yang mengikuti pelatihan, hanya 5 (lima) orang yang telah lulus uji kompetensi, sementara 15 (lima belas) orang lainnya baru mendapatkan log book saja. Sementara jumlah pencari kerja yang bisa ditempatkan pada Tahun 2017 sebanyak 500 orang pencari kerja dari 576 pencari kerja terdaftar.

Program perlindungan tenaga kerja mendorong indikator sasaran dari sisi retaining/pencegahan pemutusan hubungan kerja. Dengan pembinaan kepada perusahaan dan serikat pekerja secara terus menerus diharapkan tenaga kerja yang telah bekerja terlindungi hak-haknya sebagai pekerja dan dapat terus bekerja sesuai dengan norma ketenagakerjaan yang berlaku.

Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha/menjadi wirausahawan.
2. Belum adanya jenis pelatihan unggulan berbasis kompetensi yang menjadi rujukan daerah sekitar.
3. Belum terakreditasinya Balai Latihan Kerja Daerah.
4. Belum tersertifikasinya para lulusan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja sesuai standar BNSP.
5. Belum sesuainya tempat praktek pelatihan sesuai dengan kondisi riil dunia industri/usaha.
6. Belum adanya sosialisasi kepada siswa SMA dan SMK kelas X dan XI mengenai dunia kerja.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan motivasi kepada para pencari kerja untuk berwirausaha melalui pelatihan kerja bekerjasama dengan pelaku usaha
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberikan pendampingan berkelanjutan.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait untuk membuat jenis pelatihan yang bisa diunggulkan di daerah dengan mempertimbangkan kondisi local daerah
4. Mempersiapkan persyaratan untuk mencapai akreditasi
5. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk mempersiapkan sertifikasi bagi para peserta pelatihan berbasis kompetensi dan para pekerja
6. Merencanakan renovasi tempat pelatihan agar sesuai dengan kondisi riil dunia industry/usaha..

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.794.109.235,00 dari anggaran sebesar Rp . 5.058.327.000,00 atau 94,78% dari target. Realisasi keuangan sebesar 94,78% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 144,00%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

11. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase Penurunan PMKS	2%	15%	9,61%	64,04%	19%
2	Pendapatan Per Kapita		Rp.63.394.588,17	Rp.63.394.588,17*	100,00%*	
3	Angka Kemiskinan		7,41%-8,09%	8,75*	91,84%*	
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					85,29%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 3 indikator, dengan realisasi kinerja persentase penurunan PMKS masih di bawah target yang ditetapkan; dengan 2 indikator yang realisasi kinerjanya masih angka prediksi masing-masing pada indikator pendapatan per kapita dan angka kemiskinan. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 85,29%.

Capaian Indikator Persentase Penurunan PMKS

Realisasi kinerja untuk indikator **Persentase Penurunan PMKS** sebesar 9,61% lebih rendah 5,39% dari yang ditargetkan sebesar 15% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 64,04% artinya target kinerja belum dapat tercapai.

Realisasi kinerja **Persentase Penurunan PMKS** Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2% mengalami **peningkatan** sebesar 7,61 poin.

Capaian indikator ini didukung oleh 7 program dan 20 kegiatan yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 762.685.750,00.

Tabel 3.23
Program /Kegiatan Pendukung dan Jumlah Anggaran Indikator Kinerja Sasaran Persentase Penurunan PMKS

No	Program/Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp 84.689.000,00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp 666.688.000,00

No	Program/Kegiatan Pendukung	Jumlah Anggaran
3	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Rp 106.256.000,00
4	Program pembinaan panti asuhan/panti jompo	Rp 11.888.000,00
5	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Rp 156.273.000,00
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp 387.896.000,00
7	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Rp 21.602.000,00
JUMLAH		Rp 1.413.690.000,00

Ke-7 (tujuh) program tersebut memiliki indikator kinerja beserta capaiannya di tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.24
Capaian Indikator kinerja Program Bidang Sosial Tahun 2017

No.	Uraian	Target SPM	Target RPJMD	Realisasi 2017
1	Persentase (%) lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	40%	20%	11,40%
2	Persentase (%) PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80%	10%	15,31%
3	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang aktif	0	100%	100%
4	Persentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60%	20%	0
5	Persentase penanganan gelandangan, pengemis, WTS, pemulung dan korban penyalahgunaan NAPZA	0	70%	94,25%
6	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial		15%	19,53%

Indikator sasaran ini belum tercapai di Tahun 2017, untuk itu perlu ditelusuri dari capaian indikator program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2016 – 2021 sebagaimana terlihat pada tabel diatas. Indikator program yang ditetapkan seharusnya mendorong penurunan jumlah keluarga miskin dan PMKS serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Dari hasil capaian indikator program terlihat bahwa masih ada 2 indikator program yang belum tercapai yang masih harus didorong pencapaiannya di tahun-tahun mendatang yaitu persentase lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial, dan persentase WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Kedua indikator ini perlu didorong melalui penambahan sasaran kegiatan sehingga capaian indikator bisa tercapai di tahun mendatang.

Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:

1. Di Tahun 2017 sebanyak 70 orang lanjut usia terlanter telah menerima jaminan sosial berupa uang sebesar Rp. 200.000 setiap bulannya yang berasal dari dana Provinsi dan diberikan selama 10 bulan setiap tahunnya. Sementara itu ada 614 lanjut usia terlanter di Kota

Magelang sehingga baru sebesar 11,40 persen lanjut usia terlantar yang mendapatkan jaminan sosial. Indikator ini masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 20 persen di tahun 2017 dan meningkat menjadi 30 persen di tahun 2018. Perlu menjadi perhatian bahwa program ini telah berakhir pada Tahun 2017 dan akan diintegrasikan ke Program Keluarga Harapan (PKH). Diharapkan indikator ini bisa dipenuhi melalui PKH untuk lanjut usia.

2. Realisasi indikator Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Pembentukan WKBSM di Kota Magelang sudah dilaksanakan di Kelurahan Rejowinangun Selatan dan di Kelurahan Tidar Selatan, tetapi dari keduanya masih belum dapat menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat dan propinsi agar WKBSM yang telah terbentuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan
3. Dari 343 orang penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial, baru 67 orang yang mendapatkan bantuan sosial. Meskipun indikator ini telah memenuhi target Tahun 2017, kondisi ini harus menjadi agenda utama urusan sosial dalam pemberian bantuan sosial kepada penyandang cacat tidak potensial yang ada di Kota Magelang.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain dengan:

1. Untuk memberikan jaminan kepada Lanjut usia terlantar yang menerima jaminan sosial sangat perlu dan mendesak bagi pemerintah Kota Magelang untuk mengintervensi pencapaian target indikator ini melalui penganggaran APBD Kota sebagai solusi, serta mengintegrasikannya dengan Program Keluarga Harapan.
2. Perlu menggerakkan dan mengaktifkan kembali WKBSM yang sudah terbentuk selama ini agar program-program terkait dapat berjalan sesuai dengan rencana.
3. Perlu dilaksanakan validasi kebutuhan penyandang cacat fisik dan mental untuk menunjang keberlangsungan hidup para penyandang cacat tidak potensial..

Capaian Indikator Pendapatan Perkapita

Publikasi jumlah penduduk level Kabupaten/Kota oleh BPS mulai tahun 2015 dihitung berdasarkan data hasil proyeksi kependudukan. Untuk Kota Magelang proyeksi penduduk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Proyeksi Jumlah Penduduk berdasar Jenis Kelamin di Kota Magelang, Tahun 2010-2017

Penduduk	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Laki-laki	58,312	58,564	58,874	59,046	59,26	59,457	59,688	59,803
Perempuan	60,101	60,393	60,649	60,889	61,113	61,322	61,517	61,698
Jumlah	118,413	118,957	119,523	119,935	120,373	120,779	121,205	121,501

Sumber: BPS Kota Magelang

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku merupakan nilai yang menunjukkan PDRB per satu orang penduduk pada tahun yang bersangkutan. Indikator PDRB per kapita publikasi BPS merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk tengah tahun. Jika indikator tersebut kemudian disesuaikan berdasar angka proyeksi penduduk (akhir tahun) sebagaimana tabel 5, maka perkembangan PDRB per kapita Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
PDRB per Kapita berdasar Proyeksi Penduduk Akhir Tahun di Kota Magelang,
Tahun 2015 dan Prediksi Tahun 2016-2017

Indikator	2015	2016	2017
Proyeksi Penduduk Akhir Tahun	120,779	121,205	121,501
PDRB adhb (Juta Rp)	6.466.971,04*	7.067.357,25**	7.702.505,86**
PDRB per Kapita (Juta Rp/tahun)	53.543.836,594	58.309.122,982	63.394.588,168
PDRB per kapita (Rp/bulan)	4.461.986,383	4.859.093,582	5.282.882,347

* Angka Sangat Sementara (BPS) ** Prediksi

Pada tahun 2017 linear dengan asumsi pertumbuhan PDRB adhb sebesar 8,99%, maka PDRB per Kapita (adhb) penduduk Kota Magelang diprediksi tumbuh 8,72% mencapai Rp. 5,282 juta per bulan.

Realisasi kinerja untuk indikator Pendapatan Perkapita diprediksi sebesar Rp.63.394.588,17 dari yang ditargetkan sebesar Rp.63.394.588,17 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% artinya target kinerja diprediksi dapat tercapai.

Prediksi realisasi kinerja Pendapatan Perkapita Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 58.309.122,982 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.085.465,19.

Capaian Indikator Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 mencapai 4,197 juta jiwa dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 337.657. Secara porsi, besarnya persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2017 (12,23%) masih lebih tinggi dari persentase pada skala nasional dan menduduki peringkat ke-13 tertinggi se-Indonesia setelah DI Yogyakarta (12,36%). Pada skala Kabupaten/Kota posisi Maret 2017 persentase penduduk miskin terbesar berada di Kabupaten Wonosobo, Kebumen dan Brebes. Mayoritas penduduk miskin di kantong kemiskinan terbesar di Jawa Tengah adalah berasal dari pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Arah dan prioritas pembangunan Jawa Tengah di tahun 2019 untuk penanggulangan kemiskinan memfokuskan pada penyediaan basic life access, penguatan sustainable livelihood, penguatan basis data, spasial, komunitas, pendampingan dan keterlibatan swasta serta pihak lain dalam pengentasan kemiskinan.

Tabel 3.27
Capaian Indikator Makro Tengah, 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017*	Keterangan	Target 2019**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,28	5,13	2017 data Triwulan III (y-o-y)	5,2-5,6
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,99	4,63	4,57		4,52
IPM (%)	69,49	69,98	na		-
Inflasi (%)	2,73	2,36	3,71		-
Indeks Gini (Maret)	0,382	0,366	0,365		-
Persentase Penduduk Miskin (%)	13,58	13,27	12,23	Data September	12,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

** SE Gubernur Jawa Tengah No. 050/019604 Tanggal 27 Desember 2017

TPT di Jawa Tengah mampu turun di tahun 2017. Dengan total angkatan kerja sebanyak 18,016 juta jiwa, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih ditemui sebesar 823,938 jiwa atau mencapai 4,57% dari total angkatan kerja. TPT tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 8,19% sedangkan wilayah dengan TPT terkecil adalah Kabupaten Semarang yang hanya mencapai 1,78%.

Adapun realisasi dan prediksi capaian beberapa indikator makro Pemerintah Kota Magelang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3-28
Realisasi dan Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Magelang, 2015-2018

Indikator	2015	2016	2017	2018	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi (%)*	5,11	5,17	5,19	5,39	2017-2018 prediksi (deviasi $\pm 0,40\%$)
TPT (%)	6,43	na	6,68	5,77	2018 prediksi
IPM (%)*	76,39	77,16	77,80	78,56	2017-2018 prediksi
Inflasi (%)*	2,70	2,25	3,90	3,26-4,23	2018 prediksi
Indeks Gini*	0,340	0,325-0,340	0,314-0,340	0,312-0,340	2016-2018 prediksi
Persentase Penduduk Miskin (%)*	9,05	8,79	8,75	8,32	2011-2016 data September, 2017 data Maret 2018 prediksi (deviasi $\pm 0,71$)

Sumber: Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

Prediksi Indikator Bertanda Bintang oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Prediksi TPT oleh Pusdatin Naker, 2017

Prediksi Realisasi kinerja untuk indikator Angka Kemiskinan sebesar 8,75% lebih tinggi dari yang ditargetkan sebesar 7,41%-8,09% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,84% artinya target kinerja belum tercapai.

Realisasi kinerja untuk indikator angka kemiskinan Kota Magelang Tahun 2017 sebesar 8,75% apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 12,23% jauh lebih rendah 3,48 poin.

Prediksi Realisasi kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,79 turun sebesar 0,04 poin.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma;
4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo;
5. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya);
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 1.255.530.181,00 dari anggaran sebesar Rp 1.413.690.000,00 atau 88,81% dari target. Realisasi keuangan sebesar 88,81% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 85,29%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

12. Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.29
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2 anak	2 anak	2 anak	100,00%	2 anak

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 1 indikator, dengan realisasi 2 anak dari target yang ditetapkan sebesar 2 anak sehingga dapat disimpulkan indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100,00%.

Capaian Indikator Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga

Pada salah satu sisi jumlah penduduk yang tinggi merupakan asset yang di miliki oleh sebuah daerah namun hal tersebut akan menimbulkan permasalahan yang kompleks apabila tidak di imbangi dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (basic need), bagi suatu wilayah bukan merupakan satu hal yang mudah apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Hampir di seluruh wilayah berdasarkan studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggi akan membawa dampak dan permasalahan

tersendiri bagi wilayah. Permasalahan yang hampir sama di hadapi oleh daerah – daerah dengan jumlah penduduk yang tinggi di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas. Selain itu permasalahan terkait kesediaan permukiman yang layak dan fasilitas – fasilitas dasar juga menjadi satu permasalahan yang butuh penyelesaian tersendiri bagi pemerintah karena jumlah penduduk yang besar membutuhkan lahan permukiman yang luas dan layak huni. Masalah lain yang dapat muncul di antaranya terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang disebabkan karena meningkatkan angka kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai dan rendahnya sumberdaya manusia terkait dengan sarana pendidikan dan ekonomi masyarakat yang terbatas

Dalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2016-2021 sasaran strategis Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan merupakan bagian dari pencapaian tujuan Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk kesejahteraan masyarakat yang indikator tujuannya adalah angka pertumbuhan penduduk. Adapun indikator kinerja atas sasaran ini adalah rata – rata jumlah anak dalam keluarga.

Realisasi kinerja untuk indikator **Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga** sebesar 2 anak sama dengan yang ditargetkan sebesar 2 anak, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% artinya indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga** Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2 anak, realisasi kinerja dapat dijaga dan dipertahankan sehingga pertumbuhan penduduk relatif bisa dikendalikan.

Salah satu keberhasilan pengendalian penduduk di Kota Magelang dibuktikan dengan diperolehnya Penghargaan MDG's Award dari BKKBN, yang dapat dilihat dari jumlah anak per keluarga selama tahun 2014-2015 yang stabil pada angka 2. Hal ini dapat dicapai dengan rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif rata-rata selama 5 tahun sebesar 76%-77%. Untuk meningkatkan rasio tersebut dirasa tidak memungkinkan bagi Kota Magelang karena struktur penduduk terbesar pada usia produktif. Capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera selengkapya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Capaian Indikator kinerja Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Sejahtera Tahun 2011-2017

No	Indikator	Tahun						
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	0,44	0,34	2	2	2	2

Melalui pelaksanaan program-program tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang, masing-masing keluarga rata-rata memiliki 2 anak. Hal ini sudah sesuai dengan slogan “Dua Anak Cukup”. Apabila dibanding dengan posisi Tahun 2015 yaitu target kinerja sebesar 2 anak dan realisasi sebesar 2 anak, capaian kinerja pada tahun 2016 dapat dipertahankan sama dengan tahun sebelumnya.

Dapat disimpulkan bahwa Keluarga dengan “Catur Warga” menuju keluarga bahagia sejahtera sudah terwujud di Kota Magelang, melalui Program Keluarga Berencana, penduduk berhasil dikendalikan pertumbuhannya, mengingat daya dukung dan daya tampung yang terbatas di Kota Magelang urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus sukses.

Berdasarkan tabel capaian indikator kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di atas, dapat diketahui bahwa indikator tersebut telah mencapai target. Sehingga upaya yang dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada tahun - tahun yang akan datang adalah dengan menjaga dan mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya agar target akhir tahun tetap dapat tercapai. Tercapainya realisasi kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan program sebagai berikut: a) Program Keluarga Berencana; b). Program Kesehatan Reproduksi Remaja; c). Program pelayanan kontrasepsi; d). Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri; e) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; f). Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.

Beberapa hal yang harus selalu mendapat perhatian adalah :

1. Adanya pernikahan dini (dibawah usia 20 tahun) dan jarak kehamilan yang kurang dari 3 tahun ; Sebagian besar terjadi karena married by accident (hamil sebelum menikah), biasanya disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, konten pornografi dan kurangnya perhatian dari orang tua.
2. Diperlukan adanya kerjasama terkait pendidikan sex, pengoptimalan fungsi Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa,
3. Kepesertaan dalam KB, UPPKS, BKB dan BKR ; Ketika kesejahteraan suatu keluarga meningkat, apalagi jika 2 anak yang dimiliki memiliki jenis kelamin yang sama, maka terkadang muncul keinginan untuk menambah anak dengan harapan mendapatkan anak dengan jenis kelamin yang berbeda dari anak sebelumnya.
4. Fenomena Bonus Demografi harus disikapi dengan upaya penciptaan keluarga sejahtera dengan kecukupan lapangan kerja bagi penduduk.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yaitu:

1. Rendahnya kepesertaan KB pria karena kurangnya kesadaran laki-laki untuk ber-KB dan adanya kekhawatiran pada sebagian perempuan/isteri karena dapat mendorong pria untuk bebas berselingkuh.
2. Kurangnya tenaga penyuluh KB, idealnya 1 orang per kelurahan sedangkan saat ini baru terdapat 15 orang PLKB dari 17 yang dibutuhkan.
3. Kurangnya Balai PLKB.

4. Masih adanya remaja perempuan (ibu Muda) berusia 15-19 tahun yang hamil.
5. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan KB-KS.

Solusi atas permasalahan yang dihadapi:

1. Penguatan pendidikan karakter dan nilai – nilai religious di kalangan remaja untuk biasanya disebabkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, konten pornografi;
2. Penguatan nilai – nilai keluarga
3. Optimalisasi program – program terkait dengan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sehingga tepat sasaran
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan KB-KS

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR;
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 550.103.054,00 dari anggaran sebesar Rp 554.398.000,00 atau 99,26% dari target. Realisasi keuangan sebesar 99,26% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

13. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi isu besar di Indonesia beberapa tahun terakhir karena meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini kemudian menjadi salah satu aspek pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJM Nasional) Tahun 2015-2020. Pembangunan keadilan dan kesetaraan gender diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang karena amanat pencapaian Millenium Development Goals yaitu: "Mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan target 2005 dan 2015; Mengurangi perbedaan dan diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan untuk semua tingkatan pada tahun 2015"

Sebagaimana kita ketahui bersama, lebih dari separuh penduduk Kota Magelang adalah berjenis kelamin perempuan, namun demikian dalam realitanya peran perempuan di sektor publik belum dominan (masih minoritas) dan tertinggal dibanding dengan laki-laki. Pemerintah Kota Magelang pada dasarnya telah menerapkan asas kesetaraan dalam penyediaan seluruh

elayanan dasar akan tetapi pada kenyataan pemberdayaan perempuan masih terkendala dalam memperoleh layanan pelayanan dasar seperti kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung juga berdampak bagi anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan keluarga mengingat besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam suatu rumah tangga.

Keadilan gender dan perlindungan anak diidentifikasi sebagai salah satu isu strategis pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2016-2021. Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Diidentifikasi terdapat beberapa permasalahan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kota Magelang. Masalah-masalah itu seperti angka kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, kepala keluarga perempuan miskin, belum proporsionalnya para pejabat pengambil kebijakan antara laki-laki dan perempuan baik di lembaga pemerintahan maupun dunia swasta, termasuk peran perempuan di bidang politik masih perlu ditingkatkan, juga kontribusi pendapatan perempuan terhadap PDRB Kota Magelang, dan sebagainya.

Pemerintah Kota Magelang senantiasa berupaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Gambaran umum terkait dengan capaian kinerja indikator tersebut dalam periode perencanaan jangka menengah 2011-2015, dengan capaian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3. 31
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011 sd 2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15,70%	15,75%	15,67%	15,94%	13,15%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,68%	9,81%	14%	15,67%	16,73%
3	Persentase keterwakilan politik perempuan di parlemen	12%	12%	12%	24%	24%
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	60,6 %	60,79%	61,8 %	60,55 %	55,88%
5	Persentase tenaga kerja di bawah umur	0%	0%	0%	0%	0%
6	Rasio KDRT	0,15%	0,11%	0,02%	0,09%	0,07%
7	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100%	94%	100%

Sumber: 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Magelang, 2011-2015
2. Kajian Analisis Gender Kota Magelang, 2015

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Rasio KDRT	0,15%	0,060%	0,083%	61,67%	0,04%
2	Indeks Pemberdayaan Gender	75,83	79,2	NA	NA	NA
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					61,67%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator. Pada indikator indeks pemberdayaan gender belum dapat diukur untuk tahun 2017 dikarenakan BPS belum melakukan ; adapun indikator rasio KDRT telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 140,84%.

Capaian Indikator Rasio KDRT

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan mutlak diperlukan dan diupayakan untuk meminimalisir terjadinya kejadian tersebut. Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam lingkungan kehidupan pribadi (Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983). Tindak kekerasan bisa berbentuk kekerasan fisik ataupun psikis, terjadi di ranah publik maupun di lingkup privat atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap anak juga bisa di definisikan sebagai serangkaian tindakan orang tua atau wali dalam pengasuhannya yang membahayakan atau berpotensi bahaya atau memberikan ancaman yang berbahaya bagi anak. Rasio KDRT yang terjadi di Magelang dalam rentang beberapa tahun di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Rasio KDRT Tahun 2011 sd 2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio KDRT	0,15%	0,11%	0,02%	0,09%	0,07%	0,15%	0,083%

Data dari OPD DP4KB dalam Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017-2021 menyebutkan bahwa Korban kekerasan di Kota Magelang pada tahun 2016 mencapai 85 orang. Dari jumlah ini 65 orang merupakan perempuan (50 orang) dan anak (15 anak). Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2015 dimana jumlah

total korban kekerasan mencapai 119 dengan korban perempuan 30 orang dan korban anak mencapai 87 orang. Dilihat dari jenis tindak kekerasan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang paling banyak terjadi dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Pada tahun 2014 terdapat 70 kasus, dan meningkat menjadi 87 di tahun 2015 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 50 kasus KDRT. Sementara data pada tahun 2017 di Kota Magelang terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yaitu sebanyak 38 kasus dengan rincian 2 kasus terjadi pada laki – laki, 17 kasus terjadi pada perempuan dan 19 kasus merupakan KDRT pada anak – anak.

Realisasi kinerja untuk indikator **Rasio KDRT** sebesar 0,083% lebih tinggi 0,023 poin dari yang ditargetkan sebesar 0,060% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 61,67% artinya target kinerja di bawah target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **Rasio KDRT** Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,065% mengalami **peningkatan** sebesar **0,018** poin.

Realisasi kinerja **Rasio KDRT** didapat dengan perhitungan yang di ambil dari definisi operasionalnya adalah Perbandingan antara Jumlah Kasus KDRT terhadap perempuan dan anak yaitu sebesar 36 kasus dengan jumlah rumah tangga yaitu sebanyak 43.328 x 100 %. Hasilnya yaitu sebesar **0,083 %**.

Dengan realisasi sebesar **0,083%**, capaian kinerja dari indikator Rasio KDRT hanya sebesar **61,67%**, capaian ini masih belum mencapai target pada tahun 2017 sebesar 0,060% namun apabila di lihat dari jumlah KDRT terhadap perempuan dan anak, kejadian pada tahun ini jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan tahun 2017

Korban kekerasan banyak dialami perempuan dan anak menggambarkan posisi perempuan yang lemah baik secara fisik dan mental dibandingkan laki-laki. Jenis kekerasan banyak terjadi di lingkup rumah tangga kemungkinan karena adanya pemahaman sebagian masyarakat bahwa suami dibenarkan untuk melakukan kekerasan kepada isteri untuk tujuan mendisiplinkan atau agar patuh dan tunduk pada suami. Bisa juga karena adanya UU KDRT membuat tindak kekerasan yang dahulunya **dipandang sebagai urusan pribadi keluarga** sekarang menjadi urusan publik yang bisa dikenai hukuman pidana sehingga banyak perempuan korban KDRT yang berani melaporkan ke pihak yang berwajib.

Tabel 3.34
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2014-2017

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Anak
2014	5	34	5
2015	2	30	87
2016	20	50	15
2017	2	17	19

Sumber : Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017 -2021, Bappeda. Sumber data DPMP4KB Kota Magelang

Jenis KDRT paling banyak adalah adalah kekerasan psikis (29 kasus pada tahun 2014, meningkat menjadi 46 kasus di tahun 2015 dan menurun menjadi 27 kasus di tahun 2016 dan meningkat di tahun 2017 sebanyak 48 kasus), kekerasan seksual (6 kasus di tahun 2014 dan melonjak menjadi

30 kasus di tahun 2015 dan menurun menjadi 7 kasus di tahun 2016, 8 kasus di tahun 2017), urutan ketiga kekerasan fisik (8 kasus di tahun 2014, menurun menjadi 3 kasus di tahun 2015 dan melonjak menjadi 15 kasus di tahun 2016 dan menurun pada tahun 2017 sebanyak 14 kasus), dan urutan ke empat penelantaran (14 kasus di tahun 2014, 8 kasus di tahun 2015 dan menurun menjadi hanya 1 kasus di tahun 2016. Jumlah di tahun 2017 meningkat sebanyak 10 kasus). Sebagian besar korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Magelang berasal dari keluarga tidak mampu. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan karena mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga (Laporan Akhir Perencanaan Perempuan dan Anak Kota Magelang, Bab III hal. 26). Persoalan ekonomi nampaknya menjadi faktor utama dalam tindak KDRT di Kota Magelang.

Tabel 3.35
Jenis KDRT 2014-2017

No	Jenis Kekerasan	2014	2015	2016	2017
1	Fisik	8	3	15	14
2	Psikis	29	46	27	48
3	Seksual	6	30	7	8
4	Eksplorasi	0	-	-	-
5	Penelantaran	13	8	1	10
6	Trafficking	4	-	-	-
7	Lainnya	10	-	-	-
8	Total	70	87	50	80

Sumber : Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017 -2021, Bappeda. Sumber data DPMP4KB Kota Magelang

Selain perempuan, anak juga rentan menjadi korban tindak kekerasan. Berbagai bentuk kekerasan yang sering dialami anak adalah menjadi korban eksploitasi seksual, anak jalanan, dan anak atau balita yang diterlantarkan. Di Kota Magelang kasus eksploitasi seksual cukup banyak terjadi dengan jumlah yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Namun kecenderungan korban terbanyak dialami oleh anak perempuan. Anak perempuan rawan menjadi korban kekerasan seksual karena posisi perempuan yang lemah secara fisik dibanding laki-laki dan juga ego laki-laki yang ingin menunjukkan maskulinitas dan posisi superiornya dibanding perempuan. Pada tahun 2014 kasus eksploitasi seksual terjadi pada 5 anak laki-laki dan 34 anak perempuan. Selanjutnya pada tahun 2015 menurun menjadi 30 korban yang semuanya anak perempuan dan pada tahun 2016 menurun menjadi hanya 7 korban yang semuanya juga anak perempuan. Kasus eksploitasi seksual sedikit meningkat pada tahun 2017 sebanyak 8 kasus. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.36
Anak Korban Eksploitasi Seksual Tahun 2014-2016

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2014	5	34
2015	0	30
2016	0	7
2017	0	8

Sumber : Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017 -2021, Bappeda. Sumber data DPMP4KB Kota Magelang

Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Magelang juga sudah didukung dengan keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cahaya Magelang. P2TP2A Cahaya Magelang sudah didukung dengan konselor/ psikolog, pengacara dan tokoh agama, selain petugas tetap yang ada. P2TP2A Cahaya Magelang menangani masalah terkait dengan perlindungan anak dan perempuan yang meliputi dari tahap pengaduan, penyelesaian, pendampingan/konseling, mediasi atas kasus - kasus yang menyangkut kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Pelayanan yang diberikan oleh meliputi penanganan pengaduan oleh petugas terlatih (pengaduan melalui unit pelayanan terpadu yaitu P2TP2A), rekomendasi layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dari puskesmas terdekat, layanan pendampingan/rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, layanan bimbingan rohani bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta layanan bantuan hukum. Layanan yang diberikan tidak hanya terbatas untuk warga masyarakat yang berdomosi di Kota Magelang namun juga melayani pengaduan dari masyarakat yang berdomisili di luar Kota Magelang. Layanan yang diberikan juga tidak terbatas melayani Korban KDRT yang terdiri dari anak - anak dan perempuan namun juga melayani korban KDRT laki - laki

Tren positif penurunan rasio KDRT tidak terlepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan korban, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 8);
2. Perda Kota Magelang no 11 tahun 2012 dalam Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
3. Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
4. Peraturan Walikota Magelang nomor 9 tahun 2014 tanggal 5 Februari 2014 tentang RAD KLA

Munculnya kebijakan-kebijakan terkait perlindungan anak tidak terlepas dari upaya mewujudkan Magelang sebagai Kota Layak Anak, yang dicanangkan pada tahun 2011. Hanya setahun setelah pencanangan tersebut Kota Magelang meraih penghargaan sebagai Kota Layak Anak dengan kategori Madya. Selanjutnya pada tahun 2013 disusun RAD Kota Layak Anak Kota Magelang Tahun 2014-2018. Mekanisme monitoring dan evaluasi dalam upaya pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Focused Group Discussion (FGD) Kota Layak Anak dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang.

Meskipun belum mampu memenuhi 31 indikator yang ada dalam lima kluster KLA namun Pemerintah Kota Magelang telah melakukan inisiasi program dan kegiatan untuk pencapaian target di semua kluster tersebut. Beberapa hal penting yang telah dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Akte kelahiran gratis
2. Pembentukan forum anak di setiap kelurahan
3. Pelibatan anak dalam perencanaan pembangunan (dalam konsultasi 6grimin, FGD dan musrenbang RKPD)
4. Pengembangan informasi ramah anak, diantaranya melalui pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling
5. Penetapan Zona Selamat Sekolah
6. Penetapan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Capaian Indikator Indeks Pembedayaan Gender

IPG dan IDG digunakan untuk mengukur pencapaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. IPG mengukur kualitas hidup perempuan dengan menggunakan komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi, sedangkan IDG mengukur partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.

Dengan menggunakan IPG, dapat diketahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG berkisar antara 0% - 100%. Makin tinggi nilai IPG, berarti makin tidak terjadi kesenjangan. Kesetaraan gender terwujud apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Dengan menggunakan IDG, dapat diukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci yaitu dalam partisipasi ekonomi dan politik serta pengambilan keputusan. IDG juga memiliki kisaran nilai 0% - 100%, dengan makin tinggi nilainya berarti semakin tinggi perempuan dalam mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik, atau dapat dikatakan semakin sempurna pemberdayaan perempuannya.

Sejak tahun 1995 hingga 2009 IPG dihitung dengan menggunakan metode lama yang tidak mengukur ketimpangan antar gender yang terjadi namun hanya disparitas dari masing masing komponen IPM untuk setiap gender. Angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM. Pada Tahun 2014, UNDP melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru yang merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. IPG metode baru merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM, dengan menggunakan rasio IPM perempuan dengan laki-laki. (UNDP, 2004).

Dimensi yang digunakan dalam penghitungan masih sama yaitu :

1. Umur panjang dan hidup sehat (eo = angka harapan hidup menurut jenis kelamin)
2. Pengetahuan/pendidikan (HLS dan RLS menurut jenis kelamin)
3. Standar hidup layak (angka pengeluaran perkapita menurut jenis kelamin yang didapat dari data sekunder berupa upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk laki laki dan perempuan).

Perubahan metodologi yang terjadi menyebabkan perubahan interpretasi dari angka IPG. Metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM, semakin kecil

selisih angka IPG dan IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki laki dan perempuan. Dengan metode baru interpretasi angka IPG berubah dengan menggunakan angka 100 yang dijadikan patokan karena angka tersebut merupakan rasio paling sempurna, yaitu semakin kecil jarak IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki laki dan perempuan dan semakin besar jarak angka IPG ke nilai 100, maka makin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki laki dan perempuan.

Data terakhir yang dapat di sajikan untuk mengukur pembangunan dan pemberdayaan gender adalah data IPD dan IDG Tahun 2015. Hal ini merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Sakernas sampel besar untuk prediksi tingkat kabupaten kota adalah tidak dapat dilakukan penghitungan angka IDG yang salah satu indikatornya adalah adanya data tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk perempuan. Maka angka untuk Indeks tersebut hanya tersedia di terakhir di tahun 2015. Sedangkan untuk angka IPG tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan karena akan ada perbaikan metodologi yang sesuai dengan kondisi saat ini

Kondisi IPG dan IDG Kota Magelang bila disandingkan dengan IPM tampak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.37
Nilai IPG, IDG, dan IPM Kota Magelang, Tahun 2010-2015

Tahun	IPG	IDG	IPM
2010	94,16	65,29	73,99
2011	94,83	66,29	74,47
2012	95,14	67,29	75,00
2013	95,36	68,03	75,29
2014	95,45	78,82	75,79
2015	95,81	75,83	76,39
Jateng 2014	91,89		
Indonesia 2014	90,34		

Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

Pencapaian pembangunan gender di Kota Magelang menunjukkan peningkatan dalam 4 tahun terakhir seiring dengan kenaikan IPG dan mendekati angka 100. Hal ini berarti bahwa jarak angka IPG semakin kecil ke nilai 100 yaitu kesetaraan pembangunan antara laki laki dan perempuan sudah tercipta meskipun terus harus diupayakan untuk mendekati kesempurnaan. IPG Kota Magelang meningkat dari 94,16 pada tahun 2010 menjadi 95,45 pada tahun 2014 dan 95,81 di tahun 2015. Nilai IPG ini lebih tinggi daripada indeks pada skala provinsi dan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam 3 dimensi pembangunan di Kota Magelang selama periode 2010-2014 terus mengalami peningkatan.

IPM dan IDG merupakan angka-angka penilaian nasional. Sampai dengan tahun 2015, Angka IPG dan IPM dan IDG memiliki kecenderungan meningkat. Untuk nilai Indeks Pembangunan Gender di Kota Magelang, sampai dengan tahun 2015, memiliki trend yang baik, sedangkan untuk angka IDG masih fluktuatif dan di tahun 2015 ini mengalami sedikit penurunan dibanding 2014 yaitu di angka 75,83. Angka IPM memiliki kecenderungan terus menaik.

Data terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Magelang terus mengalami perbaikan kualitas terlihat dari peningkatan IPG dari 95,45 di tahun 2015 menjadi 95,81. Secara umum peran laki-laki dalam pembangunan manusia di Kota Magelang jauh lebih baik dibandingkan kaum perempuan kecuali dari kualitas kesehatan yang tercermin melalui indikator AHH.

Tabel 3.38
Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Rp .000,-)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	74,52	78,49	13,26	12,88	10,89	9,91	11.868	10.265
2015	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Pemberdayaan gender di tahun 2015 justru mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan IDG ke angka 75,83 setelah di tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal tersebut disebabkan karena penurunan yang cukup besar pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Keterwakilan perempuan di Kota Magelang dalam parlemen di tahun 2014 mencapai 24% hampir memenuhi kuota yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Magelang pada tahun 2014 mencapai 45,02% lebih tinggi dari keterwakilan di parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi dan sosial cukup baik hampir setara dengan laki-laki. Prosentase keterlibatan perempuan di dalam parlemen pada tahun 2015 menurun menjadi 20%, sedangkan persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kota Magelang pada tahun 2015 jumlahnya meningkat yaitu sebesar 45,74% apabila di bandingkan dengan capaian tahun 2014. Hal tersebut terjadi pada prosentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, di mana tahun 2015 naik 0,07% menjadi 41,81%.

Tabel 3.39
Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Data dari BPS menyebutkan bahwa proporsi angkatan kerja perempuan di Kota Magelang dari 45,96% di tahun 2013 terus menurun menjadi hanya 44,53% di tahun 2015. Kondisi tersebut selaras dengan persentase penganggur kaum perempuan yang meningkat dari tahun ke tahun dari 26,10% di tahun 2013 menjadi 34,86% di tahun 2015. Perlu upaya lebih dari Pemerintah Kota

Magelang untuk mendorong peran dan partisipasi perempuan baik sebagai objek maupun subjek pembangunan sehingga optimalisasi kapabilitas kaum perempuan dapat tercapai dengan baik.

Terkait dengan belum adanya data IPG dan IDG yang di hitung dan **publish oleh BPS** pada **tahun 2017** sebagaimana telah di sebutkan di atas maka di bawah ini kami sajikan beberapa data yang dapat merepresentasikan kondisi pemberdayaan gender di Kota Magelang, sebagai berikut:

Keterlibatan perempuan dalam parlemen merupakan salah satu indikator komposit partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik pada Gender Empowerment Measure (GEM)/ Indeks Pemberdayaan Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik yang akan diambil benar-benar adil bagi perempuan maupun laki-laki. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pengambilan keputusan, antara lain:

Tabel 3.40
Partisipasi Perempuan Legislatif Tahun 2014-2017

Partai	2014		2015		2016		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1. PDI-Perjuangan	5	2	6	1	6	1	6	1
2. Partai Golongan Karya	3	1	3	1	2	1	3	1
3. Partai Keadilan Sejahtera	3	0	3	0	3	0	3	0
4. Partai Demokrat	2	1	2	1	2	1	2	1
5. Partai Kebangkitan Bangsa	2	0	2	0	2	0	2	0
6. Partai Gerakan Indonesia Raya	1	1	1	1	1	1	1	1
7. Partai Hati Nurani Rakyat	1	1	1	1	1	1	1	1
8. Partai Amanat Nasional	1	0	1	0	1	0	1	0
9. Partai Nasional Demokrat	1	0	1	0	1	0	1	0
Total	19	6	20	5	19	5	20	5
Persentase	76%	24%	80%	20%	76%	24%	80%	20%

Sumber: DataGo Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang, sumber data DPRD Kota Magelang

Data ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bagi partai politik dengan suara terbanyak akan memberikan peluang bagi perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Bahkan ada kecenderungan partai politik yang relatif lebih baru memiliki keterwakilan politik berimbang antara laki-laki dan perempuan (50:50%), yaitu partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Data yang tersaji dalam Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017-2021 Jumlah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kota Magelang pada tahun 2015 laki-laki berjumlah 4 orang dan hakim perempuan 6 orang. Dari perspektif gender, keberadaan hakim perempuan diharapkan bisa memberikan keputusan yang lebih adil terhadap kasus-kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Kota Magelang. Jumlah jaksa yang bertugas di Kota Magelang pada tahun 2017 sebanyak 15 orang,

terdiri atas 10 laki-laki dan 5 perempuan. Proporsi Jaksa laki-laki dan perempuan 2:1. Peran kemitraan pemerintah kota Magelang dengan kejaksaan dalam hal pengarusutamaan gender sudah baik. Strategi yang dijalankan oleh kejaksaan dalam bermitra yaitu: (i) pelayanan hukum, termasuk konsultasi kasus hukum, (ii) penerangan dan penyuluhan hukum. Termasuk dalam layanan ini adalah penerangan layanan hukum untuk korban KDRT dan kekerasan anak.

Jumlah polisi laki-laki di Kota Magelang pada tahun 2014 sampai 2016 jauh lebih banyak daripada perempuan. Pada tahun 2014 terdapat 550 orang polisi, 510 orang diantaranya (92,7%) adalah laki-laki. Pada tahun 2015 terdapat sebanyak 601 orang, 90,8% nya adalah laki-laki. Dan pada tahun 2016 terdapat 678 orang polisi, 91,2% nya adalah laki-laki. Data pada tahun 2017 terdapat 789 orang dengan personil polisi perempuan sebanyak 82 orang. Dengan demikian terjadi kesenjangan gender yang cukup besar karena jumlah polisi perempuan tidak mencapai 10%.

Tabel 3.41
Jumlah Polisi di Kota Magelang pada Tahun 2014-2017

Tahun	Jumlah		Persentase	
	L	P	L	P
2014	510	40	92,7 %	7,3 %
2015	546	55	90.8 %	9,2
2016	618	60	91,2 %	8,8
2017	707	82	89.6 %	10.4

Sumber: Polres Magelang Kota Magelang, 2017

Representasi perempuan dalam pengambilan keputusan selain dilihat dari perempuan dalam parlemen, juga bisa dilihat pada perempuan dalam pemerintahan di Kota Magelang di berbagai level.

Berdasarkan data yang diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Magelang, pada Tahun 2014 hingga 2017 menunjukkan data tentang PNS perempuan sebagai berikut:

Tabel 3.42
Jumlah Pegawai dalam Jabatan Struktural dan Non struktural di Kota Magelang Tahun 2014-2017

Jabatan	2014		2015		2016		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Struktural	314 (16.7%)	261 (11.5%)	307 (16.7%)	293 (16.7%)	293 (16.7%)	240 (11.02%)	293 (21.19%)	225 (12.67%)
Non Struktural	1.565 (83,3%)	2.015 (88,5)	1.530 (83,3%)	1.461 (83,3%)	1.461 (83,3%)	1.938 (88.98%)	1.090 (78.81%)	1.551 (87.33%)
Jumlah	1.879 (100%)	2.277 (100%)	1.837 (100%)	1.754 (100%)	1.754 (100%)	2.178 (100%)	1.383 (100%)	1.776 (100%)

Sumber: Data Pilah Gender Kota Magelang, 2014-2017

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah pegawai perempuan di Kota Magelang selalu lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun representasi mereka

sebagai pejabat struktural selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan perbandingan 11.5 % perempuan berbanding 16.7 laki-laki pada tahun 2014 dan 2015, dan 11.0% berbanding 16.7% pada tahun 2016. Jumlah pegawai pada tahun 2017 lebih sedikit apabila di bandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 banyak pegawai yang memasuki masa pensiun dan adanya mutasi guru SMA dari Pemerintah Kota Magelang ke Propinsi Jawa Tengah. Kondisi pada tahun 2017 dengan jumlah total pegawai yang lebih sedikit apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan struktural, dari yang sebelumnya 11.02% di tahun 2016 meningkat menjadi 12.67%. Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah adalah perlu telaah lebih jauh, apakah data ini menunjukkan masih adanya konstruksi sosial budaya yang belum menganggap pentingnya perempuan menduduki jabatan struktural sehingga menghambat akses perempuan untuk menduduki jabatan struktural tersebut, atau memang karena perempuan belum berhasil memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menduduki jabatan struktural.

Jumlah PNS menurut pendidikan mencerminkan akses bagi pengembangan karir pegawai. Profil pegawai pemerintah Kota Magelang menurut pendidikan sebagai berikut.

Tabel 3.43
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin
di Kota Magelang Tahun 2014-2017

PENDIDIKAN	2014			2015			2016			2017
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	Jumlah
SD	133	10	143	131	10	141	126	10	136	121
SLTP	169	38	207	169	39	208	64	36	173	150
SLTA	389	326	715	379	306	685	349	277	653	591
Diploma 1 dan Diploma 2	80	156	236	63	117	273	49	91	140	127
Diploma 3	122	337	459	133	360	483	128	351	479	455
Diploma 4 dan sarjana	819	1.302	1.121	784	1.306	2.090	735	1.261	1.996	1.454
Pasca Sarjana	167	108	275	193	139	1765	203	153	356	261
Jumlah	1.879	2.277	4.156	1.852	2.277	4.129	1.754	2.179	3.933	3.159
%	45,21%	54,79%	100%	44,85%	55,15%	100%	44,60%	55,40%	100%	100%

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2017

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PNS di Kota Magelang mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2016 dari 4.156 orang menjadi 3.933 orang. Jumlah ini juga mengalami penurunan pada tahun 2017. Dilihat menurut jenis kelaminnya, proporsi PNS perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki dengan perbandingan sekitar 45% berbanding 55%. Dilihat dari latar belakang pendidikannya, jumlah terbanyak PNS adalah berpendidikan sarjana. Yang menarik dari data ini adalah jumlah perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Dengan latar belakang pendidikan ini, mestinya perempuan mempunyai kesempatan yang lebih besar pula untuk menduduki jabatan golongan pangkat dan jabatan struktural yang lebih tinggi.

Jumlah PNS menurut golongan mencerminkan akses bagi pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi pegawai dari sisi golongan semakin tinggi tanggungjawab pengambilan keputusan, dan itu berarti semakin tinggi pengaruhnya dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik. Profil pegawai pemerintah Kota Magelang menurut golongan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Jumlah Pegawai menurut Golongan dan Jenis Kelamin di Kota Magelang Tahun 2014-2016

GOLONGAN	2014			2015			2016			Jumlah
	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	
Golongan I	182	17	199	151	13	164	121	11	132	107
Golongan II	380	399	779	417	360	777	425	332	757	695
Golongan III	792	1174	1966	768	1213	1981	736	1197	1933	1.586
Golongan IV	525	687	1.212	516	691	1.207	472	639	1.111	771
Jumlah	1.879	2.277	4,156	1.852	2.277	4,129	1.754	2.179	3,933	3.159

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan tahun 2017

Jika dilihat menurut golongan kepangkatannya diketahui bahwa sebagian besar PNS menduduki golongan III, diikuti dengan golongan IV, golongan II dan golongan I. Dilihat proporsi jenis kelaminnya dapat diketahui bahwa pada golongan III dan IV, proporsi perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, baik pada tahun 2014, 2015 hingga 2016. Dengan latar belakang golongan ini, mestinya peluang perempuan untuk menduduki jabatan eselon yang lebih tinggi semakin besar.

Data tersebut di atas merupakan gambaran representasi dari pemberdayaan perempuan di Kota Magelang. Penghargaan yang cukup prestisius pada skala nasional dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah telah diterima oleh Pemerintah Kota Magelang dengan keberhasilannya meraih penghargaan Parahita Ekapraya Tingkat Pratama pada tahun 2006, dilanjutkan anugerah tingkat utama (Parahita Ekapraya Tingkat Utama) di tahun 2007 yang dipertahankan sampai dengan tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2011 sampai 2015, Pemerintah Kota Magelang selalu mendapatkan anugerah, kali ini tingkat menengah (Parahita Ekapraya Madya).

Kemudian untuk memberikan gambaran terkait indikator indeks pembangunan gender dilakukan pendekatan dengan melakukan pengukuran atas partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun partisipasi perempuan di lembaga swasta dengan hasil sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	11,05%	17%	6,37%	37,48%	30%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	13,94%	20%	14,41% N	72,05%	35%

Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Sejak tahun 2011-2015, terjadi fluktuasi tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah, hal ini lebih disebabkan karena adanya mutasi dan pensiun yang eksis pada tahun tahun dimaksud. Pada tahun 2011 angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 15,70% kemudian sedikit naik pada tahun 2012 menjadi 15,75% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 15,67%. Angka ini pada tahun 2014 adalah mencapai 15,94% atau naik 0,33% dari tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan menjadi 13,15 %. Upaya affirmative action atas partisipasi perempuan harus terus dioptimalkan.

Tabel 3. 45
Capaian Kinerja Indikator Partisipasi Perempuan
Di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	15.70%	15,75%	15,67%	15,94%	13,15%	11.05%	6,37%

Realisasi kinerja untuk indikator **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah** sebesar 6,37% lebih rendah 10,63 poin dari yang ditargetkan sebesar 17,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 37,48% artinya target kinerja belum dapat tercapai.

Realisasi kinerja **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah** Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 11,05% mengalami **penurunan** sebesar **4,68** poin.

Kinerja indikator ini belum memuaskan bahkan cenderung berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini bahkan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir ini. Menurunnya capaian pada tahun 2017 salah satunya di pengaruhi oleh banyaknya pegawai yang pensiun serta mutasi guru SMA dari Pemerintah Kota Magelang ke Pemerintah Jawa Tengah. Selain itu kebijakan moratorium penerimaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang dalam beberapa tahun terakhir ini membawa pengaruh terhadap ketidaktercapaian indikator ini

Kinerja indikator ini juga mendapat beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan kapasitas bagi perempuan rentan terkendala keterbatasan anggaran;
2. Partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta tidak dapat diintervensi langsung melalui program/kegiatan.

Dari sisi partisipasi perempuan dalam bekerja maka hal ini dapat tergantung dari ketersediaan lapangan kerja. Ditambah lagi dengan faktor kultur budaya yang berbunyi “laki-laki sebagai pencari nafkah” dan “perempuan sebagai pengelola rumah tangga” menjadi penyebab kurangnya perempuan dalam dunia kerja utama. Perempuan (istri) bekerja cenderung sebagai pekerjaan sampingan untuk menunjang penghasilan laki-laki (suami).

Dari sisi kesetaraan, maka indikator kinerja yang ditetapkan seharusnya dapat membandingkan antara proporsi laki-laki dan perempuan dalam bekerja. Hal ini akan tergantung pada kebijakan lembaga/lapangan kerja yang ada. Pada umumnya kebijakan lembaga/lapangan kerja akan mengutamakan kompetensi/kesesuaian pekerjaan yang tersedia daripada masalah gender. Artinya berbagai kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi perempuan pada lapangan pekerjaan yang ada masih kalah dibandingkan laki-laki ;
2. Sebagian besar lapangan pekerjaan yang ada cenderung lebih tepat untuk laki-laki.

Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Pada lembaga swasta, keterlibatan perempuan pada lembaga swasta cukup berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini meskipun secara umum terjadi peningkatan sebesar 6,05% antara tahun 2011 hingga 2015, meskipun partisipasi angkatan kerja perempuan menurun 4,18% pada periode tersebut. Nampak bahwa terjadi peningkatan kapasitas perempuan, terutama dilihat dari aspek tingkat pendidikan, sehingga semakin mampu bersaing dengan laki-laki. Penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam hal ini terjadi karena semakin banyak perempuan yang memilih meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada bekerja. Gambaran capaian indikator partisipasi perempuan di lembaga swasta dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.46
Capaian Kinerja Indikator Partisipasi Perempuan
di Lembaga Swasta Tahun 2011-2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	10,68%	9,81%	14%	15,67%	16,73%	13,94%	14,41%

Adapun distribusi perempuan yang bekerja di lembaga swasta meliputi mereka yang bekerja di bidang industri, karyawan swasta, arsitek, konsultan, penyiar radio, jasa dan notaris. Kemandirian wanita dan peran sertanya di dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga relatif cukup besar.

Realisasi kinerja untuk indikator **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta** sebesar 14,41% lebih rendah 5,59 poin dari yang ditargetkan sebesar 20,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 72,05% artinya target kinerja belum tercapai.

Realisasi kinerja **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta** Tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 13,94% mengalami **peningkatan** sebesar 0,47 poin.

Apabila dilihat dari target pada RPJM 2016-2021, target akhir periode RPJMD yaitu pada tahun perencanaan Tahun 2021 sebesar 35%, maka capaian pada tahun 2017 masih sangat jauh sehingga memerlukan upaya keras untuk mencapai target indikator pada akhir periode perencanaan. Sehingga diperlukan kajian, cara, metode dan strategi untuk dapat mencapai sasaran sehingga target dapat tercapai.

Sama halnya dengan indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintah kinerja indikator ini juga mendapat beberapa kendala antara lain terkait dengan ketersediaan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan penguatan kapasitas bagi perempuan serta kendala terkait dengan tidak bisa diintervensinya partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta karena partisipasi perempuan dalam bekerja maka hal ini dapat tergantung dari ketersediaan lapangan kerja.

Beberapa permasalahan di dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (**Dokumen Perencanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Magelang Tahun 2017-2021**), yaitu: a). Masih perlunya peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat sebagai dampak dari nilai sosial dan budaya masyarakat Jawa pada umumnya; b). Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik; c) Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak; d) Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; e) Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan f) Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak masih belum memadai. Selain hal tersebut beberapa permasalahan yang juga perlu mendapat perhatian di dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu : a). Masih adanya perbedaan persepsi atas peran/kedudukan, partisipasi, pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak; b). Masih adanya perbedaan persepsi atas Definisi/kriteria kekerasan terhadap perempuan dan anak; c). Masih rendahnya porsi/peran/partisipasi perempuan dalam kebijakan pembangunan; d). Kurangnya fasilitasi pemerintah dalam hal pembiayaan dan proses penyelesaian visum maupun pengecekan DNA bagi korban pemerkosaan dan visum atas korban KDRT.

Upaya yang perlu dilakukan pada penyelenggaraan urusan ini terutama pada perencanaan tahun yang akan datang adalah :

1. Mempertahankan capaian kinerja yang sudah baik, utamanya dalam hal :
 - Sosialisasi, pembinaan/penyuluhan, koordinasi dan kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak guna mewujudkan ketahanan keluarga;
 - Menjaga, mencegah, mengantisipasi hingga menangani terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tindak perdagangan orang dan eksploitasi anak;
 - Secara intensif melakukan pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut kebijakan guna mewujudkan pemberdayaan perempuan yang lebih baik;
 - Mempertahankan Anugerah Parahita, Kota Layak Anak dan penghargaan/status lainnya sebagai bagian dari citra (visi) Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas dilandasi masyarakat yang Sejahtera dan Religius.
2. Mengintensifkan koordinasi/kerjasama/kemitraan antar lembaga, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Meningkatkan/memutakhirkan sarana prasarana, fasilitas, sistem/prosedur dan database pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Meningkatkan pemberian pelatihan ketrampilan baik teknis maupun manajerial kepada perempuan dalam rangka meningkatkan kapasitas/kompetensinya.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 847.294.045,00 dari anggaran sebesar Rp 871.435.000,00 atau 97,23% dari target. Realisasi keuangan sebesar 97,23% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 61,67%, maka terjadi belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

14. Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan

Kebudayaan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan nasional. Selain merupakan salah satu unsur yang mampu menarik kunjungan wisata, budaya juga merupakan jati diri bangsa yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Pembangunan di bidang budaya, meliputi beberapa unsur diantaranya kesenian, tradisi, sejarah dan kepurbakalaan. Keempat unsur tersebut adalah cerminan hasil budaya yang berkembang di masyarakat. Pengembangan nilai budaya diharapkan mampu mendasari pola pikir, sikap dan tindakan budaya luhur bangsa seperti kejujuran, saling menghormati, tepo seliro, gotong royong dan nilai-nilai positif lainnya. Pengembangan keragaman dan kekayaan budaya seyogyanya dapat diarahkan pada pengembangan khasanah budaya dalam bentuk kesenian serta tradisi dalam masyarakat yang bisa memberikan daya tarik dibidang industri pariwisata.

Tabel 3.47
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan Jenis Kesenian dan Adat Budaya yang Dikembangkan dan Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan

No.	Indikator Kinerja	Capaian 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	13,96%	14,00%	15,00%	107,14%	16,00%
2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	0	5	35	700%	25
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					403,57%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator. Dari dua indikator tersebut telah melampaui target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 403,57%.

Capaian Indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang Difasilitasi/Dibina dan Dikembangkan

Realisasi kinerja indikator **persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan** sebesar 15,00% lebih tinggi 0,14 poin dari yang ditargetkan sebesar 14,86% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,94% artinya realisasi kinerja melampaui target.

Realisasi kinerja **persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 13,96% **meningkat** sebesar 1,04 poin.

Dari data tentang seni budaya yang tersedia, jumlah organisasi kesenian tahun 2017 di Kota Magelang sebanyak 222 kelompok seni budaya, yang terbagi menurut seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa, seni drama, dan seni lainnya. Kelompok-kelompok seni budaya tersebut terdiri dari antara lain: jathilan, calung, keroncong, campursari, rebana, samroh, dangdut, pop, kuda lumping, topeng ireng, kesenian reog, grasak, dayakan, barongsai, kuntulan, kubrosiswo, tarian klasik/modern, paduan suara, geguritan, seni rupa, seni lukis, kethoprak, teater, dagelan, perfilman, dan wayang kulit.

Kelompok seni budaya tersebut tersebar di kelurahan (186 kelompok), binaan sekolah (24 kelompok), dan binaan institusi / lainnya (12 kelompok). Jumlah ini masih belum akurat, karena dimungkinkan masih terdapat kelompok kesenian yang belum terdata, seperti kelompok marching band di sekolah-sekolah. Pengelompokan jumlah seniman juga masih terkendala oleh belum jelasnya definisi dan kriteria seseorang dapat disebut sebagai seniman, selain itu, seorang seniman bisa saja menekuni beberapa bidang seni.

Selain kelompok seni budaya, di Kota Magelang, juga terdapat benda dan/atau bangunan cagar budaya, yang terdiri dari bangunan-bangunan kuno, arsitektur kuno, petilasan, tempat-tempat ziarah, dan sebagainya, yang berjumlah 31 buah.

Permasalahan dalam memfasilitasi/membina dan mengembangkan kelompok seni di Kota Magelang antara lain :

1. Belum tersedia/adanya gedung kesenian di Kota Magelang;
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian.

Upaya/solusi dalam memfasilitasi/membina dan mengembangkan kelompok seni di Kota Magelang :

1. Perlunya dukungan anggaran untuk pembangunan gedung kesenian;
2. Peningkatan kualitas dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian.

Capaian Indikator Perlindungan Situs atau Bangunan Cagar Budaya

Realisasi kinerja untuk indikator perlindungan situs atau bangunan cagar budaya menunjukkan hasil yang sangat tinggi, perlindungan situs atau bangunan cagar budaya apabila dikembangkan akan merupakan salah satu unsur ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata. Saat ini hasil pendataan hingga Tahun 2017 perlindungan situs atau bangunan cagar budaya di Kota Magelang sebanyak 35 situs/bangunan. Jumlah tersebut dimungkinkan masih bertambah, mengingat upaya pendataan dan penelusuran masih terus dilaksanakan. Adapun data Situs/Cagar Budaya di Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel. 3.48
Situs/Cagar Budaya di Kota Magelang

No	Cagar Budaya	Jenis	Alamat
1	Pasturan St Antonius	Bangunan Kolonial	Jl. Laksda Yos Sudarso
2	Gereja St Antonius	Bangunan Kolonial	Jl. Laksda Yos Sudarso
3	Gereja GPIB	Bangunan Kolonial	Jl. Alun-Alun Utara 4
4	Gereja Kristen Jawa Magelang	Bangunan Kolonial	Jl. Tentara Pelajar 106
5	SMK (SMIP) Wiyasa	Bangunan Kolonial	Jl. Tidar 36
6	SMP Negeri 1 Magelang	Bangunan Kolonial	Jl. Pahlawan 66
7	Kantor Eks Karesidenan Kedu Wil II Jateng	Bangunan Kolonial	Jl. Diponegoro 1
8	Kantor Koord Pembangunan Wil II Jateng	Bangunan Kolonial	Jl. Diponegoro 1
9	Kantor Catatan Sipil	Bangunan Kolonial	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C
10	Kantor Pekerjaan Umum	Bangunan Kolonial	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C
11	Kantor Transmigrasi	Bangunan Kolonial	Jl. Laksda Yos Sudarso 31 C
12	Eks Kantor Penerangan Pertanian	Bangunan Kolonial	Jl. Kartini 2
13	Eks Bangunan Asuransi Bumi Putera 1912	Bangunan Kolonial	Jl. Tentara Pelajar (Jl. A.Yani 41)
14	Polresta Magelang Kota	Bangunan Kolonial	Jl Alun-Alun Selatan
15	Sekolah Calon Bintara (Secaba)	Bangunan Kolonial	Jl Pahlawan
16	Kesatrian Diponegoro	Bangunan Kolonial	Jl Kesatrian
17	Pondok Sriti	Bangunan Kolonial	Kesatrian Wetan
18	Kodim 0705	Bangunan Kolonial	Jl RS. Tentara
19	Polwil Kedu	Bangunan Kolonial	Jl Ahmad Yani
20	RSJ Prof. Dr. Soerojo	Bangunan Kolonial	Jl A. Yani 169
21	Komplek RSU Tidar	Bangunan Kolonial	Jl Tidar
22	Bangunan UGD	Bangunan Kolonial	Jl Tidar
23	Rumah Sakit Tentara	Bangunan Kolonial	Jl RS. Tentara
24	Mess Tentara	Bangunan Kolonial	Jl Teuku Umar
25	Gedung Bunder	Bangunan Kolonial	Jl Sriwijaya
26	Rumah Tinggal	Bangunan Kolonial	Jl Tentara Pelajar
27	Rumah Tinggal	Bangunan Kolonial	Jl Ade Irma Suryani C.6

No	Cagar Budaya	Jenis	Alamat
28	Museum Jend. Sudirman	Bangunan Kolonial	Jl Ade Irma Suryani C.7
29	Rumah-rumah Tinggal di komplek Kwarasan	Bangunan Kolonial	Kel. Cacaban Kec. Magelang Tengah
30	Menara Air Minum	Bangunan Kolonial	Aloon-aloon Kota
31	Pleungkung	Bangunan Kolonial	Jl A.Yani
32	Wisma Diponegoro	Bangunan Kolonial	Jl A.Yani
33	Laboratorium Klinik Prima	Bangunan Kolonial	Jl A. Yani
34	Gerbang rekoff	Bangunan Kolonial	Jl Iklas
35	Eks Stasiun Kebon Polo	Bangunan Kolonial	Jl Kebon Polo

Realisasi kinerja indikator **perlindungan situs atau bangunan cagar budaya** sebesar 35 situs/BCB lebih tinggi 30 situs/BCB dari yang ditargetkan sebesar 5 situs/BCB dengan tingkat capaian kinerja sebesar 700.00% artinya realisasi kinerja melampaui target.

Realisasi kinerja **perlindungan situs atau bangunan cagar budaya** 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0 situs/BCB **meningkat** sebesar 35 poin.

Permasalahan dalam Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya di Kota Magelang adalah :

1. Belum adanya Peraturan Walikota tentang Cagar Budaya.
2. Belum optimalnya pendokumentasian Cagar budaya dengan baik karena belum ada Tim Ahli Cagar Budaya yang bersertifikasi dan mengakibatkan belum berjalannya Sistem Register Cagar Budaya.
3. Masih kurangnya perhatian terhadap kondisi dan pengembangan museum dan pusat informasi sejarah.
4. Belum optimalnya pengembangan dan promosi karya kreatif seniman lokal agar memiliki manfaat dan nilai ekonomi tinggi.
5. Kurangnya bahan literatur, terbatasnya dokumentasi serta narasumber terkait sejarah dan legenda kota Magelang.

Upaya/Solusi :

1. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Cagar Budaya di Kota Magelang.
2. Mendorong dan mengoptimalkan kajian serta penelusuran kebudayaan, sejarah dan legenda seputar Kota Magelang dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan pemerhati sejarah dan kebudayaan;
3. Mendorong berkembangnya event-event kebudayaan dan kesenian dengan melibatkan peran aktif seniman lokal Magelang;

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya;
4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.982.429.000,00 dari anggaran sebesar Rp 2.184.154.000,00 atau 90,76% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,76% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 403,57%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

15. Sasaran Pertumbuhan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertumbuhan
Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang Potensial

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Jumlah Wisatawan					
	a. Nusantara	1.139.585	1.136.435	1.283.462	112,94%	1.143.954
	b. Mancanegara	6.793	5.185	6.812	131,38%	5.219
2	Lama Tinggal Wisatawan	2-3 hari	2-3 hari	2-3 hari	100%	2-4 hari
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					114,77%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 3 indikator yang, dengan realisasi kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 111,35%.

Capaian Indikator Jumlah Wisatawan

Capaian Indikator Jumlah wisatawan terbagi atas:

a. Jumlah Wisatawan Nusantara

Realisasi kinerja indikator **jumlah wisatawan nusantara** sebesar 1.283.462 wisatawan nusantara lebih tinggi 147.027 wisatawan dari yang ditargetkan sebesar 1.136.435 wisatawan nusantara dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,75% artinya realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **jumlah wisatawan nusantara** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.139.585 wisatawan nusantara **meningkat** sebesar **143.877** wisatawan.

b. Jumlah Wisatawan Mancanegara

Realisasi kinerja indikator **jumlah wisatawan mancanegara** sebesar 6.812 wisatawan mancanegara lebih tinggi 1.627 wisatawan dari yang ditargetkan sebesar 5.185 wisatawan

mancanegara dengan tingkat capaian kinerja sebesar 131,38% artinya realisasi kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **jumlah wisatawan mancanegara** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 6.793 wisatawan mancanegara **meningkat** sebesar **19** wisatawan.

Capaian Lama Tinggal Wisatawan

Realisasi kinerja indikator **lama tinggal wisatawan** sebesar 2-3 hari dari yang ditargetkan sebesar 2-3 hari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% artinya realisasi kinerja mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **lama tinggal wisatawan** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2-3 hari artinya kinerja dapat dipertahankan.

Kondisi geografis dan luasan wilayah Kota Magelang yang sangat terbatas sekitar 18,12 km², kondisi ini merupakan tantangan dalam upaya pengembangan dan penambahan destinasi wisata baru. Potensi pengembangan destinasi wisata diantaranya Kawasan Gunung Tidar, museum-museum, bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda, pengembangan kampung wisata, kawasan wisata kuliner serta pengembangan kawasan sport center di sekitar GOR SAMAPTA kedepan bisa dijadikan alternatif pengembangan kunjungan wisata olah raga dan kebugaran. Penyelenggaraan event-event festival budaya dikaitkan dengan hari jadi Kota Magelang dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia mampu mendorong peningkatan potensi pariwisata di Kota Magelang.

Kawasan Wisata Religi Gunung Tidar dan Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng sebagai destinasi wisata unggulan mampu memberikan kontribusi dalam menarik minat dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Guna menjaga kondisi yang sudah baik upaya inovasi dan aktivitas kreatif untuk memberikan kepuasan bagi wisatawan perlu dijaga dan dikembangkan. Upaya yang dilakukan melalui pembenahan, perawatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta event-event seni budaya di obyek wisata sehingga memberikan nilai lebih dibandingkan dengan obyek wisata di daerah lain.

Penyelenggaraan Car Free Day di kawasan Lapangan Rindam terbukti menarik banyak pengunjung dan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari waktu ke waktu. Perhatian masyarakat pada event Car Free Day ternyata memberikan dampak yang cukup baik diantaranya bagi usaha mikro kecil dan menengah, sebagai salah satu destinasi aktifitas wisata olah raga dan belanja.

Meskipun indikator kinerja sasaran telah mencapai target, namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Destinasi wisata yang diunggulkan saat ini adalah Gunung Tidar, Mantyasih dan Desa Wisata Tidar Campur. Ketiganya masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi untuk semakin layak sebagai unggulan. Sehingga memerlukan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai

pihak antara lain melalui keterlibatan CSR dalam mewujudkan Desa Wisata, Kampung Pelangi maupun pengembangan destinasi wisata lainnya.

2. *Tourist Information Center* (TIC) secara fisik maupun non fisik masih belum ideal. Website informasi pariwisata saat ini juga pasif dan perlu di *up date* secara rutin, perlu dikemas agar lebih menarik dan informative/promotif. TIC belum menyediakan *tour guide* untuk wisatawan, sehingga wisatawan berkunjung tanpa pengarahan resmi dan hanya mengandalkan biro jasa yang bisa jadi informasi yang diberikan kurang lengkap, kurang akurat.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.952.195.587,00 dari anggaran sebesar Rp 2.080.494,00 atau 93,83% dari target. Realisasi keuangan sebesar 93,83% % dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 114,77%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

16. Sasaran Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terbentuknya Karakter Religius Masyarakat
Sebagai Landasan Moral dan Etika Pembangunan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	3%	3%	1,06%	35,33%	3%
2	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					67,67%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 2 indikator, dengan 1 indikator belum mencapai target yang ditetapkan yaitu prosentase penurunan penyakit masyarakat. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 67,66%.

Capaian Indikator Prosentase Penurunan Penyakit Masyarakat

Realisasi kinerja indikator **prosentase penurunan penyakit masyarakat** sebesar 1,06% lebih rendah 1,94 poin dari yang ditargetkan sebesar 3% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 35,33% artinya realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **prosentase penurunan penyakit masyarakat** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 3% **turun 1,94 poin**.

Hal ini terjadi karena terdapat penurunan pelanggaran penyakit masyarakat sebanyak 3 (tiga) kasus, dimana pada tahun 2016 terdapat 283 kasus dan pada tahun 2017 menjadi 280 kasus.

Kondisi di Tahun 2016 penurunan pelanggaran penyakit masyarakat sebanyak 9 (sembilan) kasus, dimana pada tahun 2015 terdapat 292 kasus dan pada tahun 2016 menjadi 283 kasus. Realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 3% jauh lebih baik jika dibandingkan tahun 2015 sebesar -2,13%.

Adapun indikator sasaran ini dicapai melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dengan capaian pada tahun 2017 sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	OPD	JUMLAH KASUS
1	Operasi PGOT	Disnakertransos	76
2	Sidak Pelajar	Dinas Pendidikan	26
3	Operasi Pekat	Satpol PP	178
JUMLAH			280

Kendala yang perlu diantisipasi:

1. Kerahasiaan informasi pelaksanaan kegiatan operasi penyakit masyarakat perlu ditingkatkan, agar mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Penanganan setelah terjaring kegiatan-kegiatan penyakit masyarakat masih dalam tahapan pembinaan sehingga banyak pelaku yang masih mengulangi perbuatannya.

Solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Perlu persiapan yang lebih terencana sehingga informasi terjaga kerahasiannya sampai dengan hari-H pelaksanaan kegiatan operasi penyakit masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan penyamaan persepsi kepada pelaksana kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Perlu penerapan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku.

Gambar 3.5
Pelaksanaan Kegiatan Operasi Penyakit Masyarakat



Capaian Indikator Tingkat Kerukunan Hidup Umat Antar Suku, Adat, Ras dan Agama

Realisasi kinerja indikator **tingkat kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama** sebesar 100% sama dengan yang ditargetkan sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% artinya realisasi kinerja mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **tingkat kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 100% artinya kinerja dapat dipertahankan.

Pada tahun 2017 tidak terjadi konflik bernuansa SARA di Kota Magelang demikian pula pada tahun 2016. Namun demikian untuk menjaga kondusivitas daerah, mengingat saat ini berbagai macam informasi mudah didapat oleh masyarakat, maka peran FKUB, FPBI dan FKDM perlu dioptimalkan. Di samping itu kegiatan dialog wawasan kebangsaan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, generasi muda, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik perlu dilakukan secara intensif.

Demikian pula kegiatan verifikasi dan pembinaan terhadap ormas yang ada perlu terus ditingkatkan agar terpantau ormas-ormas yang terindikasi melakukan penyimpangan dan dapat segera dilakukan langkah-langkah antisipasi.

Gambar 3.6
Dialog Peningkatan Wawasan Kebangsaan



Magelang

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
4. Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 629.409.800,00 dari anggaran sebesar Rp 696.791.000,00 atau 90,33% dari target. Realisasi keuangan sebesar 90,33% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 67,67%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

17. Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat

Hasil pengukuran atas indikator sasaran tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.51
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Lingkungan Kondusif
yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman Bagi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017	% Capaian Kinerja	Target Akhir RPJMD
1	Angka kriminalitas	14,02	13,14	13,31	98,67%	11,14%
2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	90,48%	90%	100,00%	111,11%	100,00%
3	Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	98,00%	94,50	100,00%	105,82%	98,00%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					105,21%	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk mengukur sasaran ini terdapat 3 indikator. Realisasi kinerja untuk 2 indikator telah melampaui target. Sedangkan 1 indikator masih berada di bawah target. Adapun rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 105,21%.

Capaian Indikator Angka Kriminalitas

Realisasi kinerja indikator **angka kriminalitas** sebesar 13,31% lebih tinggi 0,17 poin dari yang ditargetkan sebesar 13,14% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,67% artinya realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **angka kriminalitas** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 14,02% **turun 0,71** poin.

Nilai capaian tersebut didapat dari jumlah tindak kriminalitas yang terjadi selama 1 tahun bersangkutan dibagi jumlah penduduk tahun bersangkutan dikali 10.000. Besaran nilai capaian tersebut karena jumlah kriminalitas yang terjadi pada tahun 2017 turun 8 (delapan) kasus

dibandingkan dengan jumlah kasus kriminalitas pada tahun 2016. Target yang diharapkan pada tahun 2017 adalah terjadi penurunan jumlah kasus kriminalitas minimal sebanyak 10 (sepuluh) kasus.

Jika dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun 2016 maka dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 1,42%, karena nilai capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 97,25%. Target yang diharapkan adalah terjadi penurunan kasus kriminalitas minimal sebanyak 6 (enam) kasus setiap tahunnya dari jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 171 kasus.

Disamping itu sedikit banyak capaian kinerja juga dipengaruhi dengan jumlah penduduk yang selalu berkembang secara dinamis setiap tahunnya. Namun demikian besaran jumlah penduduk yang digunakan untuk penghitungan setiap tahunnya berdasarkan data *release* dari BPS.

Berikut ditampilkan perkembangan jumlah kasus kriminalitas dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus terselesaikan	% kasus selesai
2012	184	134	72,83
2013	132	90	68,18
2014	149	108	72,48
2015	171	134	78,36
2016	170	120	70,58
2017	162	118	72,84%

Beberapa kendala yang perlu diantisipasi antara lain:

1. Kurangnya kuantitas patroli terpadu untuk meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan siskamswakarsa.

Untuk kedepannya kegiatan-kegiatan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kriminal dapat lebih dioptimalkan antara lain dengan:

1. Meningkatkan sistem keamanan lingkungan di masyarakat sehingga dapat menekan kesempatan bagi orang-orang yang mempunyai niat untuk melakukan tindak kriminal.
2. Melaksanakan patroli terpadu yang melibatkan semua unsur pengamanan baik dari Polisi, TNI maupun Sipil;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam hal siskamswakarsa.

Untuk lebih memberikan gambaran sejauhmana angka kriminalitas ditangani dilakukan penghitungan terhadap **Angka Kriminalitas Yang Tertangani**, Indikator angka kriminalitas dan angka kriminalitas yang tertangani merupakan salah satu instrumen untuk menilai tingkat kondusivitas suatu daerah sebagaimana tertuang dalam permendagri 54 /2010.

Angka kriminalitas yang tertangani sebesar 9,70% lebih rendah 1,80 poin dari yang ditargetkan sebesar 11,50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 84,33% artinya realisasi kinerja belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **angka kriminalitas yang tertangani** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 11,08% **turun 1,38** poin.

Indikator ini sangat berkaitan dengan indikator angka kriminalitas, dimana rumus yang digunakan adalah jumlah tindak kriminalitas yang tertangani selama 1 tahun bersangkutan dibagi jumlah penduduk tahun bersangkutan dikali 10.000.

Nilai capaian 84,33% tersebut didapat karena pada tahun 2017 jumlah kasus yang tertangani sampai selesai turun 2 (dua) kasus dibanding tahun 2016. Sementara diharapkan setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kasus yang selesai sebanyak 6 (enam) kasus.

Tabel 3.52
Data Kriminalitas di Kota Magelang
Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Kasus Kriminalitas	Kasus yang terselesaikan	Angka Kriminalitas Tertangani
2013	132	90	7,50
2014	149	108	8,95
2015	171	134	11,08
2016	170	120	9,89
2017	162	118	9,70

Sumber : Polres Magelang Kota

Capaian Indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda

Realisasi kinerja indikator **tingkat penyelesaian pelanggaran perda** sebesar 100% lebih tinggi 10 poin dari yang ditargetkan sebesar 90,00% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 111,11% artinya realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **tingkat penyelesaian pelanggaran perda** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 90,48% **meningkat 9,52** poin.

Adapun pada tahun 2017 dengan jumlah 232 kasus pelanggaran Perda telah diselesaikan secara keseluruhan.

Permasalahan :

1. Pelanggar yang tertangkap banyak dari luar Kota Magelang;
2. Pelaku pelanggaran yang tertangkap masih banyak dan berganti ganti orang dengan jenis pelanggaran yang sama.

Solusi :

1. Perlu koordinasi dengan dinas instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terselesaikan secara tuntas;
2. Perlu penerapan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku;
3. Mengintensifkan Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Capaian Indikator Prosentase Penyelesaian Pelanggaran Terkait Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Realisasi kinerja indikator **prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum** sebesar 100% lebih tinggi 5,50 poin dari yang ditargetkan sebesar 94,50% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,82% artinya realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja **tingkat penyelesaian pelanggaran perda** tahun 2017 apabila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 98,00% **meningkat 2 poin**.

Adapun pada tahun 2017 dengan jumlah 360 kasus Pelanggaran terkait Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum telah diselesaikan secara keseluruhan.

Permasalahan :

1. Masih banyak terjadi pelanggaran terkait Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Pemahaman masyarakat tentang Perda / Perwal terkait Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masih perlu ditingkatkan.

Solusi :

1. Mengambil tindakan tegas kepada pelanggar yang sesuai Perda No. 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum mulai dari penyitaan sampai dengan proses Tipiring
2. Melaksanakan dan mengintensifkan sosialisasi Perda khususnya Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah:

1. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan;

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 1.020.247.174,00 dari anggaran sebesar Rp 1.039.556.000,00 atau 98,14% dari target. Realisasi keuangan sebesar 98,14% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,21%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

K O T A

Magelang

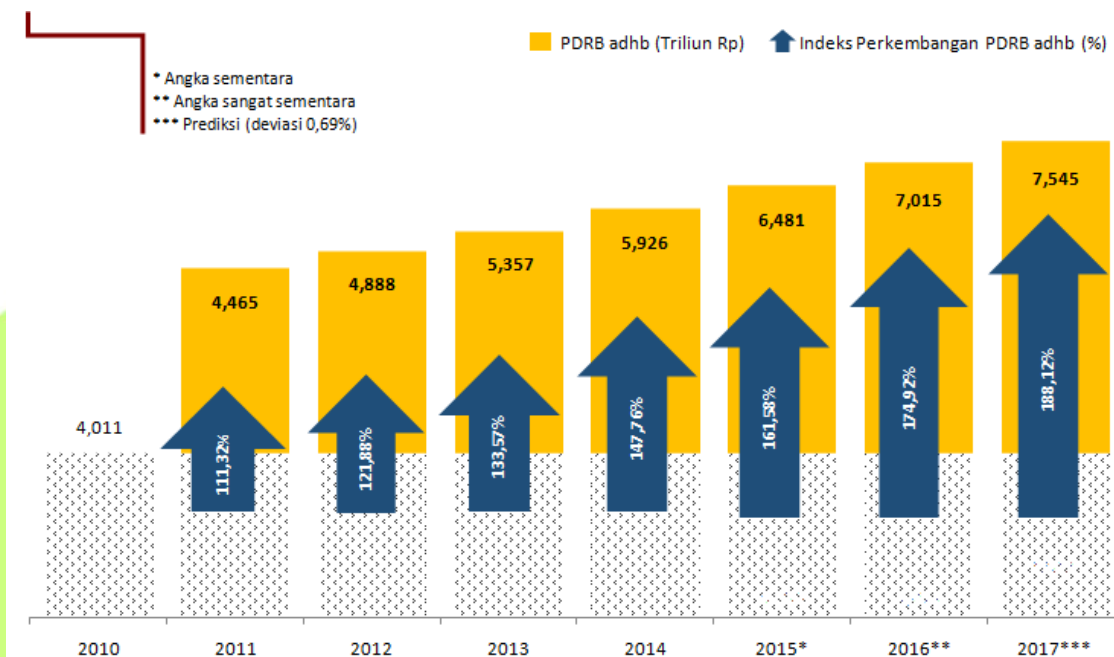
3.3. Capaian Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kota Magelang

3.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. PDRB atas Dasar Harga Berlaku

Berdasarkan data statistik, perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2016 tumbuh 8,25% (atas dasar harga berlaku), sedikit melambat dari tahun 2015 yang berada pada angka 9,35%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2016 mencapai 7,015 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,75 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (13,32%), Jasa Keuangan dan Asuransi (13,2%) dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (11,42%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2016. Khusus untuk Transportasi dan Pergudangan, lapangan usaha ini memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3-7
PDRB dan Indeks Perkembangan PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2010-2017



Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Sementara itu untuk kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2017 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2017 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB mencapai 7,545 triliun rupiah (deviasi 0,69%). Di tahun 2017 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang. Hampir seluruh lapangan usaha diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya dan Jasa Pendidikan diprediksi akan memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan lapangan usaha lain di tahun 2017.

Tabel 3.53
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Lapangan Usaha	2016*	2017**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98
Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dilihat dari sisi konsumsi, PDRB Kota Magelang di tahun 2016 didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 4,017 triliun Rupiah. Tren perlambatan sebagaimana lapangan usaha juga terjadi dalam penggunaan PDRB. Pada kelompok konsumsi, pertumbuhan konsumsi tertinggi tetap berasal dari konsumsi pemerintah sebesar 7,58%, melambat dari tahun 2015 yang mampu mencapai 14,56%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 6,8% sedikit lebih cepat dibandingkan lembaga NPRT yang hanya tumbuh 6,07%. Secara proporsi, peran komponen penggunaan terhadap PDRB di tahun 2017 diprediksi tidak berubah secara signifikan.

Tabel 3.54
PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Pengeluaran
Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,017,143.51	4,290,309.27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	89,900.37	95,357.32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,431,080.68	1,539,556.60
Pengeluaran PMTB	3,459,854.74	3,683,361.36
Pengeluaran Perubahan Inventori	153,174.70	167,302.24
Pengeluaran Ekspor	3,562,619.90	3,758,600.12
Pengeluaran Impor	5,698,393.82	5,989,687.21
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (deviasi 0,69%)

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

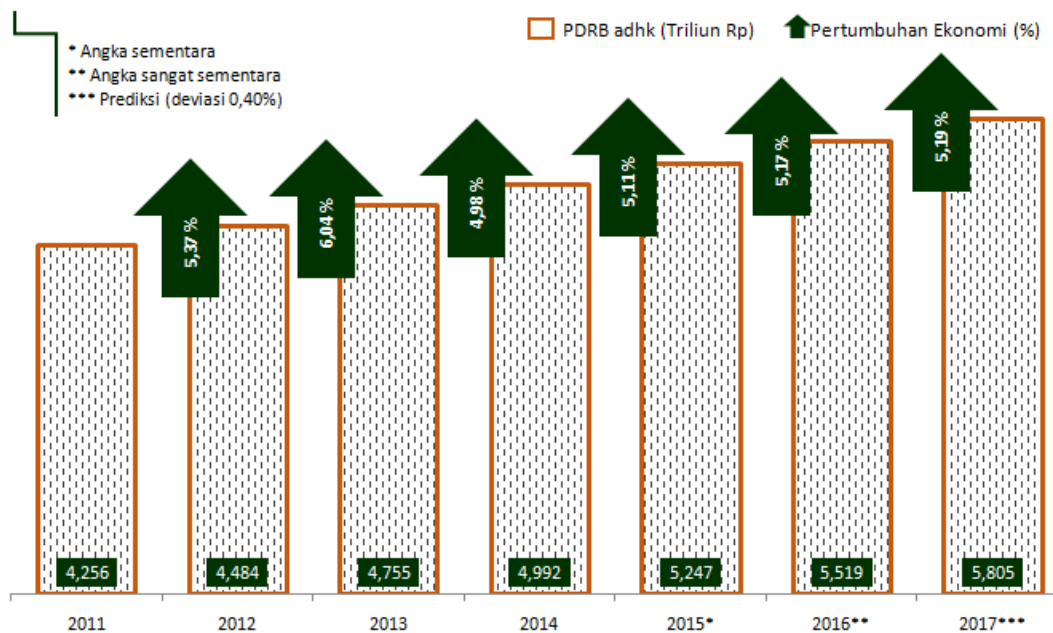
b. PDRB atas Dasar Harga Konstan (2010) dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2016 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,17% setelah di tahun sebelumnya hanya mencapai 5,11%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,02%), namun masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada skala provinsi Jawa Tengah yang pada tahun tersebut mencapai 5,28%. Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2016 mencapai 5,517 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral dialami oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi (9,46%), Jasa Perusahaan (8,82%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (7,75%). Merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Magelang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sektor unggulan dan sektor andalan karena dari data historis sektor-sektor ini masih tumbuh relatif lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota secara umum.

K O T A

Magelang

Gambar 3.8
PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017



Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dampak stabilitas perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2017 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2017, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai target RPJMD (4,79%-5,29%) dan berada pada angka 5,19% (deviasi 0,40%).

c. Kontribusi Sektor Perekonomian Terhadap PDRB

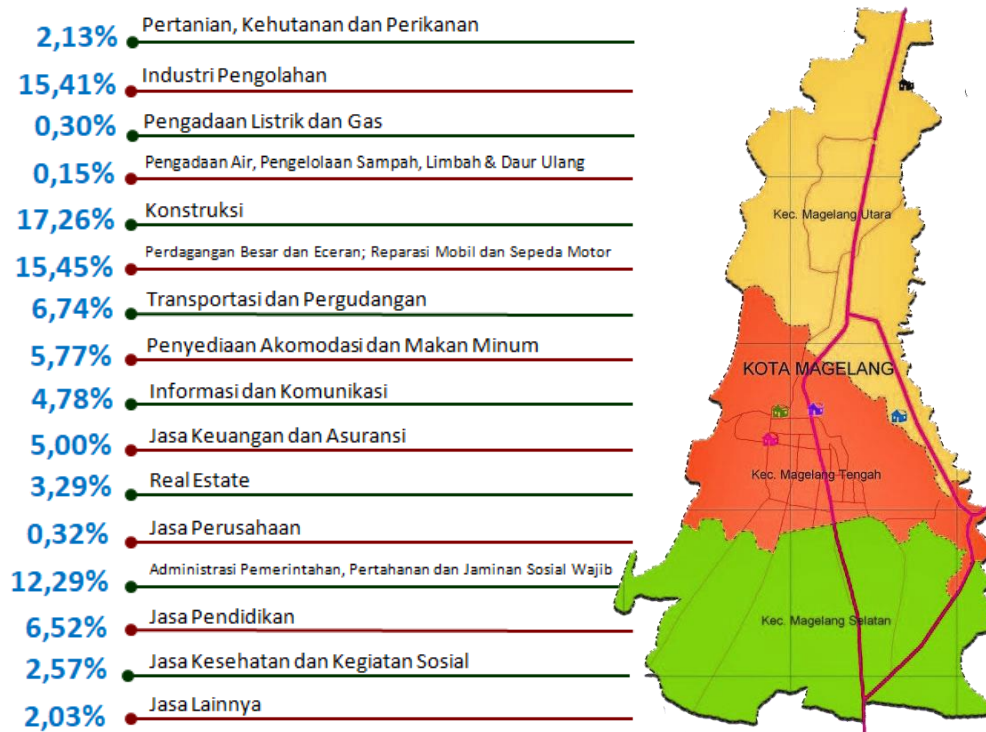
Dilihat dari kontribusinya, telah terjadi beberapa pergeseran peran lapangan usaha terhadap perekonomian makro Kota Magelang terjadi dalam lima tahun terakhir. Transformasi struktur perekonomian terjadi sejak tahun 2014 dimana lapangan usaha Industri Pengolahan mampu memiliki kontribusi terbesar kedua dalam PDRB Kota Magelang, menggeser peran lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada tahun 2016 transformasi kembali terjadi setelah melorotnya peran Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Magelang dalam menyumbang nilai tambah produksi barang/jasa dan tergantikan oleh lapangan usaha Jasa Lainnya. Sementara itu, komposisi sektor andalan dan unggulan cenderung konstan dari tahun ke tahun dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.55
Sektor Unggulan dan Sektor Andalan Perekonomian Kota Magelang, 2010-2016

1. Industri Pengolahan	1. Informasi dan Komunikasi
2. Transportasi dan Pergudangan	2. Jasa Pendidikan
3. Informasi dan Komunikasi	3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4. Jasa Pendidikan	

Sumber: Analisis Indikator Makro Ekonomi Kota Magelang Tahun 2017

Gambar 3.9
Rata-rata Distribusi Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang (adhb), 2010-2016



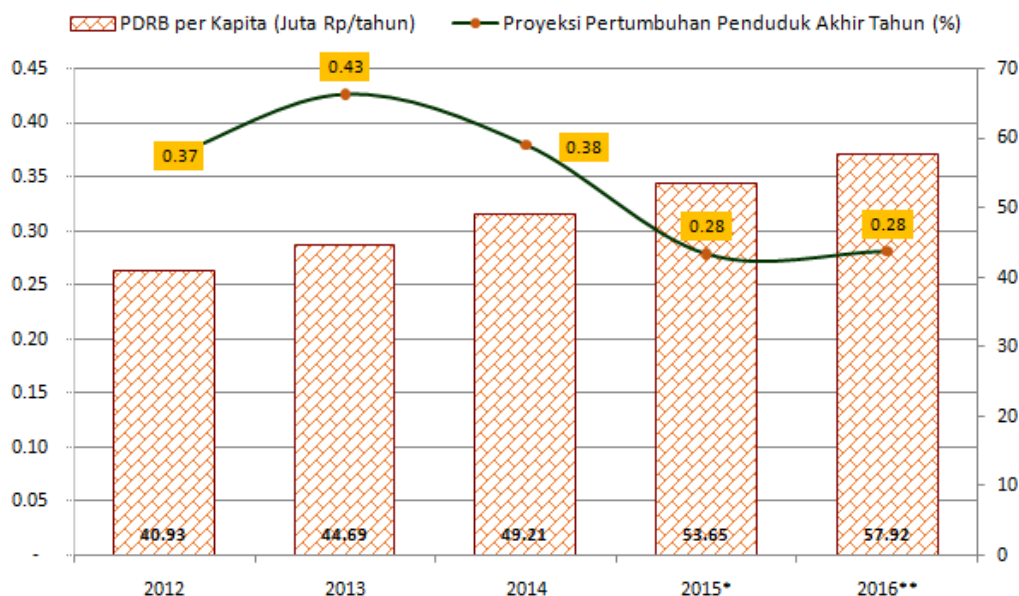
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Ketergantungan aktivitas ekonomi industri pengolahan khususnya dalam pasokan sumber daya input yang masih dicukupi dari hasil impor dari daerah sekitar merupakan salah satu penyebab mengapa lapangan usaha ini meskipun berkontribusi cukup signifikan dalam pembentukan PDRB Kota Magelang, namun belum cukup kompetitif dalam skala yang lebih luas yaitu provinsi, sehingga belum mampu menjadi sektor andalan. Di tahun 2017 struktur perekonomian Kota Magelang diprediksi memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2016 dengan peningkatan persentase peran di setiap lapangan usaha.

d. PDRB Per Kapita

Indikator lain yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat secara terukur adalah PDRB per kapita, dimana Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.112 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 4,827 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2017, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,19% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu terus tumbuh mencapai 58,92 juta/tahun.

Gambar 3.10
PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Akhir Tahun Kota Magelang, 2012-2016



* Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Tabel 3.56
PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016 dan Prediksi Tahun 2017

Uraian	2016	2017
PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)	7.015.380,09*	7.478.570,29 **
PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)	5.518.684,55*	5.804.917,24 **
Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)	121.112,00	121.474,00
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp/kapita/tahun)	57,92*	58,92**

* Angka sangat sementara ** Angka prediksi (derivatif)
Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Dapat dikatakan bahwa indikator kesejahteraan ini memiliki beberapa kelemahan, oleh karena itu dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan ekonomi (khususnya dalam bidang pemerataan pendapatan) yang lebih komprehensif, Kota Magelang juga memperhitungkan statistik kesejahteraan yang lain, diantaranya yaitu berupa indeks gini.

3.3.2. Inflasi

Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran yang baik dengan secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2017 tidak ditemukan gejala harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2017 antara lain adalah:

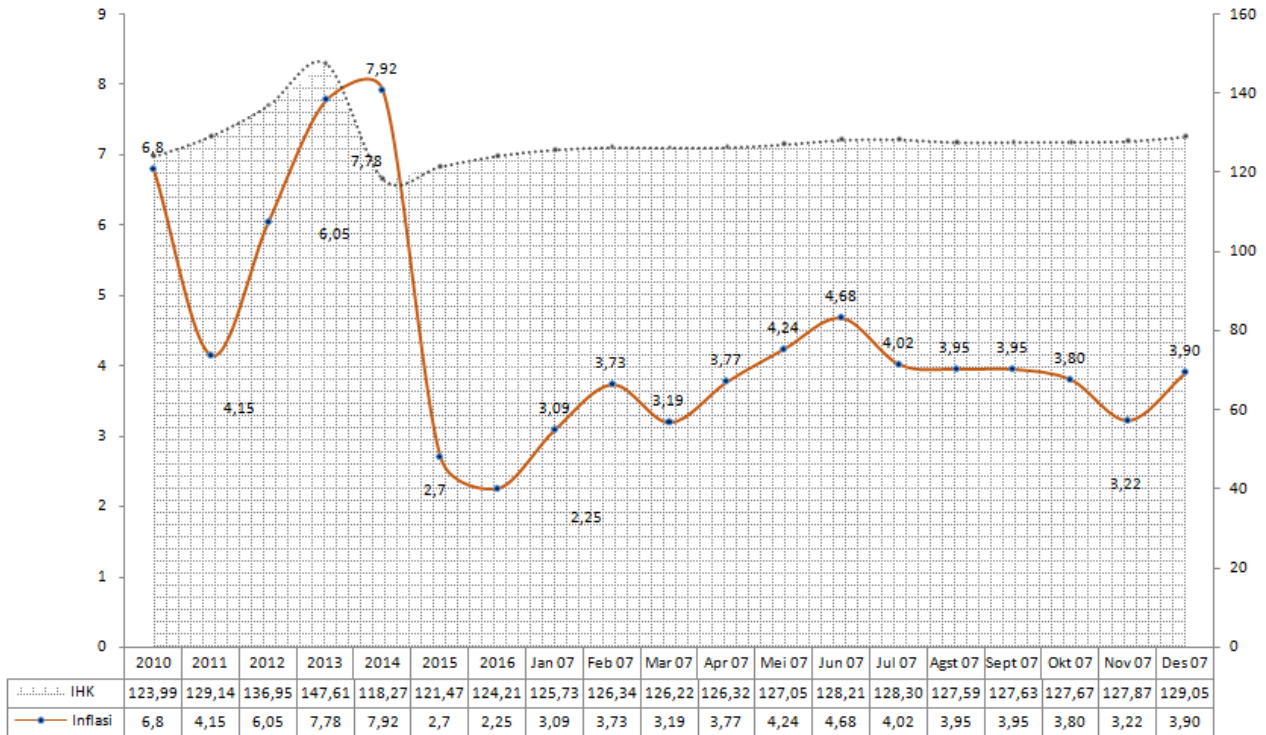
- a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
- b. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan
- c. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
- d. Program pengembangan budidaya perikanan
- e. Program peningkatan produksi hasil peternakan
- f. Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI)

Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog.

- g. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- h. Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.
- i. Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan DataGO
- j. Melaksanakan kegiatan panel harga pangan
- k. Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM
- l. Penguatan kelembagaan TPID

Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2017 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir November 2017 inflasi yang terjadi sebesar 0,16% (3,22% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 3,19%) dan nasional (yoy 3,30%). Akhir Desember 2017 terdapat kenaikan IHK mencapai 129,05 menyebabkan inflasi 0,93% (3,9% year on year). Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu : beras, telur ayam ras, cabe merah, daging ayam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah : bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, tauge/kecambah, jeruk, alpukat (BPS, 2018).

Gambar 3-11
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2017



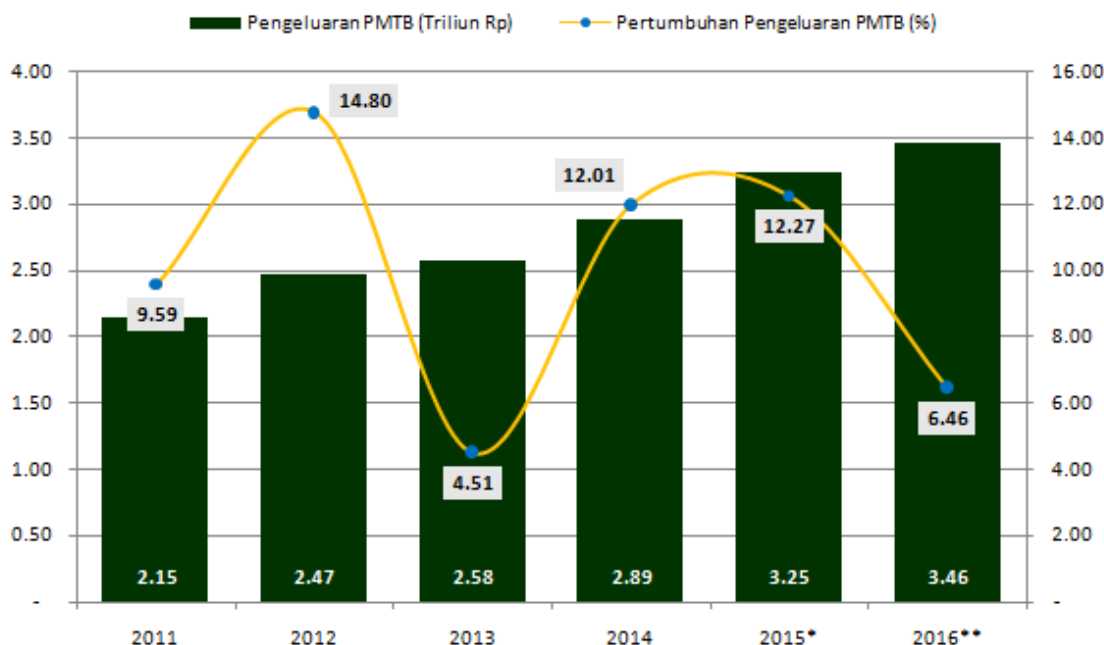
Sumber: BPS Kota Magelang, 2018

3.3.3. Investasi

Investasi dalam dokumen ini diukur dengan pendekatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Menurut BPS, PMTB adalah “pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas”. BPS menjelaskan lebih lanjut bahwa penambahan barang modal yang meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Pada tahun 2016 pengeluaran PMTB di Kota Magelang mencapai 3,460 triliun (adhb). Nilai ini tumbuh sedikit melambat, yaitu hanya sebesar 6,46% setelah di tahun sebelumnya mampu tumbuh 12,27%. Dominasi PMTB di tahun 2016 berasal dari pengeluaran PMTB untuk bangunan yang memiliki distribusi sebesar 87,62%. Kecepatan pertumbuhan PMTB non bangunan sempat tercatat sangat signifikan sepanjang tahun 2011-2012 dan masih lebih cepat dibandingkan dengan PMTB bangunan sampai dengan tahun 2013. Namun kemudian pengeluaran PMTB bangunan mampu mengejar laju PMTB non bangunan dengan rata-rata growth 10,86% per tahun sepanjang tahun 2014-2016. Sementara itu PMTB non bangunan terus melambat dengan rata-rata pertumbuhan hanya 6,28% per tahun selama periode 2014-2016 dan hanya tumbuh 4,30% di tahun 2016.

Gambar. 3.12
Pengeluaran PMTB dan Pertumbuhan Pengeluaran PMTB Kota Magelang, 2011-2017



Sumber: BPS Kota Magelang, 2016

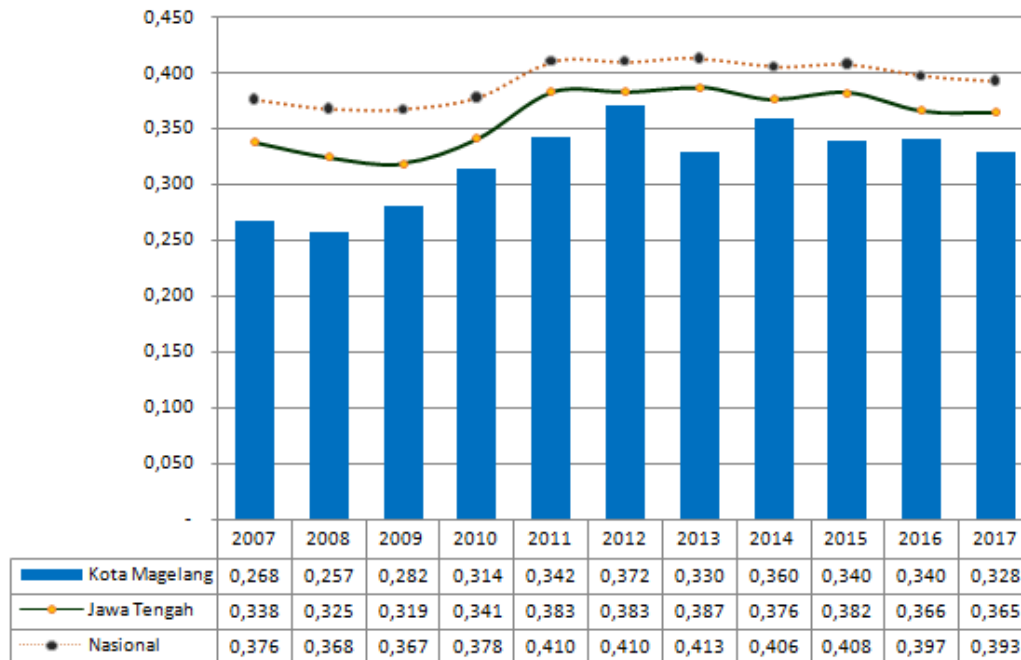
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Perkembangan nilai PMTB dan total PDRB selama kurun waktu 2010-2016 menghasilkan ICOR di Kota Magelang yang relatif kecil (5,09). Hal tersebut mengindikasikan bahwa investasi di kota sejuta bunga ini cukup efektif. Untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, rata-rata nominal investasi yang dibutuhkan sebesar 1,583 triliun rupiah. Sampai dengan akhir tahun 2017 diprediksi pengeluaran PMTB Kota Magelang akan tumbuh positif mencapai 3,683 triliun rupiah.

3.3.4. Index GINI

Indeks gini tidak mampu dilakukan pada level Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sampel dalam Susenas yang dilaksanakan di tahun 2016-2017. Data riil diperoleh di tahun 2015 dimana hasil pembangunan di Kota Magelang menunjukkan pola distribusi yang lebih merata, tercatat dari indeks gini yang turun 0,02 poin indeks menjadi 0,340 dari angka di tahun sebelumnya yang mencapai 0,360. Kondisi yang baik ini diprediksi bertahan dengan kecenderungan makin baik di tahun-tahun berikutnya pada interval 0,328-0,340 (deviasi $\pm 0,015$).

Gambar 3.13
Indeks Gini Nasional, Jawa Tengah dan Kota Magelang, 2007-2017



Indeks Gini Kota Magelang Tahun 2016-2017 adalah Data Prediksi

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017 (diolah)

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

3.3.5. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada hakekatnya untuk mensejahterakan masyarakat. Sehingga tingkat kesejahteraan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. UNDP pada 1990 telah merancang bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan Manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia yang disempurnakan metodenya pada tahun 2010.

Untuk itu dalam bahasan ini akan dideskripsikan bagaimana ukuran hasil pembangunan tersebut di Kota Magelang, bagaimana posisinya di wilayah hinterland, regional maupun nasional dan ditinjau dari pembangunan serta pemberdayaan gender-nya. Selanjutnya perlu ditinjau juga kondisi riil di daerah seperti dependency ratio, kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan. Dengan demikian kita akan mampu menarik sebuah catatan penting untuk pembangunan yang lebih baik.

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan IPM di Kota Magelang pada tahun 2016 cukup cepat sebesar 1,01% dengan capaian indeks sebesar 77,16 menempati posisi ke-4 di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Surakarta. Nilai ini masuk status pembangunan manusia pada kategori tinggi. Kualitas pembangunan manusia Kota Magelang di tahun 2016 mampu mencapai angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perolehan IPM Jawa Tengah (69,98) dan nasional (70,18).

Pertumbuhan tertinggi komponen pembentuk IPM Kota Magelang pada tahun 2016 berasal dari indikator Harapan lama Sekolah/HLS (penduduk usia lebih dari tujuh tahun) yang tumbuh 3,45%

namun masih pada kisaran 13 tahun (setara dengan jenjang pertama pada perguruan tinggi). Paritas daya beli tumbuh 2,75% di tahun 2016 mencapai 11,09 juta rupiah per tahun. Sementara itu pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (penduduk usia lebih dari 25 tahun) cukup lambat di bawah 1%. Meskipun demikian AHH di Kota Magelang terhitung tinggi mencapai rata-rata 76 tahun dengan AHH untuk kaum perempuan yang lebih tinggi (78,5 tahun) dibandingkan dengan kaum laki-laki (74,52 tahun). Hal tersebut mengindikasikan kinerja pelayanan dasar kesehatan yang baik.

Lambatnya pertumbuhan RLS yang hanya berkisar 0,7% per tahun perlu mendapat perhatian khusus terlebih dalam hal penurunan angka putus sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga kerja di Kota Magelang. Sejak tahun 2010 RLS penduduk usia lebih dari 25 tahun di Kota Magelang stagnan pada angka 10 tahun atau setara jenjang pendidikan tingkat satu sekolah menengah atas. Dari sisi gender, pada tahun 2016 RLS di Kota Magelang masih sedikit diungguli oleh kaum laki-laki yang rata-rata mengenyam pendidikan selama 11 tahun, sementara kaum perempuan di Kota Magelang rata-rata memiliki lama studi sebesar 10 tahun. Di tahun 2017 diprediksi nilai IPM Kota Magelang mengalami laju yang cukup tinggi mencapai 77,8 melampaui target RPJMD pada tahun berkenaan yang ditetapkan sebesar 76,9.

Tabel 3.57
Komponen Pembentuk IPM Kota Magelang Tahun 2010-2016 dan Prediksi Tahun 2017

Tahun	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran (Rp .000,-)	IPM
2010	76,39	12,22	10,08	9.681	73,99
2011	76,44	12,33	10,14	9.922	74,47
2012	76,49	12,49	10,20	10.169	75,00
2013	76,54	12,65	10,22	10.258	75,29
2014	76,57	12,98	10,27	10.344	75,79
2015	76,58	13,10	10,28	10.793	76,39
2016	76,62	13,55	10,29	11.090	77,16
2017*	76,67	13,88	10,30	11.384	77,80

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Implikasi dari tidak dilaksanakannya kegiatan Sakernas sampel besar untuk prediksi tingkat kabupaten kota adalah tidak dapat dilakukan penghitungan angka IDG yang salah satu indikatornya adalah adanya data tentang jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk perempuan. Maka angka untuk Indeks tersebut hanya tersedia di terakhir di tahun 2015. Sedangkan untuk angka IPG tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan karena akan ada perbaikan metodologi yang sesuai dengan kondisi saat ini. Data terakhir di tahun 2015 tercatat bahwa pembangunan berbasis gender di Kota Magelang terus mengalami perbaikan kualitas terlihat dari peningkatan IPG dari 95,45 di tahun 2015 menjadi 95,81. Secara umum peran laki-laki dalam pembangunan manusia di Kota Magelang jauh lebih baik dibandingkan kaum perempuan kecuali dari kualitas kesehatan yang tercermin melalui indikator AHH.

Tabel 3.58
Komponen Pembentuk IPM Berdasar Gender di Kota Magelang Tahun 2014-2015

Tahun	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran (Rp .000,-)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2014	74,52	78,49	13,26	12,88	10,89	9,91	11.868	10.265
2015	74,54	78,51	13,27	12,89	10,90	9,92	12.005	10.651

Sumber: BPS Kota Magelang, 2017

Pemberdayaan gender di tahun 2015 justru mengalami penurunan kualitas. Hal tersebut terlihat dari penurunan IDG ke angka 75,83 setelah di tahun 2014 mampu mencapai 78,82. Hal tersebut disebabkan karena penurunan yang cukup besar pada persentase keterlibatan perempuan di parlemen.

Tabel 3.59
Komponen Pembentuk IDG di Kota Magelang Tahun 2014-2015

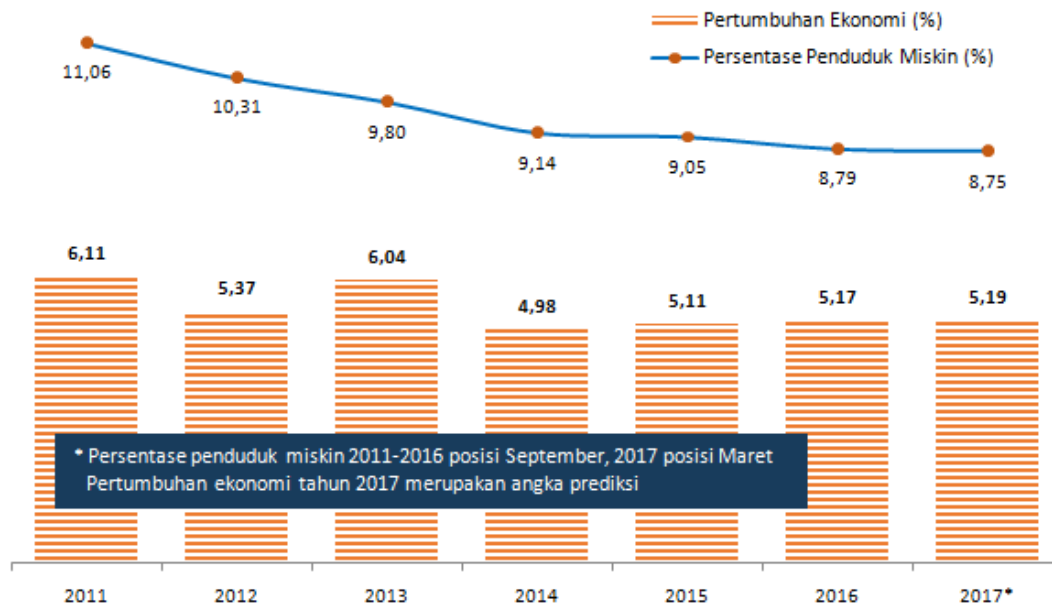
Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Prempuan sebagai Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
2014	24,00	45,02	41,11
2015	20,00	45,74	41,81

c. Kemiskinan

Penduduk miskin merupakan sebuah dilema pembangunan dan di manapun penduduk miskin Sampai dengan Maret 2017 persentase penduduk miskin di Kota Magelang berangsur turun mencapai 8,75% dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 450.908, yang merupakan garis kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Penurunan ini terbilang sangat kecil dibandingkan posisi September 2016. Pada periode September 2016 sampai dengan maret 2017 pengentasan penduduk miskin di Kota Magelang tercatat hanya sebesar 100 jiwa penduduk. Garis kemiskinan di Kota Magelang terus bergerak naik sedangkan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan meskipun masih lambat. Hal ini menjelaskan meskipun biaya pemenuhan kebutuhan hidup terus meningkat namun penduduk Kota Magelang dapat mengatasinya sehingga jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan semakin menurun.

Sementara itu tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Magelang dalam kurun waktu 5 tahun masih fluktuatif dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 yaitu dari semula 1,20 menjadi 1,30 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, sehingga angka indeks di tahun 2017 ini adalah lebih baik dibanding 2016.

Gambar 3.14
Persentase Penduduk Miskin dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang, 2011-2017

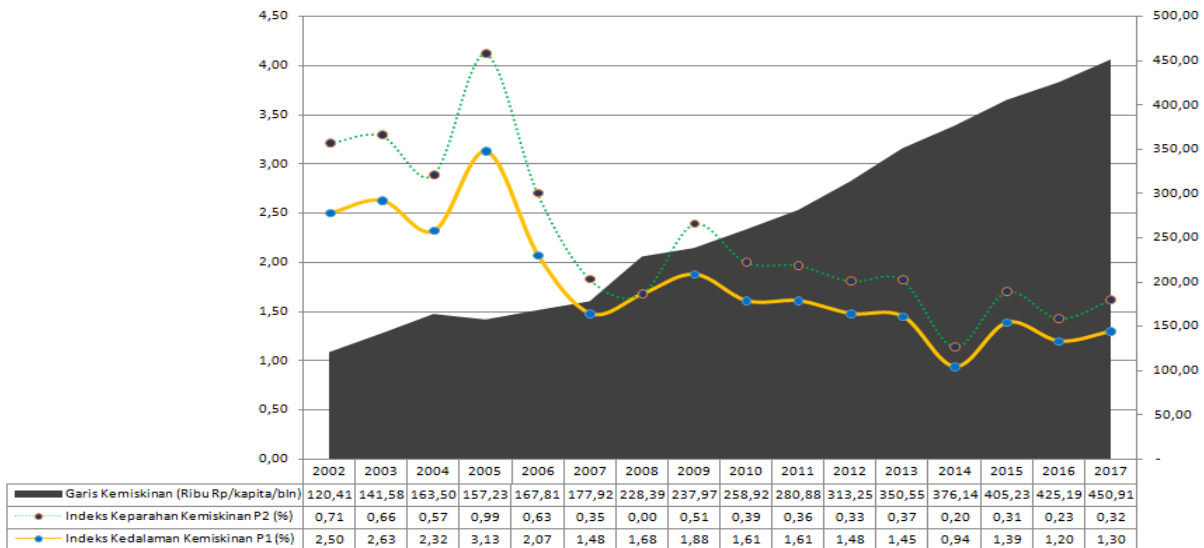


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

Tingkat keparahan kemiskinan (P_2) juga masih terlihat fluktuatif dan perkembangan dari tahun 2016 ke 2017 semula 0,23 menjadi 0,32. P_2 ini dapat dianalisa dengan semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, dan di tahun 2017 terlihat bahwa indeks semakin naik yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin bertambah. Peningkatan pendapatan dan konsumsi penduduk miskin harus diupayakan agar setidaknya sama cepat dengan pertumbuhan garis kemiskinan serta merata di seluruh kantong kemiskinan sehingga ketimpangan di antara penduduk miskin tidak semakin melebar.



Gambar 3.15
Garis Kemiskinan, P1 dan P2 Kota Magelang, 2002-2017

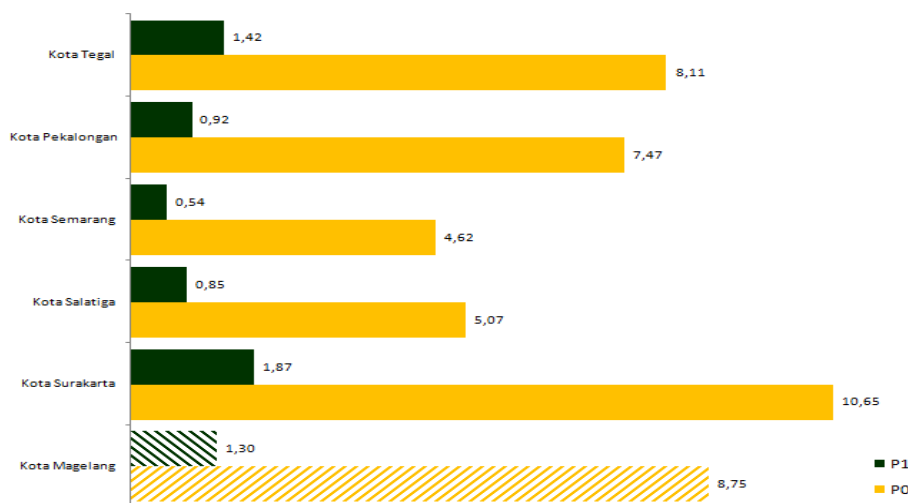


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

Di antara enam wilayah kota yang ada di Jawa Tengah, Kota Magelang merupakan daerah perkotaan dengan garis kemiskinan tertinggi. Bahkan dibandingkan dengan seluruh Kabupaten di Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin Kota Magelang di tahun 2017 masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan, Semarang dan Tegal. Pun demikian dengan indeks kedalaman dan keparahan. Kualitas kemiskinan di Kota Magelang masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Salatiga, Pekalongan dan Semarang.

Gambar 3.16
Persentase Penduduk Miskin (Po) dan Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kota-kota di Jawa Tengah, 2017



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Catatan: data tahun 2017 posisi Maret

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Keterbatasan sampel Sakernas menjadikan indikator ketenagakerjaan tahun 2016 tidak dapat dibreakdown sampai dengan level Kabupaten/Kota. TPT Kota Magelang pada tahun 2017 naik dari tahun 2015 mencapai 6,68%. Pada periode tersebut (2015-2017) terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 2,81% (1.715 jiwa) dengan total AK sebanyak 62.775 jiwa. Kenaikan TPT ini disebabkan bertambah jumlah penduduk yang mencari pekerjaan dari 4,14 % di tahun 2015 menjadi 4,36 % di tahun 2017. Meskipun secara persentase tidak terlalu banyak tetapi secara absolut jumlah tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Untuk menurunkan angka pengangguran, perlu dilakukan analisa lebih lanjut untuk mencari informasi tentang spesifikasi para pencari kerja sehingga pasar kerja bisa disesuaikan dengan spesifikasi ini. Kenaikan TPT salah satunya juga ditengarai karena pertumbuhan pengangguran terbuka (6,77%) yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja dengan status bekerja (2,54%), meski di satu sisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dalam periode tersebut mengalami kenaikan dari 64,35% di tahun 2015 menjadi 65,32% di tahun 2017. Pasar kerja di wilayah Kota Magelang sangat dibutuhkan agar angka TPT bisa terus berkurang. Untuk itu diharapkan bisa untuk mengarahkan potensi tenaga kerja ini ke dalam wilayah, atau dibuat situasi yang kondusif untuk investasi/industri, sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja.

Tabel 3.60
Indikator Ketenagakerjaan di Kota Magelang Tahun 2010-2017

Tahun	Angkatan Kerja (ribu orang)		Angkatan Kerja (ribu orang)	TPT (%)	TPAK (%)
	Bekerja	Pengangguran Terbuka			
2010	53,719	8,226	61,945	13,28	68,46
2011	58,395	7,596	65,991	11,51	71,83
2012	58,542	5,782	64,324	8,99	69,45
2013	59,567	4,313	63,880	6,75	68,37
2014	59,628	4,754	64,382	7,38	68,49
2015	57,133	3,927	61,060	6,43	64,35
2016*	na	na	na	na	na
2017	58,582	4,193	62,775	6,68	65,32

Sumber: BPS, 2018

* Tidak ada publikasi

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Indikator lainnya yang perlu dikaji adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Secara definitive TPak merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. TPak pada tahun 2010 sebesar 68,46% dan pada tahun 2017 sebesar 65,32%, Dalam beberapa tahun ini kisaran angka TPak masih sebesar 60-an%. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja per tahun pada tahun 2010-2014 sebesar 69%. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang usia kerja, yang termasuk Angkatan Kerja kurang lebih 69 orang dan tahun 2015 menurun di sekitar 65 orang. Kondisi ini diindikasikan banyaknya penduduk usia kerja di Kota Magelang yang mencari kerja di luar Kota Magelang untuk bekerja di daerah yang mempunyai kesempatan kerja lebih mapan. Dari data penduduk yang mencari kerja di Kota Magelang juga mengalami peningkatan dari 3.927 di tahun 2015 menjadi 4.193 di tahun 2017. Dibandingkan 2015

jumlah penduduk usia kerja mengalami kenaikan, begitu juga dengan angkatan kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Akan tetapi pencari kerja juga mengalami kenaikan sehingga berakibat pada angka TPT yang naik. Hal yang mengembirakan adalah menurunnya jumlah angkatan kerja yang merupakan salah satu indikasi bahwa sudah ada pergeseran bagi penduduk bukan angkatan kerja (yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga) untuk memberdayakan dirinya dengan bekerja atau mencari pekerjaan. Ada keinginan untuk kelompok ini dalam membantu meningkatkan perekonomian rumah tangganya.

f. Angka Beban Tanggungan Penduduk (Dependency Ratio – DR)

Berdasarkan proyeksi, pada tahun 2017 penduduk Kota Magelang mencapai 121.673 jiwa tumbuh 0,31% dengan laju pertumbuhan penduduk usia produktif mencapai 0,37%. Berdasarkan proyeksi kependudukan yang dipublikasi oleh BPS Kota Magelang, dapat diketahui bahwa bonus demografi telah dinikmati oleh Kota Magelang sejak tahun 2010, dimana rasio penduduk usia produktif rata-rata mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan penduduk kelompok usia non produktif. Pengendalian jumlah penduduk di Kota Magelang cukup baik dengan laju pertumbuhan penduduk di bawah 0,5% di setiap tahunnya. Angka ketergantungan juga menunjukkan rasio yang semakin rendah dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk usia produktif di Kota Magelang semakin turun.

Tabel 3.61
Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Magelang Tahun 2010-2016

Keterangan	2015	2016	2017
Proyeksi Penduduk Usia 0-14 tahun (jiwa)	26.107	25.897	25.650
Proyeksi Penduduk Usia 15-64 tahun (jiwa)	85.260	85.534	85.851
Proyeksi Penduduk usia 65 ke atas (jiwa)	9.585	9.862	10.171
Proyeksi Penduduk Akhir Tahun (jiwa)	120.952	121.293	121.673
Proyeksi Angka Ketergantungan (%)	41,86	41,81	41,72

Sumber: BPS Kota Magelang, 2018 (diolah)

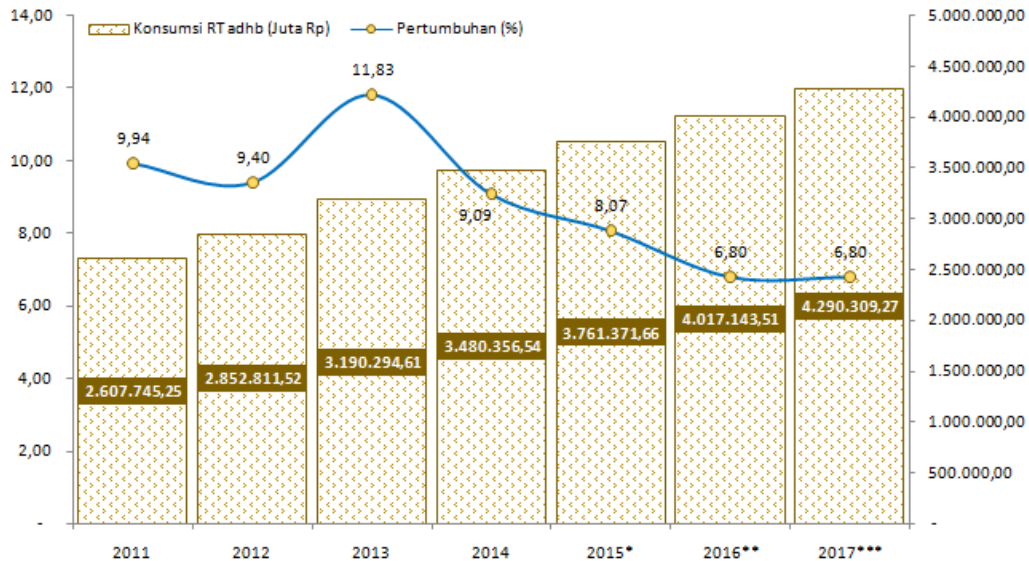
Dari Tabel di atas tersebut dapat dilihat bahwa Rasio Ketergantungan di Kota Magelang cenderung menurun, dengan angka penurunan per tahun kurang dari 1%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata penduduk Kota Magelang yang masuk usia tidak produktif memiliki ketergantungan yang sedang terhadap penduduk usia produktif.

g. Konsumsi Rumah Tangga

Pertumbuhan positif pola konsumsi rumah tangga terjadi di Kota Magelang meski dengan tren menurun sejak tahun 2014. Pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga di Kota Magelang mencapai 4,017 triliun Rupiah atau sebesar 58,04% dari total PDRB. Mayoritas konsumsi berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Rokok (31,9%), kelompok Transportasi, Komunikasi, Rekreasi

dan Budaya (28,53%) dan kelompok Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga (19,53%). Di tahun 2017 diprediksi angka konsumsi ini tumbuh eksponensial sebesar 6,8% dengan nominal 4,290 triliun Rupiah.

Gambar 3.17
Konsumsi Rumah Tangga Atas Dasar Harga Berlaku dan Pertumbuhannya, 2011-2017



Sumber: BPS, 2017

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka Prediksi
Prediksi: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, 2018

3.4. Realisasi Anggaran per Sasaran

Efisiensi merupakan kemampuan untuk mendapatkan output/outcome yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumberdaya/input yang seminimal mungkin. Analisis efisiensi disini lebih ditekankan pada penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang ditargetkan. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan antara persentase capaian kinerja (realisasi) dengan persentase realisasi anggaran. Apabila nilai yang dihasilkan ≥ 1 , maka dapat dikategorikan efisien dan sebaliknya. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya (anggaran) Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Tabel berikut:

Tabel 3.62
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2017

No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	1	Rata-rata lama sekolah	98,85%	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.039.521.000	408.857.900	39,33%	1,26
		2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	84,34%	2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25.637.363.000	19.633.532.746	76,58%	
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	84,77%	3	Program Pendidikan Non Formal	584.980.000	515.482.000	88,12%	
		4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	110,81%	4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.743.485.000	1.562.857.500	89,64%	
		5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,63%	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.707.849.000	1.341.240.200	78,53%	
		6	Harapan Lama Sekolah	100,74%	6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.602.523.000	1.194.700.600	74,55%	
		7			7	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan dan Perpustakaan	1.329.655.000	1.031.513.328	77,58%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				96,36%	% Realisasi Anggaran		33.645.376.000	25.688.184.274	76,35%	Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	99,83%	1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.663.194.000	1.803.361.206	67,71%	1,09
		2	AKI/ 1.000 KH	47,28%	2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.307.335.000	971.299.463	74,30%	
		3	AKB/ 1.000 KH	115,93%	3	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD	197.198.667.000	179.221.597.114	90,88%	
		4	AKABA	109,03%	4	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	8.080.000	7.169.000	88,73%	
		5	Prevalensi Balita Gizi Buruk	100,65%	5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	974.260.000	889.565.579	91,31%	
		6	Angka Kesakitan DBD	100,68%	6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	21.028.590.000	17.403.608.572	82,76%	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
		7 Angka Prevalensi Kasus TB	53,82%	7	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	45.091.000	44.143.000	97,90%	
		8 Angka Prevalensi HIV AIDS pada penduduk usia 15-49 tahun	140,00%	8	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	40.001.000	38.936.850	97,34%	
				9	Program Pengawasan Obat dan Makanan	103.861.000	96.582.955	92,99%	
				10	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	736.499.000	321.882.390	43,70%	
				11	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	119.933.000	112.889.500	94,13%	
				12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	179.398.000	148.486.600	82,77%	
				13	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	50.015.000	50.014.500	100,00%	
				14	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	100.495.000	89.202.800	88,76%	
				15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	687.689.000	630.588.755	91,70%	
				16	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	1.122.840.000	1.079.682.090	96,16%	
				17	Program pengadaan, peningkatan, sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	5.150.000.000	0	0,00%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			95,90%		% Realisasi Anggaran	231.515.948.000	202.909.010.374	87,64%	Efisien



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah	1	Kontribusi sektor perdagangan pada PDRB	98,76%	1	Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	193.716.000	180.367.800	93,11%	1,09
					2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	13.849.000	13.558.200	97,90%	
					3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	926.709.000	839.439.473	90,58%	
					4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	391.103.000	382.060.211	97,69%	
					5	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	1.795.280.000	1.612.775.455	89,83%	
					6	Program Pengelolaan Pasar	4.987.007.000	4.579.385.873	91,83%	
					7	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	542.048.000	488.305.852	90,09%	
					8	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	44.740.000	43.187.000	96,53%	
					9	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	36.256.000	34.855.250	96,14%	
					10	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	7.533.000	5.920.325	78,59%	
					11	Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	23.655.000	21.395.580	90,45%	
					12	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115.198.000	114.457.400	99,36%	



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
					13	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	673.466.000	520.941.629	77,35%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				98,76%		% Realisasi Anggaran	9.750.560.000	8.836.650.048	90,63%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1	Indeks Pencemaran Air	61,43%	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.163.347.000	1.009.553.074	86,78%	1,44
		2	Indeks Pencemaran Udara	138,62%	2	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	69.566.000	64.311.600	92,45%	
		3	Indeks Tutupan Vegetasi	117,90%	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	328.124.000	309.281.350	94,26%	
		4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,87%	4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	956.934.000	909.199.500	95,01%	
					5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	13.733.100.000	7.293.704.949	53,11%	
					6	Program Ruang Terbuka Hijau	9.840.522.000	9.338.712.863	94,90%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				104,71%		% Realisasi Anggaran	26.091.593.000	18.924.763.336	72,53%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang	1	Rasio Infrastruktur Perkotaan Dalam Kondisi Baik	100,76%	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	6.041.480.000	5.384.328.050	89,12%	1,10
					2	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.037.071.000	941.147.690	90,75%	
					3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	24.533.893.000	22.841.746.779	93,10%	
					4	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	2.427.448.000	2.396.295.950	98,72%	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi	
				5	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	81.507.000	78.597.500	96,43%		
				6	Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	8.044.259.000	7.141.141.250	88,77%		
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			100,76%		% Realisasi Anggaran	42.165.658.000	38.783.257.219	91,98%	Efisien	
6	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang	1	Rasio Luas kawasan kumuh	29,99%	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	2.564.375.000	2.003.238.900	78,12%	0,81
		2	Prosentase RTLH	111,03%	2	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	68.175.000	50.640.890	74,28%	
					3	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan	976.290.000	818.929.170	83,88%	
					4	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	420.050.000	302.177.500	71,94%	
					5	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magersari	841.436.000	720.537.880	85,63%	
					6	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Utara	191.600.000	179.130.350	93,49%	
					7	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Jurangombo Selatan	1.910.178.000	1.755.561.720	91,91%	
					8	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	1.345.510.000	1.210.901.480	90,00%	
					9	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	1.460.006.000	1.340.431.210	91,81%	



No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
				10	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	1.875.604.000	1.719.565.890	91,68%	
				11	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Potrobangsari	628.350.000	616.205.750	98,07%	
				12	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kedungsari	2.109.180.000	1.848.426.450	87,64%	
				13	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Utara	542.555.000	535.222.960	98,65%	
				14	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kramat Selatan	1.539.660.000	1.235.555.090	80,25%	
				15	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Kemirirejo	749.520.000	655.231.000	87,42%	
				16	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Cacaban	1.235.860.000	1.026.506.446	83,06%	
				17	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	984.580.000	913.807.720	92,81%	
				18	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Magelang	951.370.000	811.061.490	85,25%	
				19	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Panjang	362.500.000	255.136.000	70,38%	
				20	Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Gelangan	467.150.000	447.826.580	95,86%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			70,51%		% Realisasi Anggaran	21.223.949.000	18.446.094.476	86,91%	Kurang Efisien



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
7	Meningkatnya Keamanan, dan Keselamatan Transportasi di Kota Magelang	50	Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	101,82%	1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	803.679.000	787.325.648	97,97%	1,09
					2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	166.300.000	164.000.050	98,62%	
					3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	603.689.000	558.561.950	92,52%	
					4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.520.917.000	3.118.070.850	88,56%	
					5	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	4.399.515.000	4.244.125.210	96,47%	
					6	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	202.538.000	193.655.800	95,61%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				101,82%		% Realisasi Anggaran	9.696.638.000	9.065.739.508	93,49%	Efisien
8	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1	Pertumbuhan nilai investasi PMA	3,80%	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	800.880.000	793.046.999	99,02%	3,64
					2	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	64.526.000	63.101.299	97,79%	
					3	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	155.800.000	99.453.967	63,83%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				340,97%		% Realisasi Anggaran	1.021.206.000	955.602.265	93,58%	Efisien
9	Meningkatnya ketahanan pangan	1	Ketersediaan pangan utama beras (ton)	106,28%	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	876.994.000	824.291.489	93,99%	1,13
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				106,28%		% Realisasi Anggaran	876.994.000	824.291.489	93,99%	Efisien



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi			
10	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang	1	Persentase penyerapan tenaga kerja	143,57%	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.101.113.000	1.051.464.350	95,49%	1,51			
					2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.720.577.000	3.524.637.885	94,73%				
					3	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	236.637.000	218.007.000	92,13%				
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				143,57%		% Realisasi Anggaran	5.058.327.000	4.794.109.235	94,78%	Efisien			
11	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1	Persentase Penurunan PMKS	64,04%	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.	84.689.000	74.742.958	88,26%	0,96			
					2	Pendapatan Perkapita	100,02%	2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		666.688.000	556.436.125	83,46%
					3	Angka Kemiskinan	91,84%	3	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		106.256.000	79.648.000	74,96%
					4			4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		11.888.000	11.237.600	94,53%
					5			5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		156.273.000	154.937.000	99,15%
					6			6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		387.896.000	378.528.498	97,59%
					7			7	Program pengembangan wawasan kebangsaan		21.602.000	20.450.250	94,67%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				85,30%		% Realisasi Anggaran	1.435.292.000	1.275.980.431	88,90%	Kurang Efisien			



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
12	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	1	Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga	100,00%	1	Program Keluarga Berencana	287.222.000	287.167.054	99,98%	1,01
					2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	11.018.000	10.518.000	95,46%	
					3	Program Pelayanan Kontrasepsi	63.077.000	59.487.000	94,31%	
					4	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	124.585.000	124.585.000	100,00%	
					5	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KKR	13.800.000	13.800.000	100,00%	
					6	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	54.696.000	54.546.000	99,73%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100,00%		% Realisasi Anggaran	554.398.000	550.103.054	99,23%	Efisien
13	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	1	Rasio KDRT	61,67%	1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	151.329.000	151.329.000	100,00%	0,63
		2	Indeks Pemberdayaan Gender	NA	2	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	182.669.000	174.202.500	95,37%	
					3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	92.291.000	92.291.000	100,00%	
					4	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	445.146.000	429.471.545	96,48%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				61,67%		% Realisasi Anggaran	871.435.000	847.294.045	97,23%	Kurang Efisien



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
14	Meningkatnya Pelestarian Budaya Kota Magelang	1	Persentase kelompok seni budaya yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan	107,14%	1	Program Pengembangan Nilai Budaya	790.252.000	716.239.000	90,63%	4,45
		2	Perlindungan situs atau bangunan cagar budaya	700,00%	2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	875.175.000	823.711.000	94,12%	
					3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	179.907.000	131.097.000	72,87%	
					4	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	338.820.000	311.382.000	91,90%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				403,57%		% Realisasi Anggaran	2.184.154.000	1.982.429.000	90,76%	Efisien
15	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota Magelang	1	Jumlah Wisatawan Nusantara	112,94%	1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.561.791.000	1.545.071.087	98,93%	1,22
		2	Jumlah Wisatawan Mancanegara	131,38%	2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	447.868.000	347.991.500	77,70%	
		3	Lama Tinggal Wisatawan	100,00%	3	Program Pengembangan Kemitraan	70.835.000	59.133.000	83,48%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				114,77%		% Realisasi Anggaran	2.080.494.000	1.952.195.587	93,83%	Efisien
16	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	1	Prosentase penurunan penyakit masyarakat	35,33%	1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	240.722.000	235.088.250	97,66%	0,75
		2	Tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama	100,00%	2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	146.898.000	130.426.000	88,79%	
					3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	210.738.000	174.238.000	82,68%	
					4	Program Pendidikan Politik Masyarakat	98.433.000	89.657.550	91,08%	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				67,67%		% Realisasi Anggaran	696.791.000	629.409.800	90,33%	Kurang Efisien
17	Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan	1	Angka kriminalitas	98,71%	1	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	929.559.000	917.719.074	98,73%	1,07
		2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	111,11%	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	109.997.000	102.528.100	93,21%	



No.	Sasaran		Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
	Rasa Aman bagi Masyarakat	3	Prosentase penyelesaian pelanggaran terkait keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	105,82%						
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				105,21%		% Realisasi Anggaran	1.039.556.000	1.020.247.174	98,14%	Efisien

Berdasarkan Data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada sasaran strategis secara umum efisien pada 13 sasaran strategis, namun demikian pada 4 sasaran strategis belum tercapai efisiensi. Yaitu pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang dikarenakan belum optimalnya realisasi kinerja untuk rasio luas kawasan kumuh yang tingkat capaian kinerjanya sebesar 29,99%; Kemudian pada sasaran strategis Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dikarenakan masih belum optimalnya realisasi kinerja untuk indikator persentase penurunan PMKS yang tingkat capaian kinerjanya hanya sebesar 64,04%; Selanjutnya pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan, hal ini dikarenakan adanya indikator kinerja yang belum dapat diukur, dikarenakan BPS belum melakukan penghitungan pada Indeks Pemberdayaan Gender pada tahun 2017, serta kurang optimalnya realisasi kinerja pada indikator Rasio KDRT, dengan relatif banyaknya kasus KDRT yang terjadi di tahun 2017 sehingga tingkat capaian kinerja hanya sebesar 61,67 %, serta pada sasaran strategis Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama, hal ini dikarenakan belum tercapainya indikator prosentase penurunan penyakit masyarakat yang ditargetkan 3% hanya tercapai 1,06% sehingga capaian kinerjanya hanya 35,33%, namun demikian untuk indikator tingkat Kerukunan hidup umat antar suku, adat, ras dan agama pada sasaran ini tercapai 100%, karena tidak terjadi konflik bernuansa SARA di Kota Magelang.

K O T A

Magelang

BAB IV
PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017, berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah diuraikan pada Bab III dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja Pemerintah Kota Magelang pada Tahun 2017 telah dapat menunjukkan pencapaian kinerja yang cukup signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian terhadap 17 sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa **13 Sasaran strategis** dengan kriteria **sangat tinggi**; 1 sasaran strategis dengan kriteria **tinggi**, 2 sasaran strategis dengan kriteria **sedang**, 1 sasaran strategis dengan kriteria **rendah**. Pencapaian indikator sasaran strategis Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Magelang Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Kinerja	Kriteria	Kode
1	Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing	96,36%	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	95,90%	Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Bagi Perekonomian Daerah	98,76%	Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	104,71%	Sangat Tinggi	
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kota Magelang	100,76%	Sangat Tinggi	
6	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Magelang	70,51%	Sedang	
7	Meningkatnya Keamanan, dan Keselamatan Transportasi di Kota Magelang	101,82%	Sangat Tinggi	
8	Meningkatnya kondusifitas iklim investasi, daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat	340,97%	Sangat Tinggi	
9	Meningkatnya ketahanan pangan	106,28%	Sangat Tinggi	
10	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Kota Magelang	143,57%	Sangat Tinggi	
11	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	85,30%	Tinggi	
12	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan	100,00%	Sangat Tinggi	
13	Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan	61,67%	Rendah	
14	Meningkatnya Pelestarian Budaya Kota Magelang	403,57%	Sangat Tinggi	
15	Meningkatnya Daya Tarik Wisata Kota Magelang	114,77%	Sangat Tinggi	
16	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	67,67%	Sedang	
17	Terwujudnya Lingkungan Kondusif yang Mendukung Stabilitas Daerah serta Memberikan Rasa Aman bagi Masyarakat	105,21%	Sangat Tinggi	

Dari 17 sasaran strategis indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kota Magelang dengan 44 indikator kinerja sasaran yang diukur pada tahun 2017, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sangat tinggi** sejumlah **33 indikator** atau 75,00%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **tinggi** sejumlah **2 indikator** atau 4,55%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sedang** sejumlah **0 indikator** atau 0,00%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **rendah** sejumlah **4 indikator** atau 9,09%.
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kriteria **sangat rendah** sejumlah **4 indikator** atau 9,09%.
- Data **belum dapat tersaji** untuk **1 indikator** atau 2,27% yaitu **Indeks Pemberdayaan Gender** Tahun 2017 karena BPS tidak melaksanakan kegiatan Sakernas untuk penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017.

Selanjutnya apabila parameter diukur berdasarkan ketercapaian terhadap target kinerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut sejumlah **24 Indikator** telah **melampaui target**, **3 indikator sesuai target** dan **16 indikator** masih berada **di bawah target**, sedangkan 1 indikator **data belum dapat tersaji** yaitu **Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2017**.

Kemudian sebagai perhatian untuk tahun-tahun berikutnya atas beberapa capaian kinerja yang masih dalam kriteria rendah dan sangat rendah yaitu pada indikator Angka Prevalensi Kasus TB, Indeks Pencemaran Air, Persentase Penurunan PMKS, Rasio KDRT, AKI/1.000 KH, Rasio Luas Kawasan Kumuh, Pertumbuhan nilai investasi PMA, Prosentase Penurunan Penyakit Masyarakat. Selain itu beberapa indikator yang targetnya terlalu rendah sehingga capaian kinerjanya jauh melampaui target yang telah ditetapkan atau sebaliknya agar dapat dievaluasi kembali sesuai dengan potensi, permasalahan dan kondisi yang ada seperti pada indikator jumlah investor baru, dan indikator perlindungan situs atau bangunan cagar budaya.

Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kota Magelang dalam kriteria sangat tinggi, artinya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dialokasikan pada Tahun 2017 telah berhasil, sehingga target-target kinerja yang ditetapkan dapat dicapai dengan hasil memuaskan. Hal ini tentunya karena peran dan sinergi bersama antar organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Magelang. Untuk itu kinerja yang sudah baik ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Guna memperkuat sistem akuntabilitas untuk itu perlu ditingkatkan kesinambungan dalam perencanaan program dan kegiatan, pengalokasian anggaran yang selaras, terarah dan tepat sasaran, serta lebih mengintensifkan monitoring dan evaluasi kinerja agar target kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021 dapat terwujud dan tercapai sesuai rencana dan dimungkinkan ada percepatan pencapaian sasaran strategis.



Semoga Laporan Kinerja yang kami susun ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Magelang, untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur serta pelayanan masyarakat yang semakin baik. Teriring do'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah, kekuatan kepada kita semua dalam rangka mengemban amanah masyarakat Kota Magelang dan meridloi upaya kita sekalian dalam menjalankan pembangunan dan mengabdikan kepada bangsa dan negara.



LAMPIRAN

- Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Kota Magelang
 - Daftar Prestasi Kota Magelang Tahun 2017





PEMERINTAH KOTA MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 P.O Box 78 Telp. (0293) 363695 (5lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 kod mgl IA MAGELANG 56101
Website : inspektoratmagelangkota.go.id, Email : inspektoratmglkota@yahoo.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Magelang untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Magelang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Magelang, 21 Maret 2018

INSPEKTUR KOTA MAGELANG



SUMARTONO, SE. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600706 198602 1 008

DAFTAR PRESTASI KOTA MAGELANG TAHUN 2017

No.	PENGHARGAAN / PRESTASI
1.	Mewakili Indonesia Dalam Sidang Ke-61 Commission on Status of Women bertempat di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI Di Amerika dalam Keberhasilan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kota Magelang
2.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Kota Kecil dari Tim Smart City Community Innovation Centre (SCCIC) Institut Teknologi Bandung
3.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Keamanan dan Kebencanaan Kota (Safe & Secure Cities)
4.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Sosial Cerdas (Smart Social)
5.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Ekonomi Cerdas (Smart Economy)
6.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Pengembangan dan Pengelolaan Kota (Smarter Way)
7.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Lingkungan Cerdas (Smart Environment)
8.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Mobilitas (Mobility)
9.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Kesiapan Infrastruktur (Infrastructure Readiness)
10.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Kesehatan Cerdas (Smart Health)
11.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Digital Government Readiness
12.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Kesiapan Integritas (Integration Readiness)
13.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Ekosistem Inovasi
14.	Penghargaan Rating Kota Cerdas (RKCI)/Smart City Kategori Rating Ekosistem Kompetitif
15.	Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI
16.	Penghargaan atas Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan Capaian Standar Tertinggi dari Menteri Keuangan RI
17.	Penghargaan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM)
18.	Penghargaan Kondisi Keuangan Daerah Terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM)

No.	PENGHARGAAN / PRESTASI
19.	Penghargaan Anugerah Pancawara Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe 1 & 2 dari Kementerian Perdagangan dan Yayasan Danamon Peduli
20.	Penghargaan Anugerah Pancawara atas Inovasi Pengembangan Pasar Rakyat sebagai Ruang Sosial Budaya Kategori Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Tipe 1 & 2 dari Kementerian Perdagangan dan Yayasan Danamon Peduli
21.	Penghargaan Adipura Kirana kepada Kota Sedang dalam Penataan Lingkungan Hidup
22.	Penghargaan Adiwiyata kepada Sekolah Berwawasan Lingkungan
23.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha kepada Kota Sedang dalam Penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
24.	Anugerah Kota Layak Anak
25.	Penghargaan Puskesmas Ramah Anak
26.	Anugerah Parahita Ekapraya
27.	Kejuaraan Pilar-pilar Sosial Berprestasi dalam rangka Hari Kesetiakwaan Nasional Kategori Lembaga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
28.	Penghargaan Pembina Terbaik Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari Majalah Economic Review bekerja sama dengan Ideku Group
29.	Penghargaan kepada BUMD Terbaik dari Majalah Business News Indonesia
30.	Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Pemanfaat Teknologi Tepat Guna dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
31.	Penghargaan Anugerah Iptek Budhipraja kepada Kabupaten/Kota oleh Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
32.	Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kota Terbaik Innovative Government Award
33.	Penghargaan atas Tercapainya Luas Tambah Tanam Padi dari Kementerian Pertanian RI
34.	Juara Harapan I Kategori Penulis Cilik Cerita Pendek Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar Konferensi Penulis Cilik Indonesia (KCPI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
35.	Juara Harapan II Kategori Penulis Cilik Cerita Pendek Apresiasi Sastra Siswa Sekolah Dasar Konferensi Penulis Cilik Indonesia (KCPI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
36.	Juara II Bidang Studi Matematika Olimpiade Science Nasional di Pekan Baru
37.	Juara II Cabang Robotik Sekolah Dasar Olympic Ahmad Dahlan (OlympicAD)
38.	Juara II Cabang Majalah Sekolah Olympic Ahmad Dahlan (OlympicAD)
39.	Juara III Taiji Jian (Jurus Senjata Pedang) Kejuaraan Nasional Wushu Eagle Fist
40.	Juara III Taiji Quan (Jurus Tangan Kosong) Kejuaraan Nasional Wushu Eagle Fist
41.	Juara I Nomor Poomsae Individu Putra Yogyakarta Master Taekwondo Poomse III Championship
42.	Juara I Nomor Poomsae Pairs Yogyakarta Master Taekwondo Poomse III Championship
43.	Juara II Nomor Poomsae Individu Putri Yogyakarta Master Taekwondo Poomse III Championship
44.	Juara III Nomor Poomsae Individu Putri Yogyakarta Master Taekwondo Poomse III Championship

No.	PENGHARGAAN / PRESTASI
45.	Juara III Cabang Renang Nomor 400 m Gaya Ganti Perorangan Putri Kejuaraan Nasional Renang Kelompok Umur Tahun 2017 di Kolam Renang Jakabaring Aquatic Stadium Palembang
46.	Juara II Nomor 4x50 m Estafet Surface KU E Putri Kejuaraan Nasional Finswimming (Selam) Nomor Kolam di Bandung
47.	Juara II Nomor 400 m Bifins KU C Putri Kejuaraan Nasional Finswimming (Selam) Nomor Kolam di Bandung
48.	Juara II Nomor 500 m Bifins KU D Putri Kejuaraan Nasional Finswimming (Selam) Nomor Kolam di Bandung